

**Studi untuk**  
**Merumuskan Rencana Tata Ruang**  
**Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS)**  
**di**  
**Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia**

**Laporan Final**

**Volume 2: Main Text**

**Pebruari 2011**

**JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY**

---

**Value Planning International, Inc.**  
**Oriental Consultants Co., Ltd.**  
**Yachiyo Engineering Co., Ltd.**

<b>INO</b>
<b>JR</b>
<b>11-003</b>

**Studi untuk  
Merumuskan Rencana Tata Ruang  
Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS)  
di  
Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia**

**Laporan Final**

**Volume 2: Main Text**

**Pebruari 2011**

**JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY**

---

**Value Planning International, Inc.  
Oriental Consultants Co., Ltd.  
Yachiyo Engineering Co., Ltd.**

USD1.0 = Rp. 9,000

JPY1.0 = Rp. 102

USD 1.0 = JYN 88.2

(Nilai Tukar Mata Uang bulan September 2010)

## **PENGANTAR**

Menanggapi permintaan dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang memutuskan untuk melakukan penelitian tentang "Studi untuk Merumuskan Rencana Tata Ruang Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS) di Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia", yang dipercayakan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

JICA menyeleksi dan mengirimkan sebuah tim studi yang dipimpin oleh Dr. Katsuhide Nagayama dari Value Planning International, Inc. yang bekerja antara bulan Mei 2009 hingga Desember 2010. Tim studi terdiri dari Value Planning International, Inc., Oriental Consultants Co., Ltd. dan Yachiyo Engineering Co., Ltd.

Dalam kurun kegiatannya, tim ini melakukan diskusi dengan pejabat-pejabat terkait dari Pemerintah Indonesia, dan survei lapangan yang dilakukan di daerah studi. Setelah kembali ke Jepang, tim ini melakukan studi lebih lanjut dan menyiapkan laporan akhir.

Kami berharap bahwa laporan ini akan memberikan kontribusi terhadap proses legal untuk persetujuan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dan untuk peningkatan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Akhirnya, kami ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada para pejabat terkait dari Pemerintah Indonesia atas kerjasamanya yang erat untuk mendukung studi ini.

Pebruari 2011

Motofumi Kohara  
Chief Representative  
Indonesia Office  
Japan International Cooperation Agency

Pebruari 2011

Motofumi Kohara  
Chief Representative  
Indonesia Office  
Japan International Cooperation Agency

Dengan hormat,

**Perihal: Surat Pengiriman**

Dengan rasa gembira dengan ini Kami secara resmi menyerahkan laporan akhir Studi untuk Merumuskan Rencana Tata Ruang Kawasan Gerbangkertosusila (GKS) di Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia.

Laporan ini mengkompilasi hasil studi yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun di Jepang sejak bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2010 oleh Tim yang terdiri dari Value Planning International, Inc., in corporation with Oriental Consultants Co., Ltd., dan Yachiyo Engineering. CO., Ltd.

Kami sangat menghargai banyak pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian yang intensif, penyelidikan dan diskusi dalam rangka penelitian. Kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus khusus untuk mereka yang memberikan bantuan yang luas dan kerjasama dengan tim studi, khususnya kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

Kami juga sangat menghargai atas bantuan personel program ini pada lembaga Anda, JICA Indonesia Office, dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia atas dukungan mereka yang baik dan nasihat yang berharga dalam perjalanan Studi ini.

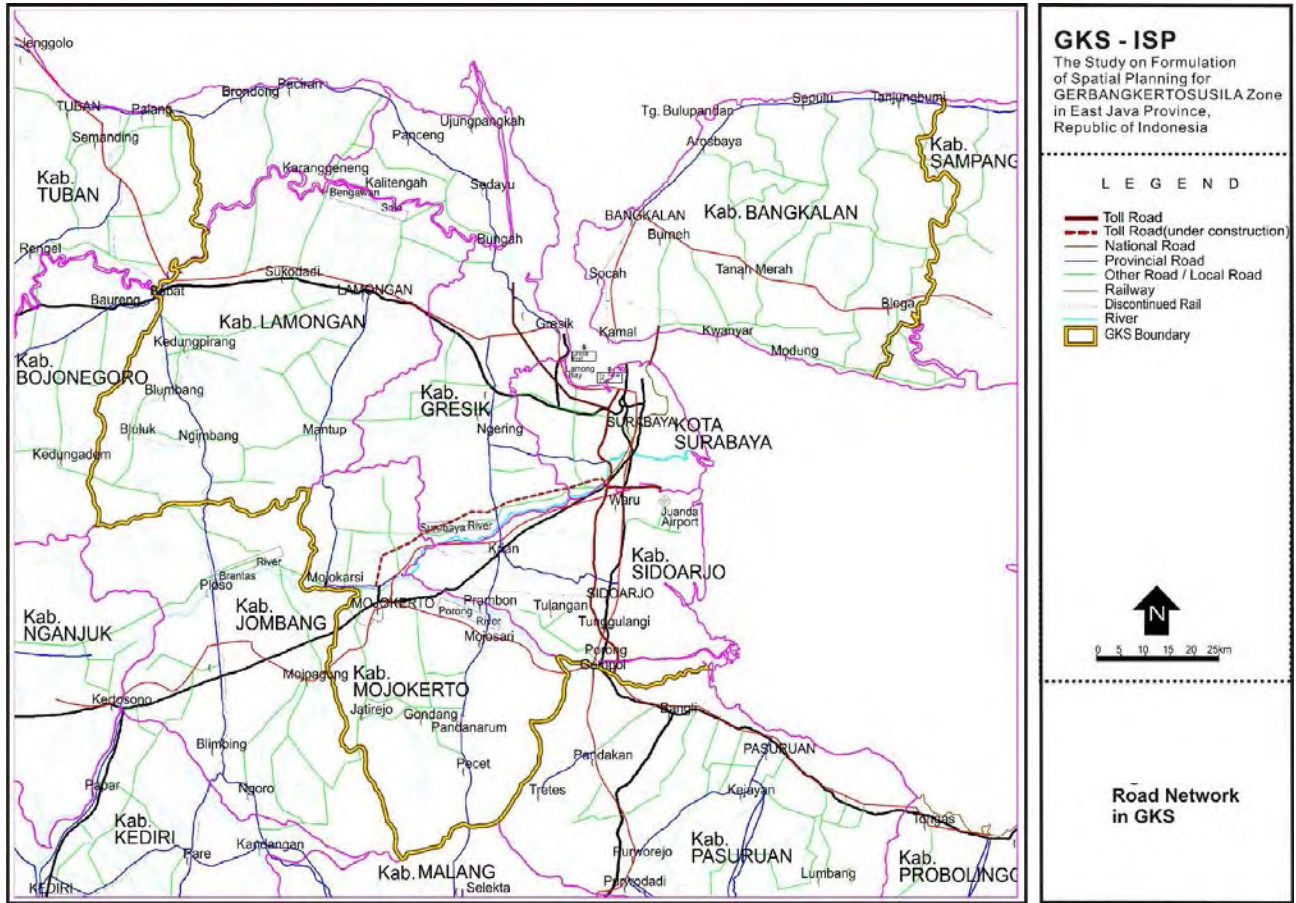
Kami berharap laporan ini akan berkontribusi pada pembangunan jangka panjang untuk Kawasan GKS yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan lingkungan yang seimbang sebagai pelopor ekonomi terkemuka terbesar kedua di Indonesia.

Hormat Kami,

**Katsuhide NAGAYAMA, Ph.D.**

Team Leader

Studi untuk Merumuskan Tata Ruang Kawasan  
GERBANGKERTOSUSILA (GKS) di Provinsi  
Jawa Timur, Republik Indonesia



**Peta Wilayah Studi**

# C08 GKS Spatial Plan 2030

## Legend

### Land Use Plan (2030)

- Protected area
- Conservation area
- Agriculture (Irrigated)
- Agriculture
- Protected Forest
- Production Forest
- Conservation Forest
- Buffer
- Urban Development area (high)
- Urban Development area (mid)
- Urban Development area (low)
- Kampong
- Industrial area
- Spacial Zone (Military)

### Proposed Environmental Sensitive Zone

- Mangrove Ecosystem

### Land Stability

- Preservation Zone
- Conservation Zone
- Restoration Zone

### Forest Ecosystem

- Preservation zone
- Conservation zone
- Restoration zone

### Strategic Projects

- Project Identified by GKS-ISP
- Commercial area
- Green Area
- Public Facilities
- Industrial Zone
- Military Zone
- Other Strategic Projects

### Urban Center

- Regional Center
- GKS Sub-Centers
- SMA Level Centers
- SMA Sub-Centers
- GKS Kab.Centers
- Other Kab.Sub-Centers
- Intermodal Gateway

### Road Network

- Toll
- Arterial
- Collector
- Secondary Arterial
- Local
- Ferry

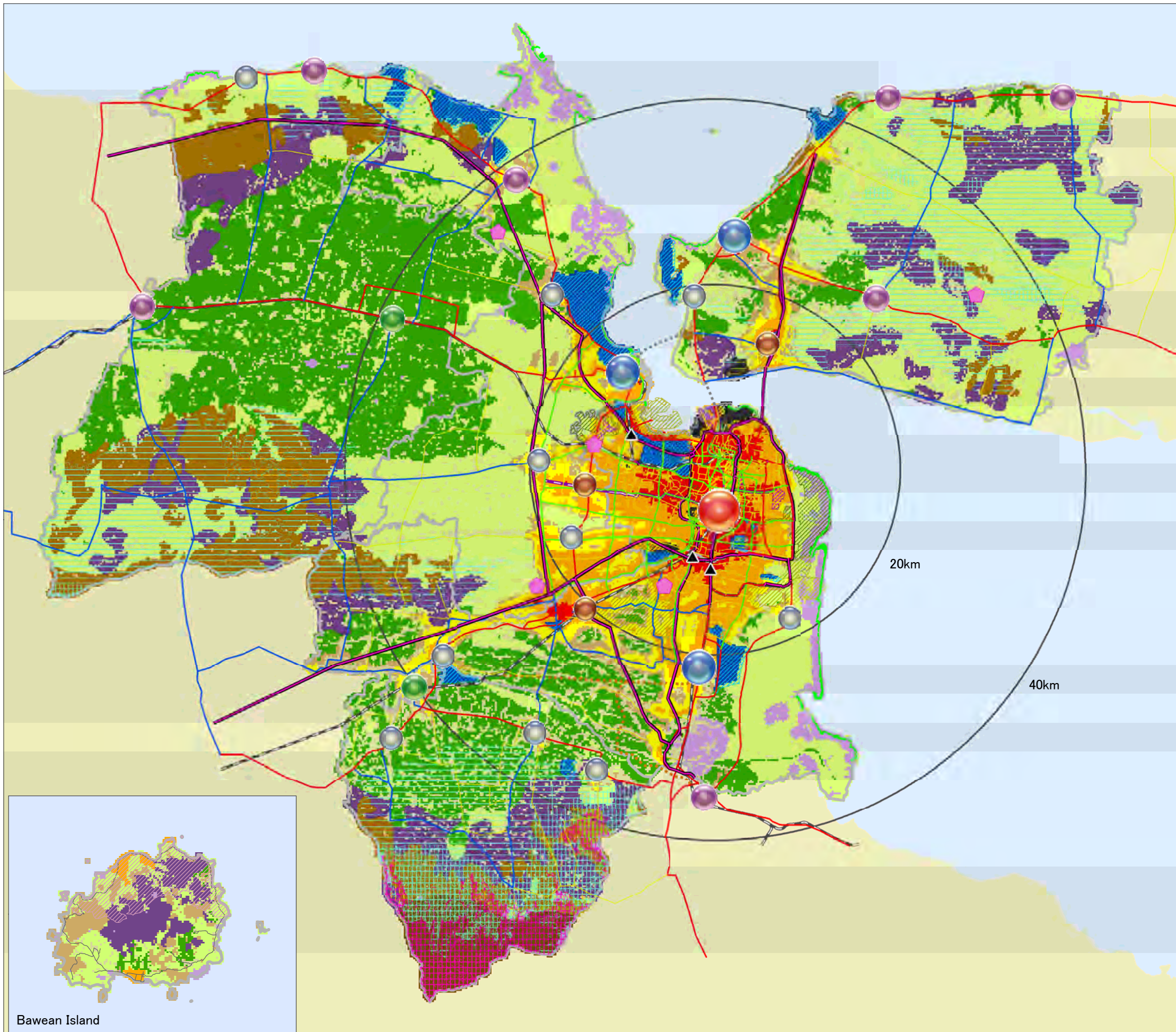
### Railway

- Proposed Railway Network (Passenger)
- Freight SProposed Railway Network (freight)
- Railway (under Construction)
- New Mass Transit Corridor (NMTC)

0 5 10 20 30km



GKS-ISP  
The Study on  
Formulation of Spatial Planning  
for GKS Zone



Bawean Island

**Studi Untuk  
Memformulasikan Rencana Tata Ruang  
Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS)  
Provinsi Jawa Timur,  
Republik Indonesia**

**Laporan Akhir**

***Main Text***

**Daftar Isi**

Pendahuluan  
Peta  
Daftar Isi  
Daftar Gambar dan Tabel  
Singkatan dan Akronim

**1 PENGANTAR**

1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.2	Tujuan Studi .....	1-1
1.3	Tujuan Penataan Ruang Kawasan GKS .....	1-2
1.4	Dasar Hukum Terkait.....	1-3
1.5	Profil Sosial-Ekonomi Kawasan GKS .....	1-9
1.5.1	Populasi.....	1-9
1.5.2	Status Tenaga Kerja.....	1-12
1.5.3	Ekonomi .....	1-16

**2 TINJAUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROPINSI UNTUK KAWASAN GKS**

2.1	Kebijakan Nasional Penataan Ruang, Arahan dan Strategi.....	2-1
2.1.1	Umum .....	2-1
2.1.2	Arahan Pelaksanaan dan Strategis Penataan Ruang .....	2-2
2.2	Kebijakan, Arahan dan Strategi Penataan Ruang Jawa-Bali .....	2-4
2.3	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Jawa Timur .....	2-5
2.4	Pengembangan Visi dan Misi untuk Rencana Spasial Menurut Kabupaten di Kawasan GKS.....	2-13

**3 PENGEMBANGAN VISI DAN STRATEGI KAWASAN GKS**

3.1	Visi dan Misi .....	3-1
-----	---------------------	-----



3.1.1	Visi .....	3-1
3.1.2	Misi/Tujuan .....	3-1
3.1.3	Strategi Pembangunan Utama GKS.....	3-1
3.2	Analisa SWOT GKS.....	3-5
3.3	Fungsi dan Peran GKS .....	3-6
3.4	Isu Pembangunan, Kebijakan dan Strategi untuk Penataan Ruang GKS.....	3-7
3.4.1	Pembangunan Ekonomi dan Sosial Regional.....	3-7
3.4.2	Pengembangan Struktur Ruang .....	3-8
3.4.3	Pengembangan Sistem Transportasi.....	3-9
3.4.4	Pembangunan Infrastruktur untuk Pengelolaan dan Pelayanan Utilitas Sumber Daya Air .....	3-11
3.4.5	Manajemen Lingkungan.....	3-14

#### **4 KERANGKA SOSIAL EKONOMI**

4.1	Skenario Alternatif .....	4-1
4.2	Kerangka Populasi Penduduk.....	4-1
4.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi .....	4-3
4.3.1	Kerangka Nasional dan Regional.....	4-3
4.3.2	Kerangka Ekonomi GKS: Tingkat Pertumbuhan dan PDRB Harga Konstan 2000 .....	4-5
4.3.3	Pertumbuhan PDRB per Kapita GKS .....	4-6
4.3.4	Koherensi untuk Kerangka Perencanaan Tata Ruang .....	4-7

#### **5 RENCANA STRUKTUR RUANG**

5.1	Rencana Sistem Perkotaan: Sistem Permukiman .....	5-1
5.1.1	Pola Struktur dan Ruang .....	5-1
5.1.2	Struktur Ruang Regional .....	5-6
5.2	Sistem Hubungan Perkotaan-Perdesaan .....	5-16
5.2.1	Struktur Hubungan Perdesaan.....	5-16
5.2.2	Meningkatkan Kegiatan Ekonomi .....	5-19
5.3	Sistem Jaringan Transportasi yang Terintegrasi .....	5-21
5.3.1	Skenario Permintaan Terhadap Transportasi .....	5-21
5.3.2	Pengembangan Jalan.....	5-29
5.3.3	Manajemen dan Pengendalian Lalu Lintas .....	5-63
5.3.4	Pengembangan Angkutan Umum.....	5-69
5.3.5	Pembangunan Pelabuhan.....	5-85
5.3.6	Pengembangan Bandara .....	5-91
5.3.7	Sistem Angkutan Barang.....	5-98
5.3.8	Evaluasi Ekonomi .....	5-107
5.4	Kerangka Nasional dan Regional .....	5-112

5.4.1	Pasokan Air .....	5-112
5.4.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase .....	5-134
5.4.3	Pengelolaan Limbah Padat .....	5-148
5.4.4	Sistem Energi.....	5-163
5.4.5	Jaringan Telekomunikasi .....	5-181
5.5	Perumahan dan Pelayanan Publik .....	5-185
5.5.1	Pengadaan Perumahan .....	5-185
5.5.2	Pelayanan Publik .....	5-192

## **6 RENCANA POLA RUANG**

6.1	Analisa dan Pola Penggunaan Lahan Yang Ada .....	6-1
6.1.1	Kondisi Saat Ini .....	6-1
6.1.2	Urbanisasi dan Suburbanisasi .....	6-3
6.1.3	Penggunaan Lahan Pertanian .....	6-5
6.1.4	Proses Industrialisasi dan Lingkungan.....	6-8
6.1.5	Isu Perencanaan .....	6-10
6.2	Evaluasi Penggunaan Lahan untuk Daya Dukung Spasial .....	6-12
6.3	Pengendalian Penggunaan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan....	6-21
6.3.1	Pengukuran Pengendalian Penggunaan Lahan untuk Perindungan Lingkungan.....	6-21
6.3.2	Strategi untuk Pengelolaan Lingkungan .....	6-24
6.3.3	Pengelolaan Daerah Sensitif secara Lingkungan .....	6-25
6.3.4	Skenarion Urbanisasi dan Kebutuhan Penggunaan Lahan Perkotaan .....	6-26
6.4	Rencana Pemanfaatan Lahan 2030 untuk GKS.....	6-30
6.4.1	Metodologi.....	6-30
6.4.2	Usulan Rencana Pemanfaatan Lahan GKS 2030.....	6-32
6.5	Rencana Tata Ruang Terpadu untuk Kawasan GKS.....	6-37
6.5.1	Kawasan Pengembangan Strategis untuk Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi.....	6-37
6.5.2	Rencana Tata Ruang Kawasan GKS tahun 2030 .....	6-43
6.6	Sistem Manajemen Lingkungan .....	6-45
6.6.1	Masalah Lingkungan yang ada di Kawasan GKS.....	6-45
6.6.2	Kerangka Kebijakan Lingkungan untuk Penataan Ruang di Kawasan GKS.....	6-49
6.6.3	Zoning Lingkungan Sensitif .....	6-52
6.6.4	Integrasi Kawasan Lingkungan Sensitif ke Penataan Ruang.....	6-65
6.7	Bencana Alam.....	6-66

6.7.1	Umum .....	6-66
6.7.2	Persepsi Masyarakat tentang Bencana Alam .....	6-66
6.7.3	Banjir .....	6-69
6.7.4	Gelombang Pasang Air Laut .....	6-72
6.7.5	Gempa Bumi .....	6-72
6.7.6	Letusan Gunung Berapi.....	6-73

## **7 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (PROYEK/PROGRAM)**

7.1	Konsep Program Pembangunan .....	7-1
7.2	Program Utama Pengembangan Kawasan GKS 2010-2030 .....	7-16

## **8 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

8.1	Pengaturan Zoning Pemanfaatan Ruang.....	8-1
8.2	Langkah-langkah Administratif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....	8-3
8.2.1	Konsep Dasar.....	8-3
8.2.2	Manajemen Kerangka Kerja Administratif .....	8-4

## **9 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERTENTU**

9.1	Pendahuluan .....	9-1
9.1.1	Dasar Pemikiran .....	9-1
9.1.2	Konsep KLHS .....	9-2
9.1.3	Tantangan, Kesulitan dan Keterbatasan .....	9-3
9.1.4	Masalah Lain Yang Diidentifikasi.....	9-4
9.2	Penyaringan dan Pelingkupan KLHS Tertentu .....	9-6
9.2.1	Dasar Pemikiran .....	9-6
9.2.2	Tujuan dan Sasaran KLHS Tertentu.....	9-6
9.2.3	Proses KLHS.....	9-9
9.2.4	Kerangka KLHS .....	9-11
9.2.5	Keterlibatan Pemangku Kepentingan.....	9-13
9.3	Kunci Masalah Lingkungan dan Sosial Ekonomi.....	9-14
9.3.1	Analisis SWOT .....	9-14
9.3.2	Struktur Masalah .....	9-17
9.3.3	Keterkaitan Antara Masalah-Masalah Utama .....	9-17
9.4	Penilaian Kebijakan Penggunaan Lahan GKS terhadap Pengelolaan Pertumbuhan Perkotaan.....	9-19
9.4.1	Ruang Lingkup Penilaian .....	9-19
9.4.2	Penilaian Dampak Potensial Penting.....	9-22
9.4.3	Langkah-langkah yang Mungkin untuk Mengurangi Dampak Penting .....	9-29
9.5	Penilaian Rencana Tata Ruang Kawasan GKS.....	9-30

9.5.1	Pendahuluan .....	9-30
9.5.2	Ruang Lingkup Penilaian .....	9-30
9.5.3	Dampak Signifikan Terkait dengan Lingkungan.....	9-33
9.5.4	Dampak Signifikan Terkait dengan Aspek Kelembagaan .....	9-34
9.6	Penilaian Pengembangan Pola Ruang di Kawasan GKS .....	9-35
9.6.1	Lingkup KLHS.....	9-35
9.6.2	Implikasi Pola Pembangunan yang ada untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS 2030 .....	9-35
9.6.3	Penilaian Dampak Signifikan .....	9-36

## **10 MEMBANGUN KELEMBAGAAN UNTUK PENGEMBANGAN RUANG**

10.1	Isu Secara Keseluruhan untuk Membangun Institusi dan Reformasi.....	10-1
10.1.1	Proses Desentralisasi di Indonesia .....	10-1
10.1.2	Masalah yang Diatasi dalam Proses Desentralisasi.....	10-2
10.1.3	Arahan Dasar untuk Perbaikan Kelembagaan untuk Manajemen Penataan Ruang di Kawasan GKS.....	10-4
10.2	Pembentukan 'Badan Kerjasama Pembangunan GKS' .....	10-5
10.2.1	Struktur Pemerintahan Yang Ada Di Provinsi Jawa Timur .....	10-5
10.2.2	Dasar Pemikiran dan Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan GKS .....	10-8
10.2.3	Struktur Organisasi .....	10-10
10.2.4	Pembentukan Komite Pengarah ( <i>Steering Committee</i> ).....	10-11
10.2.5	Gugus Tugas dari Bidang Kerja Lintas-Fungsional .....	10-11
10.2.6	Fungsi yang Diharapkan dari Kelompok Penasihat.....	10-13
10.2.7	Peran dan Tanggung Jawab Badan Kerja Sama Pembangunan GKS .....	10-13
10.2.8	Tahap Implementasi Manajemen Kelembagaan Kawasan GKS .....	10-15
10.3	Kapasitas Bangun Untuk Penataan Ruang GKS .....	10-19
10.3.1	Kerangka Kerja Nasional untuk Kapasitas Bangun .....	10-19
10.3.2	Masalah-masalah pada Kapasitas Bangunan untuk Manajemen Penataan Ruang GKS .....	10-20
10.3.3	Mengukut Peningkatan Kapasitas Bangun.....	10-24
10.4	Pembiayaan Pengelolaan Kawasan GKS.....	10-29
10.4.1	Situasi Keuangan GKS.....	10-29
10.4.2	Pendapatan .....	10-29
10.4.3	Pendanaan .....	10-32
10.4.4	Gambar Keseluruhan Pengeluaran .....	10-34
10.4.5	Langkah-langkah untuk Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah.....	10-35
10.5	Partisipasi Masyarakat .....	10-36

10.5.1	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang .....	10-36
10.5.2	Kerangka Hukum untuk Partisipasi Masyarakat .....	10-36
10.5.3	Peningkatan Proses Partisipasi Masyarakat .....	10-39

## **11 TINDAK LANJUT**

\*\*\*

## - DAFTAR TABEL -

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1.3.1	Status Persetujuan RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di GKS saat ini	1-3
Tabel 1.5.1	Populasi dan pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota, 1980 – 2007	1-10
Tabel 1.5.2	Kepadatan Penduduk Daerah Perkotaan menurut Rasio Wilayah Perkotaan	1-11
Tabel 1.5.3	Kepadatan Penduduk Daerah Perkotaan menurut Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota	1-12
Tabel 1.5.4	Populasi Pekerja di Sektor Formal di GKS	1-12
Tabel 1.5.5	Populasi Tenaga Kerja menurut Status dan Wilayah Lapangan Kerja	1-13
Tabel 1.5.6	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	1-14
Tabel 1.5.7	Jumlah Pengangguran menurut Wilayah di GKS Tahun 2007	1-14
Tabel 1.5.8	Tenaga Kerja Formal menurut Sektor Tahun 2007	1-15
Tabel 1.5.9	Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja menurut Sektor Tahun 2000-2007	1-16
Tabel 1.5.10	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di GKS menurut Wilayah	1-16
Tabel 1.5.11	PDRB menurut Kabupaten/Kota dari Tahun 2000 hingga 2007 (harga konstan 2000)	1-17
Tabel 1.5.12	PDRB dan PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007	1-18
Tabel 1.5.13	Penduduk yang Hidup Miskin di GKS Tahun 2006 dan 2007	1-18
Tabel 1.5.14	Jumlah Industri Kecil, Menengah dan Industri Besar di GKS Tahun 2008	1-19
Tabel 1.5.15	Bangkitan Tenaga Kerja menurut Sektor di GKS Tahun 2007	1-19
Tabel 2.1.1	Tujuan Pembangunan Nasional Jangka Menengah (2010-2014)	2-2
Tabel 2.3.1	Kebijakan dan strategi Pembangunan untuk Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur	2-7
Tabel 2.4.1	Visi Rencana Tata Ruang yang telah disepakati oleh Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota	2-13
Tabel 2.4.2	Misi Rencana Tata Ruang yang telah disepakati oleh Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota	2-14
Tabel 3.1.1	Misi / Tujuan Pembangunan Kawasan GKS di Masa Depan	3-1
Tabel 3.1.2	Peluang dan Kendala untuk Strategi Pembangunan Ekonomi	3-3
Tabel 3.2.1	Analisis SWOT Kawasan GKS berdasarkan Evaluasi Keseluruhan	3-5

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 4.2.1	Proyeksi Penduduk menurut Skenario Pertumbuhan GKS	4-2
Tabel 4.3.1	Proyeksi Laju Pertumbuhan Perekonomian GKS, Jawa Timur dan Nasional	4-4
Tabel 4.3.2	Sumbangan Perekonomian terhadap Total Nasional (%)	4-4
Tabel 4.3.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harga GKS	4-5
Tabel 4.3.4	Perbandingan dan Evaluasi Skenario Alternatif	4-8
Tabel 5.1.1	Ringkasan Rencana Arah Pengembangan RTRW Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten dan Kota di GKS	5-10
Tabel 5.1.2	Peran dan Fungsi dari Pusat Perkotaan Utama di GKS	5-12
Tabel 5.2.1	Fungsi Kawasan GKS dalam Sistem Jaringan	5-17
Tabel 5.2.2	Konsep Terminal Sisi Jalan	5-20
Tabel 5.3.1	Perkiraan Jumlah Kendaraan yang Terdaftar di Masa Depan	5-21
Tabel 5.3.2	Jumlah Total Perjalanan yang di Estimasi di Masa Depan	5-24
Tabel 5.3.3	Kelayakan Proyek Rencana Jalan Tol (Tahun 2030)	5-35
Tabel 5.3.4	Ramalan Permintaan di Jalan Tol Eksisting dan Rencana	5-36
Tabel 5.3.5	Permintaan Lalu Lintas Ter-Revisi Mempertimbangkan Pengalihan ke Jalan Tol	5-36
Tabel 5.3.6	Definisi dari Fungsi Jalan	5-38
Tabel 5.3.7	Daftar PKN di Pulau Jawa	5-38
Tabel 5.3.8	Daftar PKW di Propinsi Jawa Timur	5-38
Tabel 5.3.9	Daftar PKL di Zona GKS	5-39
Tabel 5.3.10	Daftar Proyek Pengembangan Jalan	5-54
Tabel 5.3.11	Daftar Proyek Flyover/Underpass	5-61
Tabel 5.3.12	Cakupan Populasi oleh Angkutan Berbasis Rel	5-69
Tabel 5.3.13	Daftar Proyek Pengembangan Perkerataapian	5-77
Tabel 5.3.14	Terminal Bus Antar Kota di GKS	5-80
Tabel 5.3.15	Jalur Ferry Lines di Wilayah GKS	5-81
Tabel 5.3.16	Pengembangan Pelabuhan Ferry di Wilayah GKS	5-82
Tabel 5.3.17	Perkiraan Volume Penumpang	5-94
Tabel 5.3.18	Perkiraan Pergerakan Pesawat Udara	5-94
Tabel 5.3.19	Komposisi Kendaraan di Ruas Jalan Tol Utama	5-99
Tabel 5.3.20	Faktor-faktor untuk Mengkonversi Finansial menjadi Harga Ekonomi	5-108
Tabel 5.3.21	Biaya Operasional Kendaraan	5-109
Tabel 5.3.22	Nilai Waktu dari Tiap Unit Kendaraan	5-109
Tabel 5.3.23	Hasil Evaluasi Ekonomi dari Proyek Transportasi GKS-ISP	5-110

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 5.3.24	Sensitifitas dari EIRR	5-110
Tabel 5.4.1	Ketersediaan Sumber Daya Air di Kawasan GKS	5-112
Tabel 5.4.2	Potensi Air Tanah di Kawasan GKS	5-114
Tabel 5.4.3	Konsumsi Air di Wilayah Perkotaan di Kawasan GKS (2007)	5-116
Tabel 5.4.4	Konsumsi Air di Wilayah Pedesaan di Kawasan GKS (2007)	5-116
Tabel 5.4.5	Konsumsi Air Non_Rumah Tangga di tahun 2005 Berdasarkan Konsumen	5-117
Tabel 5.4.6	Kriteria Perencanaan GKS-ISP 2030 untuk Permintaan Air Rumah Tangga	5-119
Tabel 5.4.7	Kriteria Perencanaan GKS-ISP 2030 untuk Permintaan Air Industri	5-120
Tabel 5.4.8	Kriteria Perencanaan GKS-ISP 2030 untuk Permintaan Air Non-Rumah Tangga	5-121
Tabel 5.4.9	Perkiraan Permintaan untuk Air Non-irigasi di Kawasan GKS	5-122
Tabel 5.4.10	Perkiraan Permintaan untuk Air Non-irigasi di Kawasan GKS Berdasarkan Pengguna	5-123
Tabel 5.4.11	Wilayah Irigasi di Kawasan GKS	5-124
Tabel 5.4.12	Tingkat Pemberian Air Puncak dan Tahunan di Kawasan GKS	5-125
Tabel 5.4.13	Perkiraan Tingkat Pemberian Air di Kawasan GKS Zone untuk 2030	5-125
Tabel 5.4.14	Permintaan Air Irigasi Tahun 2030	5-125
Tabel 5.4.15	Keseimbangan Pasokan-Permintaan Air Tahun 2025: dengan Mengadopsi Langkah-langkah Penghematan Air	5-127
Tabel 5.4.16	Pengurangan NRW dengan Tarif USD 0.23/m <sup>3</sup> pada Kondisi Tahun 2006	5-128
Tabel 5.4.17	Pengurangan NRW dengan Tarif USD 0.28/m <sup>3</sup> pada Kondisi Tahun 2006	5-129
Tabel 5.4.18	Rencana Pasokan Air Rumah Tangga untuk Tahun 2030	5-129
Tabel 5.4.19	Rencana Pasokan Air Rumah Tangga untuk Tahun 2030 tanpa Pengurangan NRW dan dengan Tarif USD 0.23/m <sup>3</sup>	5-129
Tabel 5.4.20	Rencana Pasokan Air Rumah Tangga untuk Tahun 2030 dengan Pengurangan NRW dan dengan Tarif USD 0.28/m <sup>3</sup>	5-130
Tabel 5.4.21	Usulan Aksi untuk Pasokan Air	5-133
Tabel 5.4.22	Proyek Pengembangan Sungai Brantas	5-135
Tabel 5.4.23	Proyek Pengembangan Sungai Solo	5-136
Tabel 5.4.24	Kejadian Banjir oleh Aliran Sungai Tahun 2000-2001	5-136
Tabel 5.4.25	Rencana Aksi untuk Penanganan Air Limbah dan Drainase Perkotaan	5-147
Tabel 5.4.26	Bangkitan Limbah (2007)	5-148
Tabel 5.4.27	Rencana dan Tempat Pembuangan Sampah Eksisting	5-149
Tabel 5.4.28	Rasio Cakupan Pengumpulan	5-149
Tabel 5.4.29	Produksi Kompos	5-150



<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 5.4.30	Proyeksi Populasi di GKS Sampai Dengan Tahun 2030	5-150
Tabel 5.4.31	Asumsi Distribusi Populasi di GKS	5-150
Tabel 5.4.32	Bangkitan Unit untuk Perkiraan Bangkitan	5-151
Tabel 5.4.33	Perkiraan Bangkitan Limbah	5-151
Tabel 5.4.34	Limbah untuk Pembuangan di TPS	5-152
Tabel 5.4.35	Lahan yang Dibutuhkan oleh TPS Tahun 2030	5-152
Tabel 5.4.36	Target Cakupan Pengumpulan	5-153
Tabel 5.4.37	Limbah yang Diangkut ke TPS dan Luas Lahan TPA yang Dibutuhkan (3R sama dengan tahun 2010)	5-153
Tabel 5.4.38	Tingkat Penurunan Target	5-154
Tabel 5.4.39	Perkiraan dari Limbah yang Dikumpulkan oleh DKP di Sumbernya	5-154
Tabel 5.4.40	Potensi Daur Ulang Limbah Berdasarkan Wilayah	5-154
Tabel 5.4.41	Jumlah Maksimum Daur Ulang	5-155
Tabel 5.4.42	Potensi Rasio untuk Pengomposan	5-155
Tabel 5.4.43	Potensi Jumlah Limbah untuk Pengomposan	5-156
Tabel 5.4.44	Limbah yang Dihasilkan melalui 3Rs yang Intensif	5-156
Tabel 5.4.45	Kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir dengan Langkah 3R yang Intensif	5-157
Tabel 5.4.46	Proyek Pengembangan dalam Rencana Induk SWM Terpadu	5-161
Tabel 5.4.47	Rekomendasi Jadwal Pelaksanaan Proyek	5-162
Tabel 5.4.48	Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik di Jawa Timur	5-163
Tabel 5.4.49	Tambahan dari Sistem Distribusi di Jawa Timur	5-165
Tabel 5.4.50	Kantor Wilayah PLN Jawa Timur dan Konsumsi Listrik tahun 2008	5-165
Tabel 5.4.51	Jumlah Sambungan di Jawa Timur Berdasarkan Sektor	5-166
Tabel 5.4.52	Konsumsi Tenaga Listrik (GWh) di Jawa Timur Berdasarkan Sektor	5-166
Tabel 5.4.53	Konsumsi Tenaga Listrik (KWh) per Sambungan di Jawa Timur Berdasarkan Sektor	5-166
Tabel 5.4.54	Beban Puncak dan Faktor Beban di Jawa Timur	5-168
Tabel 5.4.55	Distribusi Trafo 20kV di Jawa Timur Tahun 2008	5-168
Tabel 5.4.56	Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur (2004-2008)	5-169
Tabel 5.4.57	Rasio Elektrifikasi di Desa di Jawa Timur (2004-2008)	5-169
Tabel 5.4.58	Kerugian Distribusi pada Sistem Tenaga Listrik di Jawa Timur (2004-2008)	5-170
Tabel 5.4.59	Perkiraan Keseimbangan Pasokan-Permintaan di Jawa Timur dan GKS	5-173
Tabel 5.4.60	Langkah Penghematan Listrik dari Berbagai Negara di Dunia	5-174
Tabel 5.4.61	Perkiraan Pasokan-Permintaan di Jawa Timur dan GKS	5-175
Tabel 5.4.62	Rencana Pembangkitan Tenaga	5-178

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 5.4.63	Rencana Penambahan Transmisi	5-178
Tabel 5.4.64	Rencana Substasiun Baru	5-179
Tabel 5.4.65	Rencana Penguatan Jaringan Distribusi	5-180
Tabel 5.4.66	Jumlah Pelanggan Telepon Berdasarkan Pelayanannya (2005-2009)	5-183
Tabel 5.5.1	Kondisi Pembangunan Perumahan di Kawasan GKS Tahun 2007	5-186
Tabel 5.5.2	Kredit Perumahan menurut Bank, Tipe, Suku Bunga, dan Masa Kredit	5-188
Tabel 5.5.3	Identifikasi Kawasan Kumuh di GKS	5-189
Tabel 5.5.4	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan di GKS Tahun 2007	5-192
Tabel 5.5.5	Jumlah Penambahan yang Dibutuhkan untuk Fasilitas Pendidikan menurut Skenario Pertumbuhan yang Didorong hingga Tahun 2030	5-193
Tabel 5.5.6	Situasi Fasilitas Medis dan Kesehatan Saat Ini di GKS	5-194
Tabel 5.5.7	Jumlah Penambahan yang Dibutuhkan untuk Fasilitas Kesehatan Menurut Skenario Pertumbuhan yang Didorong hingga Tahun 2030	5-195
Tabel 5.5.8	Situasi Fasilitas Ibadah Saat ini di GKS Tahun 2007	5-196
Tabel 5.5.9	Jumlah Penambahan yang Dibutuhkan untuk Fasilitas Pengibadatan Menurut Skenario Pertumbuhan yang Didorong hingga Tahun 2030	5-197
Tabel 5.5.10	Kondisi Eksisting Luasan RTH di Kota Surabaya Tahun 2007	5-199
Tabel 5.5.11	Fasilitas Umum dengan Sistem Perencanaan	5-201
Tabel 5.5.12	Ringkasan Wewenang Administratif dan Wilayah Masyarakat di Jawa Timur	5-203
Tabel 5.5.13	Sistem Rencana Hirarki Taman di Jepang	5-204
Tabel 6.1.1	Penggunaan Lahan menurut Kabupaten/Kota (km <sup>2</sup> )	6-2
Tabel 6.1.2	Luasan Lahan Pertanian di GKS (km <sup>2</sup> )	6-6
Tabel 6.2.1	Elemen Penghambat yang Digunakan untuk Analisa Kesesuaian Lahan dan Sistem Skoring	6-13
Tabel 6.2.2	Elemen Potensial Pembangunan dan Sistem Skoring Tahun 2009	6-14
Tabel 6.2.3	Elemen Potensial Pembangunan dan Sistem Skoring Tahun 2030	6-15
Tabel 6.2.4	Hasil Evaluasi Potensi dan Kendala Penggunaan Lahan Secara Keseluruhan di Kawasan GKS	6-17
Tabel 6.3.1	Proyeksi Penduduk di Kawasan GKS Tahun 2030	6-26
Tabel 6.3.2	Kebutuhan Pemanfaatan Lahan Perumahan dan Luas Layanan Perkotaan di GKS pada tahun 2030	6-27

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 6.3.3	Tambahan Pekerjaan dalam Industri Formal (2007-2030) menurut Ukuran Perusahaan	6-28
Tabel 6.3.4	Kebutuhan Tambahan Lahan yang Diperlukan untuk Sektor Industri sampai dengan Tahun 2030	6-29
Tabel 6.4.1	Usulan Kategori Zonasi Pemanfaatan Lahan RTR Kawasan GKS	6-31
Tabel 6.4.2	Struktur Zonasi Penggunaan Lahan GKS sampai Tahun 2030	6-32
Tabel 6.4.3	Konversi Lahan Pertanian Irigasi Tahun 2009-2030	6-33
Tabel 6.4.4	Perubahan Penggunaan Lahan dari Pola yang ada ke Rencana Penggunaan Lahan 2030 di Kawasan GKS	6-36
Tabel 6.5.1	Usulan Proyek Pembangunan Strategis Skala Besar dan Menengah di Dalam RTRW Kabupaten/Kota dan Prioritasnya	6-40
Tabel 6.6.1	Tujuan, Target dan Parameter Kawasan Lingkungan Sensitif	6-57
Tabel 6.6.2	Kriteria Kawasan Lingkungan Sensitif untuk Stabilitas Tanah	6-58
Tabel 6.6.3	Panduan Kegiatan untuk Stabilitas Tanah Zoning Lingkungan Sensitif	6-59
Tabel 6.6.4	Kriteria untuk Kawasan Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Hutan	6-60
Tabel 6.6.5	Panduan Kegiatan untuk Kawasan Lingkungan Sensitif Ekosistem Hutan	6-61
Tabel 6.6.6	Kriteria Kawasan Sensitif Lingkungan untuk Ekosistem Mangrove	6-62
Tabel 6.6.7	Panduan Kegiatan untuk Kawasan Lingkungan Sensitif dari Ekosistem Mangrove	6-62
Tabel 6.7.1	Communities for Community Survey	6-64
Tabel 6.7.2	Responses of Community People on Natural Disaster	6-65
Tabel 7.1.1	Konsep Dasar untuk Program Pembangunan dan Rencana Tindak 2010-2030	7-1
Tabel 7.2.1	Indikasi Program Utama Pengembangan Kawasan GKS 2010 - 2030	7-17
Tabel 9.1.1	Perbedaan antara KLHS dan AMDAL	9-2
Tabel 9.1.2	Ringkasan Masalah 'dan Komentor Pemangku Kepentingan	9-5
Tabel 9.2.1	Kerangka KLHS GKS	9-12
Tabel 9.2.2	Jadwal Rangkaian Lokakarya, Tahun 2010	9-14
Tabel 9.4.1	Dampak Lingkungan yang Signifikan terhadap Kebijakan Penggunaan Lahan	9-28
Tabel 9.4.2	Kemungkinan Tindakan Mitigasi	9-29
Tabel 9.5.1	Perbandingan Penggunaan Lahan Eksisting dengan Penggunaan Lahan Masa Depan	9-32

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 9.6.1	Dampak Potensial Relatif dari Pembangunan Pola Ruang di GKS	9-41
Tabel 10.2.1	Atribut Organisasi untuk Badan Kerjasama Pembangunan GKS (BKSP-GKS)	10-17
Tabel 10.3.1	Lingkup Peningkatan Kapasitas	10-21
Tabel 10.3.2	Contoh Program Kapasitas Bangun untuk Penataan Ruang	10-25
Tabel 10.3.3	Kebijakan Pelatihan Terpadu tentang Manajemen Tata Ruang	10-26
Tabel 10.3.4	Modul Pelatihan Profesional untuk Administrasi Penataan Ruang	10-28
Tabel 10.3.5	Program Penyegaran untuk Kelas Manajerial	10-28
Tabel 10.4.1	Ringkasan Situasi Keuangan di 4 Pemerintah Kota/Kabupaten di GKS (Tahun Anggaran 2009)	10-33
Tabel 10.4.2	Ringkasan Keuangan Situasi di 3 Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	10-34

## - DAFTAR GAMBAR -

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 1.2.1	Struktur Keseluruhan daripada Sistem Perencanaan Tata Ruang	1-2
Gambar 1.5.1	Pertumbuhan Penduduk Tahunan menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2007	1-10
Gambar 1.5.2	Kepadatan Penduduk menurut Desa/Kelurahan pada Tahun 2008	1-11
Gambar 1.5.3	PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007	1-17
Gambar 3.1.1	Visi dan Kunci Strategi untuk Pengembangan Perspektif GKS Jangka Panjang	3-2
Gambar 3.3.1	Posisi Fungsional Kawasan GKS di Provinsi Jawa Timur	3-6
Gambar 4.2.1	Proyeksi Penduduk menurut Skenario Pertumbuhan GKS	4-2
Gambar 4.3.1	Proyeksi Laju Pertumbuhan Perekonomian GKS, Jawa Timur dan Nasional	4-4
Gambar 4.3.2	Proyeksi Pertumbuhan PDRB di GKS	4-6
Gambar 4.3.3	Perubahan PDRB Per Kapita di GKS	4-7
Gambar 5.1.1	Struktur Ruang MEGASUMA	5-2
Gambar 5.1.2	Fungsi Perkotaan di MEGASUMA	5-2
Gambar 5.1.3	Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Timur	5-3
Gambar 5.1.4	Rencana Struktur Ruang Kawasan GKS Plus	5-4
Gambar 5.1.5	Rencana Struktur Ruang Surabaya Metropolitan Area	5-4
Gambar 5.1.6	Sistem Pusat Permukiman Kawasan Lamongan – Tuban	5-5
Gambar 5.1.7	Sistem Pusat Permukiman Kawasan Mojokerto – Jombang	5-5
Gambar 5.1.8	Hubungan antara Kawasan GKS dengan GKS-Plus dan Kawasan lain	5-7
Gambar 5.1.9	Rencana Pengembangan Koridor Strategis di GKS dalam RTRW Jawa Timur	5-8
Gambar 5.1.10	Rencana Strategis Perkotaan dan Pembangunan lainnya menurut RTRW Kabupaten dan Kota	5-9
Gambar 5.1.11	Struktur Ruang Kawasan GKS	5-14
Gambar 5.2.1	Struktur Permukiman Perdesaan di Provinsi Jawa Timur	5-16
Gambar 5.2.2	Konsep Hubungan Daerah Perdesaan, Sub-pusat, dan Daerah Perkotaan	5-18
Gambar 5.3.1	Kenaikan Tahunan Kendaraan yang Terdaftar di GKS	5-21
Gambar 5.3.2	Perkiraan Perubahan Distribusi Pendapatan	5-22
Gambar 5.3.3	Perkiraan Kepemilikan Kendaraan di Masa Depan	5-23
Gambar 5.3.4	Jaringan Jalan GKS di Tahun Dasar untuk Demand Forecast (Ramalan Permintaan)	5-25

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 5.3.5	Jaringan Jalan Kota Surabaya di Tahun Dasar untuk Demand Forecast (Ramalan Permintaan) 5-25
Gambar 5.3.6	Estimasi Kemacetan Lalu-lintas di GKS 5-26
Gambar 5.3.7	Estimasi Kemacetan Lalu-lintas di SMA 5-27
Gambar 5.3.8	Estimasi Kemacetan Lalu-lintas di Jaringan Jalan untuk Tahun 2030 (GKS) 5-27
Gambar 5.3.9	Estimasi Kemacetan Lalu-lintas di Jaringan Jalan untuk Tahun 2030 (SMA) 5-28
Gambar 5.3.10	Koridor Pengembangan Jalan di GKS 5-31
Gambar 5.3.11	Koridor Pengembangan Jalan di Surabaya (Moderate Case) 5-32
Gambar 5.3.12	Koridor Pengembangan Jalan di Surabaya (Expressway-Intensive Case) 5-33
Gambar 5.3.13	Rencana Alternatif Jalan Tol di Surabaya 5-34
Gambar 5.3.14	Fungsi Jalan di Masa Depan di GKS 5-39
Gambar 5.3.15	Fungsi Jalan di Masa Depan di Surabaya 5-40
Gambar 5.3.16	Proyek Pengembangan Jalan di GKS 5-41
Gambar 5.3.17	Proyek Pengembangan Jalan di SMA 5-42
Gambar 5.3.18	Komponen Proyek Jalan di GKS 5-43
Gambar 5.3.19	Komponen Proyek Jalan di SMA 5-44
Gambar 5.3.20	Reservasi ROW untuk SERR (Komplek Perumahan Laguna Indah) 5-45
Gambar 5.3.21	Tahapan Komponen Proyek Jalan (2015: Jangka Pendek) 5-46
Gambar 5.3.22	Tahapan Komponen Proyek Jalan (2015: Jangka Pendek) 5-47
Gambar 5.3.23	Tahapan Proyek Pengembangan Jalan (2020: Jangka Menengah) 5-49
Gambar 5.3.24	Tahapan Komponen Proyek Jalan (2020: Jangka Menengah) 5-50
Gambar 5.3.25	Tahapan Proyek Pengembangan Jalan (2030: Jangka Panjang) 5-52
Gambar 5.3.26	Tahapan Komponen Proyek Jalan (2030: Jangka Panjang) 5-53
Gambar 5.3.27	Proyek Flyover/Underpass di Surabaya 5-62
Gambar 5.3.28	Proyek Flyover/Underpass di GKS 5-62
Gambar 5.3.29	Rencana Sistem ATCS di Surabaya 5-63
Gambar 5.3.30	Contoh dari In-Vehicle Unit 5-64
Gambar 5.3.31	Sistem Informasi Lalu-lintas yang dibantu oleh Probe Cars 5-64
Gambar 5.3.32	Visualisasi Informasi Lalu-lintas Real-Time (Contoh) 5-65
Gambar 5.3.33	Lokasi Saat ini dari Jalur Bus dan Sepeda Motor 5-66
Gambar 5.3.34	Situasi Lalu-lintas yang tidak seimbang di Jalur Bus/Sepeda Motor (Jl. A. Yani) 5-66
Gambar 5.3.35	Metode-metode Utama Pentarifan 5-67
Gambar 5.3.36	Contoh dari Target Jalan untuk ERP di Surabaya 5-68
Gambar 5.3.37	Populasi yang di layani oleh Stasiun KA di Zona GKS (Eksisting:2008) 5-70

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 5.3.38	Populasi yang di layani oleh Stasiun KA di Zona GKS (Masa Depan: 2030)	5-71
Gambar 5.3.39	Pengembangan Angkutan Umum di Surabaya Metropolitan Area	5-75
Gambar 5.3.40	Pengembangan Angkutan Umum di Surabaya	5-76
Gambar 5.3.41	Contoh Rencana Pengembangan Kembali Stasiun Kota Lama	5-78
Gambar 5.3.42	Contoh dari BRT Transjakarta	5-79
Gambar 5.3.43	Jaringan Angkutan Bus yang diusulkan	5-81
Gambar 5.3.44	Contoh: Pengembangan Pintu Gerbang Antar Moda di sekitar Stasiun Waru	5-83
Gambar 5.3.45	Arus Kontainer di Pelabuhan Tg. Perak (1997-2009)	5-85
Gambar 5.3.46	Lokasi Teluk Lamong	5-86
Gambar 5.3.47	Pengembangan Pelabuhan Ekisting dan yang direncanakan di GKS	5-87
Gambar 5.3.48	Demand Lalu-lintas Kontainer di Tg. Perak	5-88
Gambar 5.3.49	Enam Lokasi Kandidat untuk Pelabuhan Pintu Gerbang Daerah yang Baru	5-89
Gambar 5.3.50	Trend Penumpang Udara Tahunan di Bandara Juanda	5-92
Gambar 5.3.51	Rencana induk Bandara Juanda	5-93
Gambar 5.3.52	Tampilan Sederhana dan Lahan untuk Runway Paralel Kedua	5-95
Gambar 5.3.53	Contoh dari Struktur Tiang Pancang dari Bandara Haneda Tokyo	5-96
Gambar 5.3.54	Lokasi Alternatif Bandara Kedua dan Pengembangan Jalan Terkait	5-97
Gambar 5.3.55	Terminal Barang dan Kawasan Industri di GKS	5-98
Gambar 5.3.56	Rute Truk Utama di GKS	5-100
Gambar 5.3.57	Rute Truk Utama di Surabaya	5-100
Gambar 5.3.58	Asal/Tujuan Truck ke/dari Pelabuhan Tg. Perak (GKS)	5-101
Gambar 5.3.59	Asal/Tujuan Truck ke/dari Pelabuhan Tg. Perak (Surabaya)	5-102
Gambar 5.3.60	Rute Truk Masa Depan di GKS	5-103
Gambar 5.3.61	Terminal KA Barang	5-104
Gambar 5.3.62	Pengembangan Akses Kereta Api Pelabuhan	5-105
Gambar 5.3.63	Terminal Barang /Pergudangan di Surabaya	5-106
Gambar 5.4.1	Aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo	5-113
Gambar 5.4.2	Ketersediaan Air Permukaan di Kawasan GKS	5-113
Gambar 5.4.3	Kerangka Kerja Pasokan Air di Kawasan GKS	5-114
Gambar 5.4.4	Konsumsi Air Non-Rumah Tangga Di Tahun 2005	5-117
Gambar 5.4.5	Wilayah Irigasi di Propinsi Jawa Timur	5-118
Gambar 5.4.6	Perubahan Musim Permintaan Air Irigasi, 2003	5-119
Gambar 5.4.7	Perkiraan Permintaan untuk Air Non-Irigasi Berdasarkan Wilayah	5-124
Gambar 5.4.8	Permintaan Air Irigasi Tahun 2030	5-126
Gambar 5.4.9	Keseimbangan Air Bulanan Tahun 2030 per Wilayah	5-127

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 5.4.10	Keseimbangan Permintaan-Pasokan Air di Kawasan GKS Tahun 2030	5-128
Gambar 5.4.11	Proyek Pengalihan Air dari Sungai Solo dan Mata Air Umbulan	5-130
Gambar 5.4.12	Rencana Pengalihan Aliran Air Antar Propinsi	5-131
Gambar 5.4.13	Pengelolaan Air Limbah di Kawasan GKS	5-134
Gambar 5.4.14	Wilayah Drainase di Kabupaten Mojokerto	5-138
Gambar 5.4.15	Wilayah Drainase di Kota Mojokerto	5-139
Gambar 5.4.16	Wilayah Drainase di Kabupaten Gresik	5-140
Gambar 5.4.17	Wilayah Drainase di Kabupaten Lamongan	5-141
Gambar 5.4.18	Wilayah Drainase di Kabupaten Bangkalan	5-142
Gambar 5.4.19	Wilayah Drainase di Kabupaten Sidoarjo	5-143
Gambar 5.4.20	Wilayah Drainase di Kota Surabaya	5-144
Gambar 5.4.21	Konsep Pengelolaan Air Limbah untuk Kawasan Industri	5-147
Gambar 5.4.22	Peta Jaringan Listrik di Jawa Timur	5-164
Gambar 5.4.23	Pertumbuhan Konsumsi Tenaga Listrik Berdasarkan Sektor	5-167
Gambar 5.4.24	Konsumsi Tenaga Listrik per Sambungan di Jawa Timur Berdasarkan Sektor	5-167
Gambar 5.4.25	Permintaan Tenaga Listrik di Kawasan GKS Tahun 2009	5-171
Gambar 5.4.26	Jaringan Transmisi Saat Ini di Kota Surabaya	5-171
Gambar 5.4.27	Perkiraan Pasokan-Permintaan di Jawa Timur dan GKS	5-176
Gambar 5.4.28	Jumlah Pelanggan Telepon Berdasarkan Pelayanannya (2005–2009)	5-171
Gambar 5.5.1	Konsep Unit Lingkungan Permukiman	5-200
Gambar 5.5.2	Struktur Sosial dan Administratif di Indonesia	5-202
Gambar 6.1.1	Peta Penggunaan Lahan yang ada	6-1
Gambar 6.1.2	Komposisi Penggunaan Lahan di GKS	6-2
Gambar 6.1.3	Pembangunan Kawasan di Zona GKS	6-3
Gambar 6.1.4	Rasio Penggunaan Lahan pada Kawasan Terbangun Menurut Desa/Kelurahan dalam Tahun 1993 dan 2006	6-4
Gambar 6.1.5	Proses Urbanisasi dan Rasio Penggunaan Lahan pada Kawasan Terbangun di Daerah Metropolitan Surabaya dalam Tahun 1993 dan 2006	6-5
Gambar 6.1.6	Lahan Pertanian di GKS	6-6
Gambar 6.1.7	Rasio Penggunaan Lahan di GKS, 1993 dan 2006	6-7
Gambar 6.1.8	Rasio Penggunaan Lahan Daerah Pertanian menurut Desa/Kelurahan pada Tahun 1993 dan 2006	6-8
Gambar 6.2.1	Teknik GIS untuk Analisa Penggunaan Lahan Keseluruhan	6-16
Gambar 6.2.2	Pola Distribusi Lahan dengan Pembatasan Pengembangan	6-18



<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 6.2.3	Pola Distribusi Lahan dengan Potensi Pengembangan (2009 dan 2030)	6-19
Gambar 6.2.4	Evaluasi Keseluruhan Potensi Pengembangan Lahan (2009 dan 2030)	6-20
Gambar 6.3.1	Faktor Lingkungan yang Dipertimbangkan untuk Pelestarian dan Konservasi	6-22
Gambar 6.3.2	Mekanisme Kebijakan Lingkungan	6-25
Gambar 6.3.3	Proyeksi Kebutuhan Penggunaan Lahan untuk Perumahan dan Pelayanan Perkotaan di GKS tahun 2030	6-27
Gambar 6.3.4	Kebutuhan Pemanfaatan Lahan Tambahan untuk Sektor Industri hingga Tahun 2030 di Kawasan GKS	6-29
Gambar 6.4.1	Rencana Penggunaan Lahan di GKS Tahun 2030	6-35
Gambar 6.5.1	Prosedur Memprioritaskan Usulan Kawasan/Proyek Strategis oleh Kabupaten/Kota	6-38
Gambar 6.5.2	Usulan Proyek Pembangunan Strategis Skala Besar dan Menengah di dalam RTRW Kabupaten/Kota	6-41
Gambar 6.5.3	Usulan Kawasan Pembangunan Strategis hingga 2030 di GKS	6-42
Gambar 6.5.4	Proses Logis untuk Merumuskan RTR Kawasan GKS	6-43
Gambar 6.5.5	Usulan RTR Kawasan GKS Tahun 2030	6-44
Gambar 6.6.1	Masalah Lingkungan di Kawasan GKS	6-47
Gambar 6.6.2	Struktur Masalah Lingkungan di Kawasan GKS	6-48
Gambar 6.6.3	Proses Terpadu Pelestarian Lingkungan	6-50
Gambar 6.6.4	Isu Lingkungan Hidup untuk Pertimbangan dalam Perencanaan	6-51
Gambar 6.6.5	Kebijakan Spasial untuk Pertimbangan Lingkungan di Kawasan GKS	6-51
Gambar 6.6.6	Gabungan peta Zoning Lingkungan Sensitif dengan Rencana Penggunaan Lahan	6-53
Gambar 6.6.7	Proses Zoning Lingkungan Sensitif	6-54
Gambar 6.6.8	Lingkungan dan Ekosistem Kunci di Kawasan GKS	6-56
Gambar 6.6.9	Zoning Lingkungan Sensitif untuk Stabilitas Tanah	6-58
Gambar 6.6.10	Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Hutan	6-60
Gambar 6.6.11	Konsep dalam Menggambarkan Batasan Kawasan Pemulihan	6-61
Gambar 6.6.12	Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (1)	6-62
Gambar 6.6.13	Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (2)	6-63
Gambar 6.6.14	Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (3)	6-63
Gambar 6.6.15	Zoning Lingkungan Sensitif untuk Ekosistem Mangrove (4)	6-64
Gambar 6.6.16	Integrasi Kawasan Lingkungan Sensitif ke Rencana Pemanfaatan Lahan GKS	6-65
Gambar 6.7.1	Location of Communities Surveyed	6-65

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 6.7.2	Flood-Prone Area in GKS	6-67
Gambar 6.7.3	Distribution of Earthquake Intensity by MMI	6-71
Gambar 6.7.4	Volcano Eruption Dangerous Zone in East Java Province	6-72
Gambar 9.2.1	Proses KLHS GKS	9-10
Gambar 9.4.1	Persebaran Kota tak Terkendali vs Kota Kompak Terkendali	9-19
Gambar 9.4.2	Konsep Transit-Oriented Development (TOD)	9-21
Gambar 9.4.3	Lokasi Koridor Potensi Industri di GKS	9-22
Gambar 9.5.1	Penggunaan Lahan GKS Masa Depan	9-31
Gambar 9.6.1	Jenis Dampak menurut Pola Pembangunan Berdimensi	9-36
Gambar 9.6.2	Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Transportasi Jalan	9-37
Gambar 9.6.3	Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Transportasi Pelabuhan	9-38
Gambar 9.6.4	Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Transportasi Bandara	9-38
Gambar 9.6.5	Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Industri	9-39
Gambar 9.6.6	Aliran Dampak Lingkungan menurut Pembangunan Permukiman	9-40
Gambar 9.6.7	Aliran Dampak Lingkungan menurut Pengembangan Sumber Daya Alam (Waduk Air)	9-41
Gambar 10.2.1	Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	10-8
Gambar 10.2.2	Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan GKS di dalam Kerjasama Antar-Pemerintah	10-9
Gambar 10.2.3	Struktur Organisasi Badan Kerjasama Pembangunan GKS (usulan)	10-10
Gambar 10.2.4	Sistem Manajemen yang diusulkan untuk BKSP-GKS	10-13

## - SINGKATAN DAN AKRONIM -

<b>3Rs</b>	Reduce, Reuse, and Recycle
<b>AGT</b>	Automated Guideway Transit
<b>AKDP</b>	Antar Kota Antar Propinsi, or Inter-Provincial Intercity
<b>AM</b>	Automated Mapping
<b>APBD I</b>	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, or Revenue and Expenditure of Province
<b>APBD II</b>	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Revenue and Expenditure of Kabupaten/Kota
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan Belanja Negara, National Revenue and Expenditure
<b>ARSDS-GKS</b>	Study for Arterial Road System Development in Surabaya Metropolitan Area
<b>ATCS</b>	Area Traffic Control System
<b>BAKOSURTANAL</b>	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, or National Coordinating Agency for Survey and Mapping
<b>BAPPEDA</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, or Local Planning and Development Board
<b>BAPPEKO</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Kota, or Planning and Development Board of Municipality (Kota)
<b>BAPPEPRO</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi, or Planning and Development Board of Province
<b>BAT</b>	Best Available Technology
<b>BII</b>	Indonesia International Bank
<b>BKPRD</b>	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, or Coordination Board of Local Spatial Plan
<b>BKTRN</b>	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, or Coordination Board of National Spatial Plan
<b>BNI</b>	Bank Nasional Indonesia or Indonesia National Bank
<b>BPLS</b>	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, or Agency for the Mitigation of Sidoarjo Mud
<b>BRI</b>	Bank Rakyat Indonesia
<b>BRT</b>	Bus Rapid Transit
<b>BTN</b>	Bank Tabungan Negara, or National Saving Bank
<b>BWK</b>	Bagian Wilayah Kota, or Urban Area Section
<b>Bank JATIM</b>	East Java Bank
<b>C-KIP</b>	Comprehensive Kampong Improvement Program
<b>CBD</b>	Central Business District

<b>CCTV</b>	Closed Circuit Television
<b>CDM</b>	Clean Development Mechanism
<b>CHP</b>	Combined Heat and Power Production
<b>CIS</b>	Customer Information System
<b>CPR</b>	Medium Term Development Program and Policies (Five years)
<b>DAOP</b>	Daerah Operasi, or Operation Area
<b>DAS</b>	Automotic Distribution System
<b>DCC</b>	Distribution Control Center
<b>DD</b>	Detail Design
<b>DKL program</b>	Energy Demand and Load Forecast Program
<b>DLLAJ</b>	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, or Traffic and Road Transport Agency
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, or Local People Representative Council
<b>DSM</b>	Demand Side Management
<b>EIA</b>	Environmental Impact Assessment
<b>EJIIZ</b>	East Java Integrated Industrial Zone
<b>EMS</b>	Energy Management System
<b>EMU</b>	Electric Multiple Unit
<b>EPR</b>	Extended Producer Responsibility
<b>ERR</b>	East Ring Road
<b>FM</b>	Facility Management
<b>FS</b>	Feasibility Study
<b>GDP</b>	Gross Domestic Product
<b>GERBANGKERTOSUSILA</b>	Gresik-Bangkalan–Mojokerto(Kota/Kabupaten)–Surabaya–Sidoarjo-Lamongan
<b>GIS</b>	Geographic Information System
<b>GKS</b>	GERBANGKERTOSUSILA-Gresik-Bangkalan-Mojokerto (Kota/Kabupaten)-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan
<b>GKS Plus</b>	GKS + Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, Jombang, Tuban, and Kota Pasuruan
<b>GOI</b>	Government of Indonesia
<b>GOJ</b>	Government of Japan
<b>GPRS</b>	General Packet Radio Service
<b>GPS</b>	Global Positioning System
<b>GRDP</b>	Gross Regional Domestic Product
<b>GWh</b>	Gigawatt-hour
<b>HIPPAM</b>	Community-initiative water supply and sanitation program in rural

	area
<b>IBRD</b>	International Bank for Reconstruction and Development
<b>IE</b>	Industrial Estate
<b>IFC</b>	International Finance Corporation
<b>IGES</b>	Institute for Global Environment Strategies
<b>IKK</b>	Ibu Kota Kecamatan, District Capital
<b>IPAL</b>	Sewage Treatment Plant
<b>IPLT</b>	Septic Sludge Treatment Plant
<b>IPP</b>	Independent Power Producer
<b>ISLF</b>	Integrated Solid Waste Landfill
<b>ISWM</b>	Integrated Solid Waste Management
<b>ITS</b>	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, or Sepuluh Nopember Institute of Technology
<b>ITS</b>	Intelligent Transport System
<b>ITU</b>	International Telecommunication Union
<b>JABODETABEK</b>	Jakarta Metropolitan Area : Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi
<b>Jamali</b>	Jawa-Bali Madura
<b>JBIC</b>	Japan Bank for International Cooperation
<b>JICA</b>	Japan International Cooperation Agency
<b>KAPET</b>	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, or Integrated Economic Development Area
<b>KIP</b>	Kampung Improvement Program
<b>KKJS</b>	Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, or (Industrial&Mixuse) Development Zone at the Foot of Surabmadu Bridge
<b>KKN</b>	Korupsi, Kolusi, Nepotisme, or Corruption, Collusion, and Nepotism
<b>kms</b>	kilo meter span
<b>KP Ruko</b>	Kredit Pemilikan Rumah Toko, or Credit for Store and House Ownership
<b>KPR</b>	Kredit Pemilikan Rumah, or Loan for House Ownership
<b>KPR BCA Xtra</b>	Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Central Asia Ekstra, or Extra Home Ownership Loan through Bank Central Asia
<b>KPR Multiguna</b>	Multifunction Home Ownership Loan
<b>KPR Syariah</b>	Kredit Pemilikan Rumah Syariah, or Credit for House Ownership through Muslim Role
<b>Kredit Swa Griya</b>	Loan for Self-built House
<b>Kredit Swadana</b>	Loan for Self-fund
<b>kWh</b>	Kilowatt-hour

<b>L/sec</b>	Liter per second
<b>LARAP</b>	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
<b>LDF</b>	Load Density Factor
<b>LF</b>	Load Factor
<b>LIS / LISB</b>	Lamongan Integrated Shorebase
<b>LLF</b>	Loss Load Factor
<b>LRT</b>	Light Rail Transit
<b>LV</b>	Low Voltage
<b>Lcpd</b>	Liter per capita day
<b>MENDAGRI</b>	Menteri Dalam Negeri, or Ministry of Home Affair
<b>MERR</b>	Middle East Ring Road
<b>MV</b>	Medium Voltage
<b>MVA</b>	Mega-volt-ampere
<b>MW</b>	Megawatt
<b>MWRR</b>	Middle West Ring Road
<b>NIP</b>	Ngoro Industrial Persada
<b>NIP</b>	Ngoro Industrial Persada, Mojokerto
<b>NRW</b>	Non-Revenue Water
<b>NUSSP</b>	Neighborhood Upgrading Shelter Sector Program
<b>OD</b>	Origin and Destination
<b>OPLT</b>	Time at Peak Load
<b>P2KP</b>	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, or Urban Poverty Alleviation Program
<b>P2MPD</b>	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah, or Community and Local Government Empowerment Program
<b>PAD</b>	Local Government Revenue
<b>PBB</b>	Pajak Bumi Bangunan, or Building and Land Tax
<b>PCU</b>	Passenger Car Unit
<b>PDAB</b>	Perusahaan Daerah Air Bersih, Provincial Clean Water Public Corporation
<b>PDAM</b>	Perusahaan Daerah Air Minum, or Local Water Enterprise
<b>PDAM</b>	Perusahaan Daerah Air Minum, Regional Water Supply Public Corporation
<b>PDM-DKE</b>	Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, or Local Empowerment to Countermeasure Economic Crisis Impact
<b>PERDA</b>	Peraturan Daerah, or Local (Municipal/Regency/Province) Decree
<b>PJT1</b>	Perum Jasa Tirta 1, River Management Public Corporation no.1
<b>PKK</b>	Family Prosperity Empowerment

<b>PKL</b>	Pusat Kegiatan Local, or Local Activity Centre
<b>PKN</b>	Pusat Kegiatan Nasional, or National Activity Centre
<b>PKW</b>	Pusat Kegiatan Wilayah, or Regional Activity Centre
<b>PLN</b>	Perusahaan Listrik Negara, or National Electric Company
<b>PLTGU</b>	Combined Cycle Power Plant
<b>PLTU</b>	Steam Power Plant
<b>PNPM Mandiri</b>	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, or National Program for Independent Community Empowerment
<b>PPP</b>	Public-Private Partnership
<b>PTKA</b>	PT Kereta Api, or Railway Company
<b>PU</b>	Public Works
<b>PUCKTR</b>	Public Works, Human Settlement & Spatial Planning Department, East Java Province
<b>RAPERDA</b>	Rancangan Peraturan Daerah, or Draft of Local Decree
<b>ROW</b>	Right-Of-Way
<b>RP4D</b>	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah, or Housing and Settlement Development and Improvement Plan
<b>RPJM</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah, or Mid-term Development Plan
<b>RPJP</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, or Long-term Development Plan
<b>RT</b>	Rukun Tetangga or Smallest neighborhood unit under RW
<b>RTRW</b>	Rencana Tata Ruang Wilayah, or Spatial Plan
<b>RUPTL</b>	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, or Electrical Power Supply Business Plan
<b>RW</b>	Rukun Warga, or Neighborhood unit under Desa/ Kelurahan
<b>Rusunami</b>	Rumah Susun Sederhana Milik, or Owned Simple Walk-up Flat
<b>Rusunawa</b>	Rumah Susun Sederhana Sewa, or Rental Simple Walk-up Flat
<b>SAIDI</b>	System Average Interruption Duration Index
<b>SAIFI</b>	System Average Interruption Frequency Index
<b>SCADA</b>	Supervisory Control and Data Acquisition
<b>SD</b>	Sekolah Dasar, or Primary School
<b>SDA2006</b>	Strategic Initiatives Water Resources Management to Overcome Flood And Drought Island In Java issued by Directorate of River & Irrigation, State Ministry Of National Development Planning & National Development Planning Agency in December 2006
<b>SIER</b>	Surabaya Industrial Estate Rungkut, Surabaya
<b>SKPD</b>	Satuan Kerja Perangkat Daerah, or Guidelines for Local Government Offices/Institutions

<b>SMA</b>	Sekolah Menengah Atas, or Senior High School
<b>SMA</b>	Surabaya Metropolitan Area
<b>SME</b>	Small and Medium Sized Enterprise
<b>SMP</b>	Sekolah Menengah Pertama, or Junior High School
<b>SNCF</b>	Société Nationale des Chemins de fer Français
<b>SRRTS</b>	Surabaya Regional Rail Transport System
<b>SSO</b>	Automatic Vacuum Gas Pole Switch Sectionalizer
<b>SSWP</b>	Sub Satuan Wilayah Pembangunan, or Area Development Sub Unit
<b>SUDP</b>	Surabaya Urban Development Project
<b>SULAM</b>	Surabaya – Lamongan Commuter
<b>SUMO</b>	Surabaya – Mojokerto Commuter
<b>SUPAS</b>	Survei Penduduk Antar Sensus, or Population Survey between Censuses
<b>SUSI</b>	Surabaya – Sidoarjo Commuter
<b>SUTT network</b>	70-150 KV network
<b>SWM</b>	Solid Waste Management
<b>SWP</b>	Satuan Wilayah Pembangunan, or Area Development Unit
<b>TAZ</b>	Traffic Analysis Zone
<b>TID</b>	Telemetry
<b>TK</b>	Taman Kanak-kanak or Kindergarten School
<b>TOD</b>	Transit Oriented Development
<b>TPA</b>	Tempat Pembuangan Akhir, or Final Disposal Site
<b>TRAFO</b>	Transformer
<b>TS</b>	Transfer Station
<b>UGR</b>	Unit Waste Generation
<b>UNEP</b>	United Nations Environment Programme
<b>UP</b>	Unit Pengembangan, or Development Unit
<b>USO</b>	Universal Service Obligation
<b>V/C</b>	Volume-Capacity
<b>VMS</b>	Variable Message Signboard
<b>WPUT</b>	Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi, or Telecommunications Universal Service Area
<b>WRR</b>	West Ring Road
<b>WTE</b>	Waste to Energy



# 1. PENGANTAR

## 1.1 Latar Belakang

GERBANGKERTOSUSILA (yang selanjutnya disebut dengan “GKS”) di Provinsi Jawa Timur adalah kawasan ekonomi terbesar kedua di Indonesia. GKS terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, and Kota Surabaya. Master Plan pengembangan Kawasan GKS sebelum ini pada Tahun 1983 dirumuskan dengan bantuan pendampingan dari JICA.

Di Indonesia, Undang-undang Penataan Ruang yang diperbarui/dirubah pada Bulan April 2007 menetapkan bahwa pada tingkatan pemerintahan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota harus menyiapkan Rencana Penataan Ruang. Rencana Penataan Ruang Nasional dirumuskan pada bulan Maret 2008, yang selanjutnya pedoman ini diacu oleh pemerintah provinsi untuk menyusun Rencana Penataan Ruang mereka. Selanjutnya masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menyelesaikan penyiapan Rencana Penataan Ruangnya pada Bulan April 2010 berdasarkan pada Rencana Penataan Ruang Provinsi. Sebuah Rencana Penataan Ruang untuk suatu kawasan metropolitan seperti halnya GKS , bila diperlukan, dapat dirumuskan sebab Kawasan GKS adalah satu dari kawasan-kawasan strategis nasional, dan rencana kerjanya seharusnya dilanjutkan melalui inisiatif daripada Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.

## 1.2 Tujuan Studi

Tujuan daripada Studi, sebagaimana telah disebutkan dalam Lingkup Kerja yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, adalah sebagai berikut:

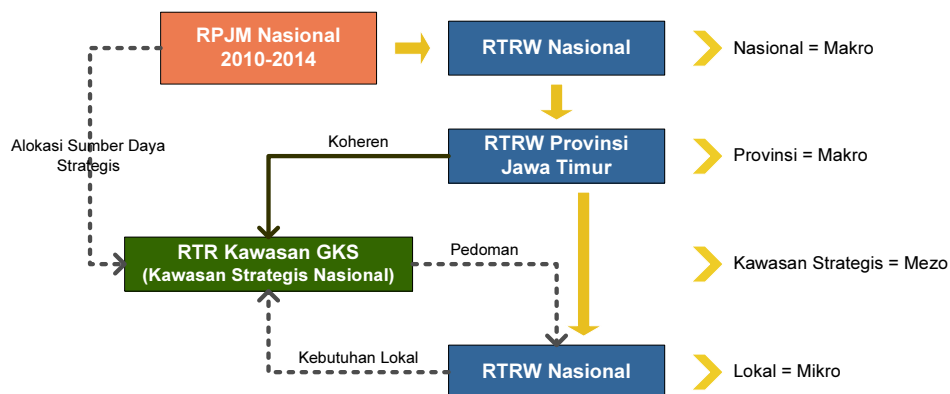
- Untuk merumuskan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS sampai dengan Tahun 2030;
- Untuk menyiapkan rencana implementasi transportasi perkotaan dalam wilayah studi; dan
- Untuk menguatkan kapasitas personel dan institusi mitra kerja dalam pelaksanaan Studi

Studi ini telah merumuskan visi jangka panjang (dalam 2 dekade mendatang) agar GKS sebagai kawasan strategis nasional dapat mengejar perkembangan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, dan melakukan identifikasi proyek-proyek jangka pendek dan program yang akan diprioritaskan dalam kurun waktu lima tahun yang sejalan dengan strategi untuk mencapai visi.

Rencana tata ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, harus membahas penggunaan lahan yang seimbang, atau pola spasial, dengan pertimbangan yang memadai untuk pelestarian lingkungan dan konservasi. Rencana tata ruang juga harus menggambarkan sistem infrastruktur jaringan yang paling ekonomis efisien dan rasional secara fungsional untuk mendukung kegiatan sosial dan

ekonomi masyarakat, termasuk sistem transportasi, sistem air bersih, sistem drainase dan saluran air, listrik dan jaringan telekomunikasi, pengelolaan limbah padat, dan sebagainya yang kesemuanya terpadu.

Pedoman tentang bagaimana menerapkan rencana tata ruang dan bagaimana untuk mengelola pertumbuhan yang direncanakan adalah fokus isu lain yang harus ditangani secara hati-hati. Untuk tujuan ini, pemerintah provinsi harus diberdayakan dalam hal kapasitas anggaran dan yang dapat dilaksanakan, dan praktek yang baik sangat diperlukan untuk membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.



Sumber: JICA StudyTeam

**Gambar 1.2.1 Struktur Keseluruhan daripada Sistem Perencanaan Tata Ruang**

Keluaran dari studi ini disusun di dalam satu set volume laporan yang terpisah sebagai berikut:

- Volume 1: Ringkasan (Inggris, Indonesia dan Jepang)
- Volume 2: Main Text (Inggris dan Indonesia)
- Volume 3: Peta GIS: Kunci Peta dan Gambar untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS (Bahasa Inggris)
- Volume 4: Rencana Aksi Pembangunan untuk Sektor Transportasi (Bahasa Inggris)

*Catatan: Laporan dalam bahasa Inggris adalah resmi dan dapat dijadikan acuan, ketika ditemui ekspresi bahasa Indonesia dan kata-kata yang tidak jelas dan tidak benar.*

### 1.3 Tujuan Penataan Ruang Kawasan GKS

Tujuan dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan GKS dengan target Tahun 2030, sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan Provinsi Jawa Timur adalah:

- Untuk menyediakan arahan untuk mencapai visi jangka panjang;
- Untuk memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi sebagai kawasan pertumbuhan terkemuka;
- Untuk mewujudkan system penggunaan lahan yang seimbang dengan mempertimbangkan konservasi lingkungan;

- Untuk merencanakan jaringan infrastruktur fungsional rasional antara lain: 1) sistem transportasi, 2) sistem penyediaan air, 3) sistem drainase dan pembuangan air kotor, 4) energy listrik dan jaringan telekomunikasi, 5) pengelolaan persampahan; dan infrastruktur lainnya; dan
- Untuk mengidentifikasi proyek-proyek dan program jangka pendek dalam kerangka lima tahun (2015).

Menurut pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proses persetujuan perubahan RTRW Provinsi Jawa Timur seharusnya disetujui pada bulan April 2009, dan RTRW Kabupaten dan Kota di GKS disetujui pada bulan April 2010. Status persetujuan Rencana Tata Ruang adalah sebagai ditunjukkan di bawah ini.

**Tabel 1.3.1 Status Persetujuan RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di GKS saat ini**

RTRW	Periode Perencanaan	Status Persetujuan
Jawa Timur	2009 - 2029	Tahap Evaluasi di Pusat
Kota Surabaya	2010 - 2030	Konsultasi di Pemerintah Provinsi dan Pusat
Kota Mojokerto	2007 - 2027	Evaluasi di Pemerintah Provinsi dan Pusat
Kab. Gresik	2007 - 2027	Evaluasi di Pemerintah Pusat
Kab. Bangkalan	2008 - 2028	Disetujui (Perda No. 10/2009)
Kab. Sidoarjo	2009 - 2029	Disetujui (Perda No. 6/2009)
Kab. Mojokerto	2007 - 2027	Evaluasi di Pemerintah Provinsi dan Pusat

## 1.4 Dasar Hukum Terkait

Perencanaan Tata Ruang harus didasarkan pada dan sesuai dengan sejumlah undang-undang dan peraturan yang berlaku dan relevan dengan perencanaan tata ruang dalam hal pembangunan infrastruktur, konservasi lahan pertanian, dan perlindungan sumber daya lingkungan. Ini termasuk dasar hukum untuk manajemen proyek dan pengaturan kelembagaan untuk koordinasi antar-pemerintah dan kerja sama.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 8) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
- 10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 12) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
- 13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 15) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 17) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - 18) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  - 20) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 21) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - 22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 23) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  - 24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  - 25) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - 26) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 27) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  - 28) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  - 29) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4966);
- 30) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  - 31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 32) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
  - 33) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 34) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  - 35) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  - 36) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  - 37) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  - 38) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  - 39) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  - 40) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
  - 41) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  - 42) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4532);
- 43) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  - 44) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  - 45) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  - 46) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  - 47) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - 48) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  - 49) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  - 50) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  - 51) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  - 52) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  - 53) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
  - 54) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
  - 55) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - 56) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  - 57) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 58) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- 59) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 60) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- 61) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 62) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
- 63) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
- 64) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 65) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- 66) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib di Lengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 67) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- 68) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
- 69) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
- 70) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 71) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
- 72) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- 73) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 74) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 75) Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;



- 76) Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;
- 77) Keputusan Menteri Perindustrian No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
- 78) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);
- 79) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soeryo (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4, Seri C);
- 80) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);
- 81) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2, Seri E);
- 82) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E).

## **1.5 Profil Sosial-Ekonomi Kawasan GKS**

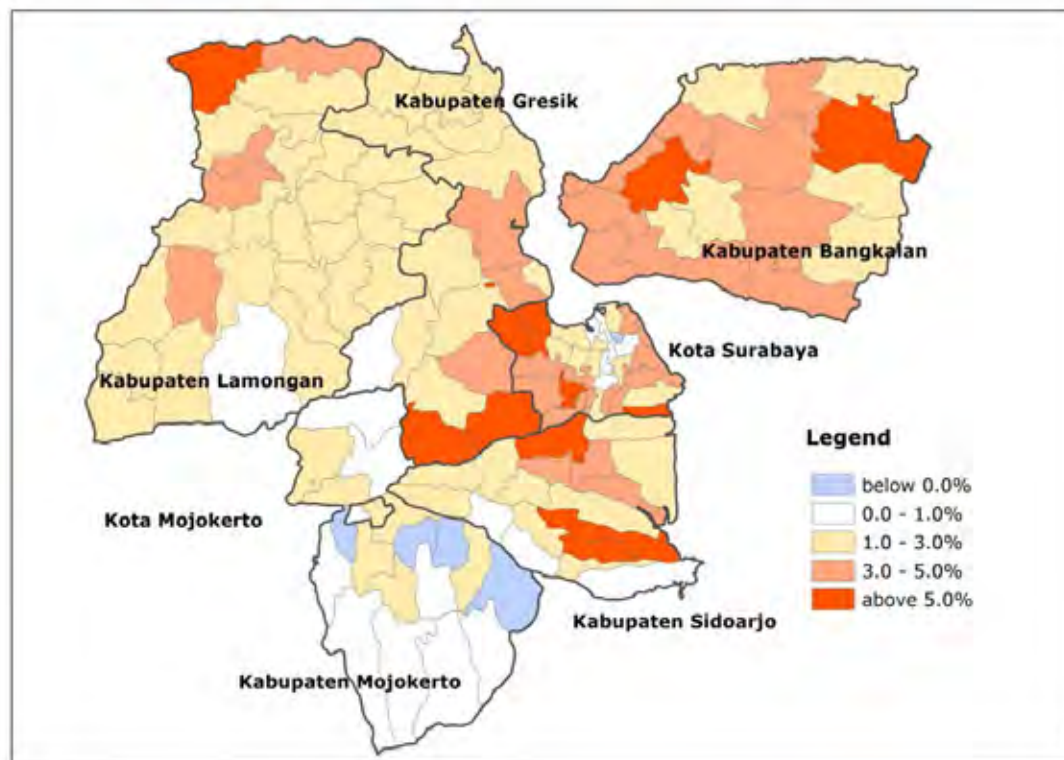
### **1.5.1 Populasi**

Pada tahun 1980 sampai dengan 1990, laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan di GKS khususnya Kota Sidoarjo dan Surabaya tercatat mempunyai rasio yang tinggi, lebih dari 3,00%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi antara tahun 2000 hingga 2008 tercatat di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo pada tingkat pertumbuhan lebih dari 2% per tahun. Sementara itu pertumbuhan penduduk Kota Surabaya tampaknya telah mencapai puncaknya. Penduduk dan pertumbuhan penduduk menurut kabupaten periode tahun 1980 - 2008 ditunjukkan pada Tabel 1.5.1. Laju pertumbuhan penduduk tahunan GKS menurut kecamatan antara tahun 2000 - 2007 diilustrasikan pada Gambar 1.5.1.

**Tabel 1.5.1 Populasi dan pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota, 1980 – 2007**

Kabupaten/Kota	Populasi				Rerata Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%)		
	1980	1990	2000	2008	1980-90	1990-00	2000-08
GKS	6,123,895	7,278,701	8,155,673	9,345,665	1.74%	1.14%	1.37%
Kab. Sidoarjo	854,180	1,167,467	1,563,015	1,920,312	3.17%	2.96%	2.08%
Kab. Mojokerto	705,596	786,943	908,004	1,074,879	1.10%	1.44%	1.70%
Kab. Lamongan	1,049,956	1,143,431	1,181,660	1,302,605	0.86%	0.33%	0.98%
Kab. Gresik	729,039	856,853	996,608	1,169,347	1.63%	1.52%	1.61%
Kab. Bangkalan	688,362	750,780	797,426	990,711	0.87%	0.60%	2.19%
Kota Mojokerto	68,849	99,955	109,164	123,566	3.80%	0.89%	1.25%
Kota Surabaya	2,027,913	2,473,272	2,599,796	2,764,245	2.01%	0.50%	0.62%

Sumber: Data Sensus Penduduk, Buku Statistik Indonesia Tahun 2008, dan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2008, BPS, dan PODES Tahun 2008

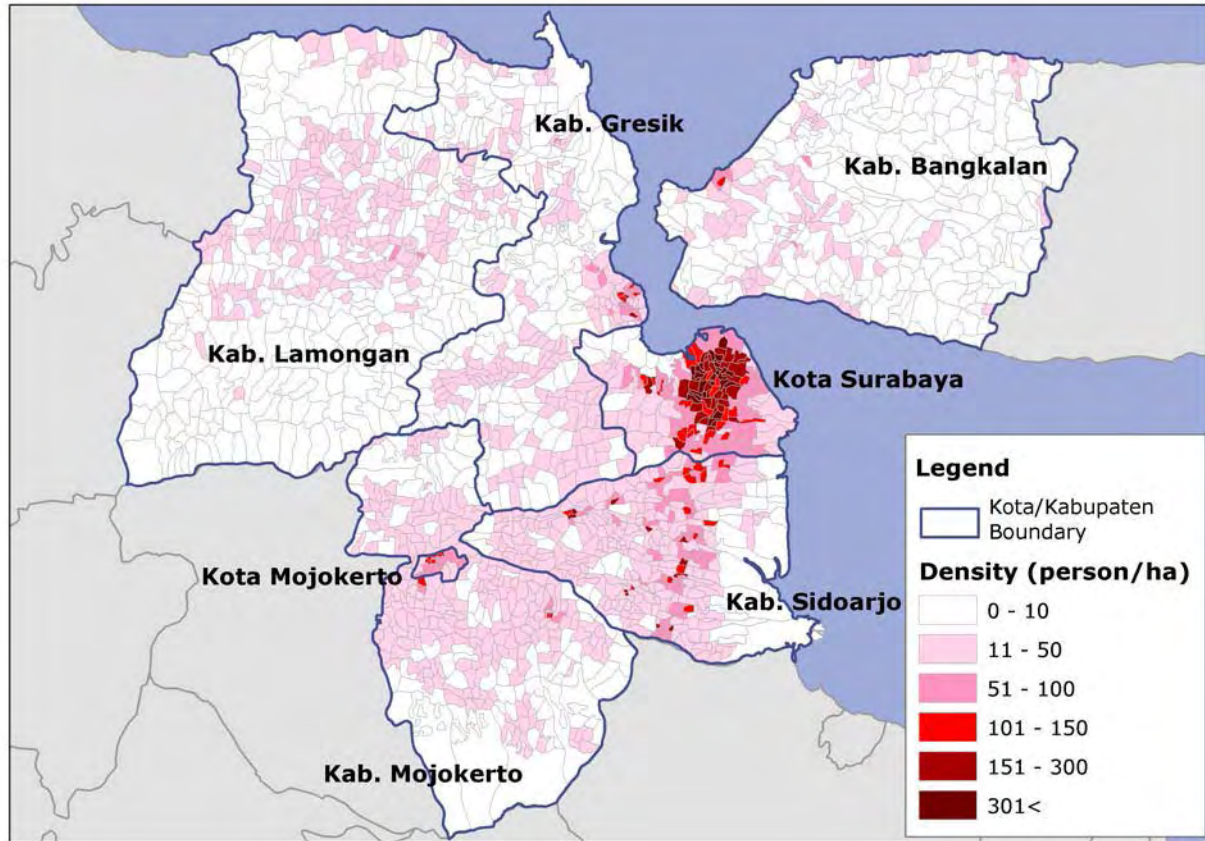


Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2000 dan 2008

**Gambar 1.5.1 Pertumbuhan Penduduk Tahunan menurut Kecamatan Tahun 2000 - 2007**

Gambar 1.5.2 menunjukkan kepadatan penduduk menurut desa/kelurahan pada Kawasan GKS pada tahun 2008. Desa/kelurahan yang mempunyai kepadatan tinggi cenderung terletak di pusat kota. Secara khusus, kelurahan-kelurahan di Kota Surabaya telah menunjukkan kepadatan yang sangat tinggi lebih dari 1.000 orang/ha. Di sisi lain, terdapat kepadatan cukup rendah di wilayah desa yang kekurangan sumber daya air seperti bagian utara Kabupaten Mojokerto dan bagian timur Kabupaten Bangkalan, dan daerah pegunungan

seperti di bagian selatan Kabupaten Lamongan.



Sumber: Podes 2008

**Gambar 1.5.2** Kepadatan Penduduk menurut Desa/Kelurahan pada Tahun 2008

Seperti terlihat pada Tabel 1.5.2, kepadatan penduduk wilayah perkotaan menurut desa/kelurahan adalah sekitar 130 orang/ha untuk rasio wilayah perkotaan yang melebihi 60%. Rasio wilayah perkotaan adalah rasio dari total luas areal perumahan, komersial, industri dan fasilitas umum terhadap luas total desa/kelurahan. Ketika rasio wilayah perkotaan kurang dari 60%, dijumpai kepadatan penduduknya sekitar 60 orang / ha.

**Tabel 1.5.2** Kepadatan Penduduk Daerah Perkotaan menurut Rasio Wilayah Perkotaan

Rasio Wilayah Perkotaan	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Populasi	3,223,421	643,391	457,382	791,575	921,054	1,499,911	1,519,931
Luas Areal (ha)	24,545	8,474	8,048	13,341	15,232	22,915	15,045
Kepadatan (orang/ha)	131	76	57	59	60	65	101

Sumber: Podes 2008 dan data base GIS oleh JICA Study Team

Kepadatan penduduk daerah perkotaan menurut desa/kelurahan dan Kota/Kabupaten ditunjukkan pada Tabel 1.5.3. Kepadatan penduduk rata-rata di desa adalah sekitar 68 orang/ha sedangkan di kelurahan adalah sekitar 136 orang/ha.

**Tabel 1.5.3 Kepadatan Penduduk Daerah Perkotaan menurut Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota**

	Desa	Kelurahan	Total
BANGKALAN	42.8	97.5	44.8
GRESIK	81.0	111.6	83.2
LAMONGAN	96.1	114.5	97.1
MOJOKERTO (Kota/Kab)	61.6	103.7	64.3
SIDOARJO	74.1	117.2	77.9
SURABAYA	-	142.9	142.9
GKS Total	68.3	135.9	84.2

Sumber: Podes 2008 dan data base GIS oleh JICA Study Team

## 1.5.2 Status Tenaga Kerja

### 1) Populasi Pekerja di Sektor Formal

Jumlah penduduk yang bekerja di Kawasan GKS di sektor formal adalah sekitar 4,1 juta pada tahun 2007. Angka ini meningkat dari 3,6 juta pada tahun 2000 dengan kenaikan tahunan rata-rata 1,7%, sedikit lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk yang sebesar 1,64% untuk periode yang sama. Andil persentase penduduk yang bekerja di sektor formal terhadap total penduduk masing-masing rata-rata 44,5% pada tahun 2000 dan 44,8% pada tahun 2007.

**Tabel 1.5.4 Populasi Pekerja di Sektor Formal di GKS**

Kabupaten/ Kota	2000		2007		Rerata Pertumbuhan Penduduk 2000-2007
	Populasi Pekerja	% terhadap Total Populasi	Populasi Pekerja	% terhadap Total Populasi	
GKS	3,626,926	44.5%	4,095,000	44.8%	1.7%
Sidoarjo	703,674	45.0%	795,443	42.6%	1.8%
Mojokerto	418,717	46.1%	505,891	48.6%	2.7%
Lamongan	572,952	48.5%	608,876	47.5%	0.9%
Gresik	431,171	43.3%	533,554	46.7%	3.1%
Bangkalan	383,707	48.1%	401,777	41.6%	0.7%
Kota Mojokerto	45,711	41.9%	51,219	43.0%	1.6%
Kota Surabaya	1,070,994	41.2%	1,198,240	44.1%	1.6%

Sumber: Situasi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Agustus 2007, BPS dan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2000 Provinsi Jawa Timur, BPS

### 2) Struktur Tenaga Kerja

#### (1) Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal

Sebuah rona yang signifikan dari struktur ketenagakerjaan di Kawasan GKS menunjukkan kontribusi lapangan kerja sektor informal yang besar. Di Kawasan GKS pada tahun 2007, terdapat 4,1 juta orang yang dipekerjakan secara formal dan hampir 2 juta yang berada di lapangan kerja informal dari total populasi 6,5 juta pekerja. Rata-rata lapangan kerja sektor informal di Kawasan GKS terhitung sekitar 30% dari total angkatan kerja, dan 33% dari total

pekerja di sektor formal dan informal.

Seperti terlihat pada Tabel 1.5.5, sektor informal lebih umum berada di pedesaan daripada di perkotaan. Akibatnya, pola kerja informal yang besar ditemukan lebih signifikan di kabupaten dengan daerah pedesaan yang cukup besar, seperti di Lamongan dan Bangkalan dengan lebih dari 40% adalah sektor informal, dibandingkan dengan Surabaya yang mempunyai angka urbanisasi tinggi dengan hanya sekitar 20% lapangan kerja informal. Tenaga kerja sektor formal menyumbang sekitar 74% dari total pekerja di daerah perkotaan sementara di daerah pedesaan hanya 42%. Distribusi tenaga kerja ini jelas menunjukkan besarnya lapangan kerja sektor informal di daerah pedesaan.

**Tabel 1.5.5 Populasi Tenaga Kerja menurut Status dan Wilayah Lapangan Kerja**

Kabupaten/ Kota	Wilayah	Bekerja di Sektor		Pengangguran	Total
		Formal	Informal		
GKS	Urban	2,571,928	881,985	325,964	3,779,877
	Rural	1,523,072	1,096,610	112,464	2,732,146
	Total	4,095,000	1,978,595	438,428	6,512,023
Sidoarjo	Urban	684,470	230,887	103,526	1,018,883
	Rural	110,973	46,728	11,882	169,583
	Total	795,443	277,615	115,408	1,188,466
Mojokerto	Urban	197,180	102,735	16,689	316,604
	Rural	308,711	185,292	19,524	513,527
	Total	505,891	288,027	36,213	830,131
Lamongan	Urban	91,078	42,018	6,795	139,891
	Rural	517,798	403,800	34,207	955,805
	Total	608,876	445,818	41,002	1,095,696
Gresik	Urban	274,891	100,190	24,209	399,290
	Rural	258,663	160,595	23,100	442,358
	Total	533,554	260,785	47,309	841,648
Bangkalan	Urban	74,850	43,405	10,702	128,957
	Rural	326,927	300,195	23,751	650,873
	Total	401,777	343,600	34,453	779,830
Kota Mojokerto	Urban	51,219	18,998	6,948	77,165
	Rural	0	0	0	0
	Total	51,219	18,998	6,948	77,165
Kota Surabaya	Urban	1,198,240	343,752	157,095	1,699,087
	Rural	0	0	0	0
	Total	1,198,240	343,752	157,095	1,699,087

Sumber: Situasi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Bulan Agustus 2007, BPS

## (2) Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja yang diukur melalui rasio dari semua pekerjaan formal dan informal serta pengangguran terhadap jumlah penduduk, diringkas dalam Tabel 1.5.6. Ketika lapangan kerja sektor informal dan pengangguran termasuk diperhitungkan, angka partisipasinya yang dicatat jauh lebih tinggi daripada bila dibandingkan dengan pekerja di sektor formal saja yang hanya 40%. Total tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi tercatat di Lamongan dan Bangkalan sekitar 90%, sedangkan yang terendah adalah sekitar 65% di Surabaya. Angka ini jauh lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan, karena prevalensi lapangan kerja sektor informal sebelumnya.

**Tabel 1.5.6 Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja**

Kabupaten/ Kota	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
GKS	68.4%	89.4%	75.8%
Sidoarjo	70.1%	69.6%	70.0%
Mojokerto	78.8%	90.5%	85.6%
Lamongan	76.7%	95.1%	92.3%
Gresik	69.6%	81.2%	75.2%
Bangkalan	66.4%	93.6%	87.7%
Kota Mojokerto	69.0%	-	69.0%
Kota Surabaya	65.1%	-	65.1%

Sumber: Situasi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Bulan Agustus 2007, BPS

### (3) Pengangguran

Berkenaan dengan pengangguran di Kawasan GKS, terutama perkotaan dan pinggiran sekitarnya seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo tercatat tingkat penganggurannya sangat tinggi, lebih dari 9,0% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.5.7. Sebaliknya, tingkat pengangguran di daerah pedesaan rata-rata hanya 4%. Keadaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa struktur pengangguran di daerah perkotaan dan pedesaan berbeda.

**Tabel 1.5.7 Jumlah Pengangguran menurut Wilayah di GKS Tahun 2007**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengangguran			Prosentase Populasi Pengangguran (%)	
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
East Java Province	751,499	615,004	1,366,503	55.0%	45.0%
GKS	325,964	112,464	438,428	74.3%	25.7%
Kab. Sidoarjo	103,526	11,882	115,408	89.7%	10.3%
Kab. Mojokerto	16,689	19,524	36,213	46.1%	53.9%
Kab. Lamongan	6,795	34,207	41,002	16.6%	83.4%
Kab. Gresik	24,209	23,100	47,309	51.2%	48.8%
Kab. Bangkalan	10,702	23,751	34,453	31.1%	68.9%
Kota Mojokerto	6,948	0	6,948	100.0%	0.0%
Kota Surabaya	157,095	0	157,095	100.0%	0.0%

Sumber: Situasi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Bulan Agustus 2007, BPS

### (4) Struktur Tenaga Kerja menurut Sektor

Tabel 1.5.8 menunjukkan situasi tenaga kerja formal menurut sektor pada tahun 2007. Berkenaan dengan tenaga kerja industri menurut sektor di GKS, industri sektor primer yang menonjol adalah pertanian seperti produksi beras dan perikanan. Sektor industri terutama terdiri dari industri baja, alat elektronik, dan semen, sedangkan industri sektor tersier didorong oleh perdagangan dan jasa.

Komposisi tenaga kerja formal menurut sektor telah berubah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Antara tahun 2000 hingga 2007 diketahui sebuah tren bahwa orang yang dipekerjakan telah terkonsentrasi di sektor industri (manufaktur) yang terjadi di Gresik dan Sidoarjo. Kemungkinan besar keadaan tersebut sebagai hasil dari industrialisasi yang pesat yang merupakan limpahan dari Surabaya dimana sektor manufaktur perkotaannya hampir jenuh. Sementara itu, daerah lain dengan sektor pertanian besar seperti Lamongan dan Bangkalan memiliki segmen tenaga kerja besar yang merupakan milik industri sektor primer.

Seperti yang ditunjukkan dalam pertumbuhan tenaga kerja menurut sektor menurut kurun waktu 2000-2007 dalam Tabel 1.5.9, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian meningkat di Sidoarjo (1,7%) dan Bangkalan (0,2%), ternyata di Surabaya mengalami penurunan sebesar 14,6%, dan sedikit menurun di seluruh kabupaten dan kota di GKS. Ketenagakerjaan pada sektor industri (manufaktur) yang paling menurun terjadi di Bangkalan (13,1%) dan Surabaya (sebesar 0,2%); namun meningkat sebesar 5,6% di Kabupaten Gresik dan 6,0% di Kabupaten Mojokerto, sekaligus meningkatkan sedikit di kabupaten lainnya. Tenaga kerja di seluruh sektor-sektor lain, terutama terdiri dari industri tersier termasuk sektor Perdagangan dan Jasa, telah tumbuh di semua wilayah GKS dengan tingkat rata-rata 10,0%.

**Tabel 1.5.8 Tenaga Kerja Formal menurut Sektor Tahun 2007**

Kabupaten/ Kota	Primer (Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan)	Industri	Perdagangan Grosir, Perdagangan Eceran Restoran dan Hotel	Pelayanan Masyarakat, Sosial dan Pribadi	Lain-lain*	Total
GKS	972,148	857,268	1,061,531	595,431	608,622	4,095,000
Sidoarjo	67,824	275,432	204,706	124,055	123,426	795,443
Mojokerto	149,497	133,469	107,240	46,637	69,048	505,891
Lamongan	349,601	42,446	117,634	50,997	48,198	608,876
Gresik	132,500	174,820	106,437	54,649	65,148	533,554
Bangkalan	263,552	8,715	64,244	30,425	34,841	401,777
Kota Mojokerto	1,487	13,824	18,010	10,493	7,405	51,219
Kota Surabaya	7,687	208,562	443,260	278,175	260,556	1,198,240
<b>Sumbangan (%)</b>						
GKS	23.7%	20.9%	25.9%	14.5%	14.9%	100.0%
Sidoarjo	8.5%	34.6%	25.7%	15.6%	15.5%	100.0%
Mojokerto	29.6%	26.4%	21.2%	9.2%	13.6%	100.0%
Lamongan	57.4%	7.0%	19.3%	8.4%	7.9%	100.0%
Gresik	24.8%	32.8%	19.9%	10.2%	12.2%	100.0%
Bangkalan	65.6%	2.2%	16.0%	7.6%	8.7%	100.0%
Kota Mojokerto	2.9%	27.0%	35.2%	20.5%	14.5%	100.0%
Kota Surabaya	0.6%	17.4%	37.0%	23.2%	21.7%	100.0%

Sumber: Situasi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Bulan Agustus 2007, BPS

Catatan: Lain-lain \* termasuk industri sekunder dan tersier lain seperti: Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, Pembiayaan, Asuransi, Real Estat dan Jasa Usaha

**Tabel 1.5.9 Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja menurut Sektor Tahun 2000-2007**

Kabupaten/ Kota	Total	Pertanian	Industri (Manufaktur)	Industri Lainnya
GKS	1.7%	-0.3%	0.7%	10.0%
Sidoarjo	1.8%	<b>1.7%</b>	0.3%	8.7%
Mojokerto	2.7%	-0.1%	<b>5.0%</b>	10.9%
Lamongan	0.9%	-0.4%	0.3%	9.7%
Gresik	3.1%	-0.2%	<b>5.6%</b>	12.4%
Bangkalan	0.7%	<b>0.2%</b>	<b>-13.1%</b>	10.5%
Kota Mojokerto	1.6%	-2.2%	0.5%	6.2%
Kota Surabaya	1.6%	<b>-14.6%</b>	-2.8%	10.4%

Sumber: JICA Study Team menurut Situasi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Bulan Agustus 2007, BPS dan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2000 Propinsi Jawa Timur, BPS

### 1.5.3 Ekonomi

#### 1) Struktur Ekonomi (PDRB)

Rasio kontribusi sektor industri terhadap PDRB di GKS adalah sekitar 34% diikuti oleh perdagangan besar, perdagangan restoran, ritel dan hotel yang tercatat sekitar 33% dari output total produk domestik. Dalam hal kontribusi daerah terhadap PDRB, Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik tercatat mempunyai kontributor tertinggi terhadap total jumlah di GKS yaitu sebesar 94% (masing-masing 60,7%, 18,4% dan 9,8%). Tabel 1.5.10 menunjukkan kontribusi kabupaten dan kota di GKS terhadap PDRB wilayah.

**Tabel 1.5.10 Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di GKS menurut Wilayah**

(Unit: Juta Rp)

Wilayah	Tipe Sub-sektor					Total	%
	1	2	3	4	5		
GKS	9,920,672	71,785,696	69,724,115	13,615,042	46,041,144	211,086,669	100.0%
Sidoarjo	1,352,164	19,133,352	10,140,723	1,909,680	6,449,031	38,984,950	18.47%
Mojokerto	1,946,123	3,200,358	2,396,890	777,342	1,303,279	9,623,992	4.56%
Lamongan	2,643,252	369,954	2,221,828	809,149	753,346	6,797,531	3.22%
Gresik	2,182,765	9,932,033	4,531,470	235,068	3,928,513	20,809,849	9.86%
Bangkalan	1,634,620	223,581	1,338,770	791,345	1,213,304	5,201,620	2.46%
Kota Mojokerto	16,268	227,137	344,384	231,918	650,861	1,470,568	0.70%
Kota Surabaya	145,480	38,699,280	48,750,050	8,860,540	31,742,810	128,198,160	60.73%

Sumber: Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, DALAM ANGKA

Catatan: 1: Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

2: Industri

3: Perdagangan Grosir, Perdagangan Eceran Restoran dan Hotel

4: Pelayanan Masyarakat, Sosial dan Pribadi

5: Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan

Tingkat pertumbuhan tahunan di Kawasan GKS antara tahun 2000 hingga 2007 telah tercatat sebesar 9,4%. Dalam hal PDRB dinamis menurut sektor, sektor industri sekunder seperti industri manufaktur dan industri sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran telah diperluas antara tahun 2000 hingga 2007 (lihat Tabel 1.5.11). Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Mojokerto telah memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi perkembangan ekonomi GKS (lihat Tabel 1.5.11).



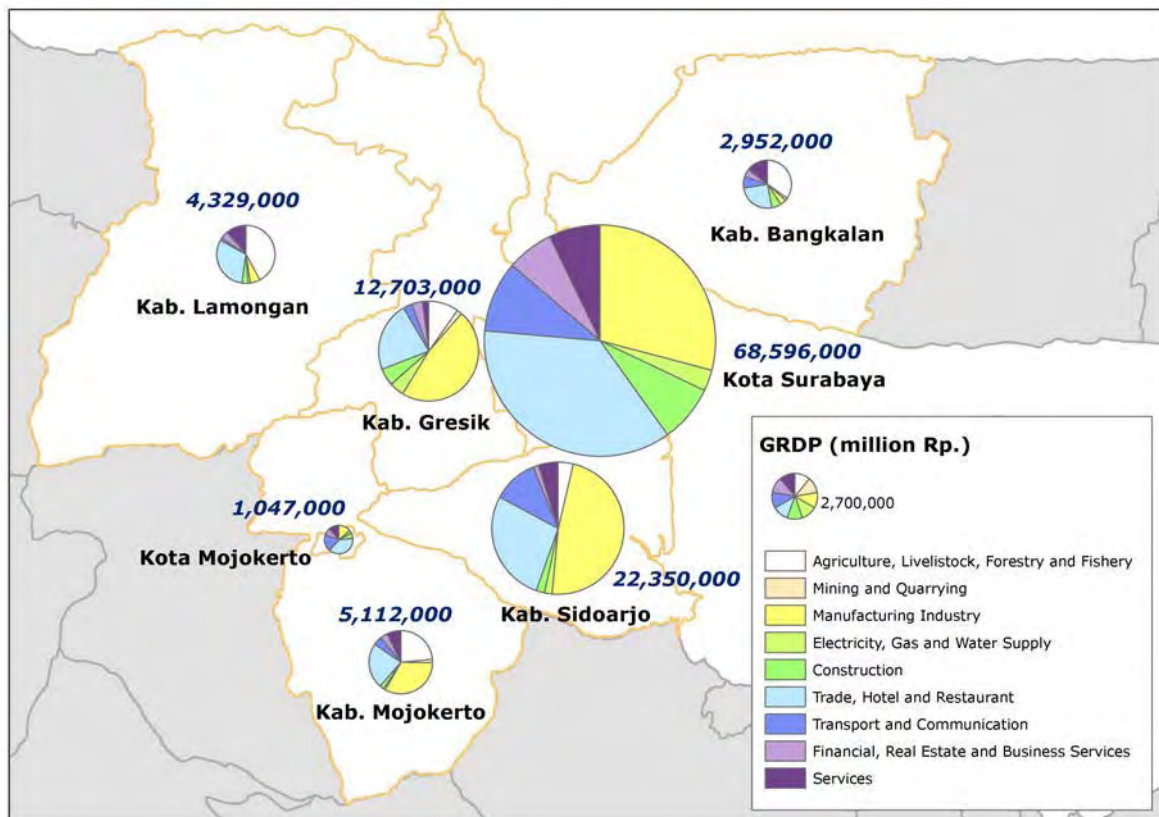
**Tabel 1.5.11 PDRB menurut Kabupaten/Kota dari Tahun 2000 hingga 2007 (harga konstan 2000)**

(Unit: milyar Rp.)

Kab./Kota	2000	2007	Tingkat Pertumbuhan
Prov. Jawa Timur	169,767	287,815	7.8%
GKS	62,479	117,086	9.4%
Sidoarjo **	9,549	22,350	11.2%
Mojokerto	2,756	5,112	9.2%
Lamongan	2,825	4,329	6.3%
Gresik *	9,077	12,703	5.8%
Bangkalan	1,636	2,952	8.8%
Kota Mojokerto **	483	1,047	10.2%
Kota Surabaya **	36,156	68,596	8.3%

Catatan: \* data menurut Tahun 2006, \*\* data menurut tahun 1999  
Sumber: Provinsi Dalam Angka 2000 dan 2008

PDRB GKS mencapai lebih dari 44,6% daripada PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007. Khususnya Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo adalah kontributor besar dengan sumbangan kolektif sebesar 88,8% dari PDRB GKS. Pencapaian ekonomi kabupten dan kota tersebut didorong oleh sektor industri sekunder dan tersier (lihat Gambar 1.5.3).



Catatan: Gambaran Kab. Gresik berdasarkan data Tahun 2006.

Sumber: JICA Study Team berdasarkan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2008, BPS

**Gambar 1.5.3 PDRB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007**

## 2) PDRB per Kapita

Angka PDRB per kapita untuk Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo juga tercatat tinggi. Sementara PDRB wilayah yang didominasi oleh industri primer seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan menunjukkan angka PDRB per kapita yang rendah, yaitu seperdelapan Kota Surabaya (lihat Tabel 1.5. 12).

**Tabel 1.5.12 PDRB dan PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007**

Kabupaten/Kota	PDRB (juta Rp.)	%	PDRB per Kapita (ribu Rp.)
GKS	128,234,873	100.0%	13,859.2
Kab. Sidoarjo	24,811,843	19.3%	13,273.0
Kab. Mojokerto	5,620,623	4.4%	5,268.4
Kab. Lamongan	4,526,193	3.5%	3,488.6
Kab. Gresik*	14,264,594	11.1%	12,286.0
Kab. Bangkalan	3,074,323	2.4%	3,127.0
Kota Mojokerto	1,142,281	0.9%	9,336.8
Kota Surabaya	74,795,018	58.3%	27,173.4

Sumber: Analisa Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Jawa Timur 2008

## 3) Situasi Kemiskinan

Rasio kemiskinan GKS juga telah sedikit berkurang antara tahun 2006 dan 2007. Selama dekade terakhir, kemiskinan di daerah pedesaan cenderung menurun lebih cepat daripada di daerah perkotaan pada umumnya. Namun, di GKS, rasio kemiskinan di daerah pedesaan belum membaik secara drastis dan masih tercatat angkanya cukup tinggi seperti di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan

**Tabel 1.5.13 Penduduk yang Hidup Miskin di GKS Tahun 2006 dan 2007**

Kabupaten/Kota	2006			2007			Rerata Pertumbuhan Tahunan (%)
	Populasi	Jumlah yang Miskin	%	Populasi	Jumlah yang Miskin	%	
GKS	9,042,570	1,540,806	17.04%	9,253,414	1,448,969	15.66%	-5.96%
Kab. Sidoarjo	1,838,666	162,156	8.82%	1,869,350	155,871	8.34%	-3.88%
Kab. Mojokerto	1,027,871	148,422	14.44%	1,066,854	144,371	13.53%	-2.73%
Kab. Lamongan	1,274,194	391,426	30.72%	1,297,986	365,657	28.17%	-6.58%
Kab. Gresik	1,120,541	209,933	18.73%	1,161,044	195,806	16.86%	-6.73%
Kab. Bangkalan	945,863	336,317	35.56%	983,150	328,655	33.43%	-2.28%
Kota Mojokerto	118,464	10,548	8.90%	122,432	10,462	8.55%	-0.82%
Kota Surabaya	2,716,971	282,004	10.38%	2,752,598	248,147	9.02%	-12.01%

Sumber: Baseline Survey untuk Perumusan Tata Ruang Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS) di Indonesia, Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa timur Tahun 2003-2007

## 4) Struktur Industri

Dalam hal struktur industri, rasio UKM dan industri besar menunjukkan bahwa perusahaan besar terkonsentrasi di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Rasio perusahaan besar di Kabupaten Sidoarjo adalah sekitar 47%, sementara di Kota Surabaya 43% dan di Kabupaten Gresik 27,8%. Tabel 1.5.14 menunjukkan jumlah industri di GKS menurut jenis industri.

**Tabel 1.5.14 Jumlah Industri Kecil, Menengah dan Industri Besar di GKS Tahun 2008**

Wilayah	Industri Kecil dan Menengah		Industri Besar		Total	%
Gresik	196	72.1%	75	27.8%	272	10.7%
Bangkalan	321	99.4%	2	0.6%	324	12.8%
Mojokerto	412	76.4%	127	23.5%	540	21.3%
Kota Mojokerto	101	79.5%	26	20.3%	128	5.0%
Kota Surabaya	381	56.9%	289	43.1%	671	26.4%
Sidoarjo	131	52.6%	118	47.2%	250	9.8%
Lamongan	348	99.1%	3	0.9%	352	13.9%
GKS	1890	74.5%	640	25.3%	2,535	100.0%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jawa Timur

Kontribusi sektor industri untuk tenaga kerja di GKS ditunjukkan pada Tabel 1.5.15. Data ini menunjukkan bahwa di antara bangkitan tenaga kerja tertinggi berasal dari sector pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, yang tercatat total sekitar 1,8 juta orang di seluruh Kawasan GKS. Kemudian ini diikuti dengan perdagangan besar, perdagangan eceran, restoran dan hotel yang tercatat sebanyak 1,6 juta orang pekerja.

**Tabel 1.5.15 Bangkitan Tenaga Kerja menurut Sektor di GKS Tahun 2007**

Wilayah	Tipe Sub-sektor					Total	%
	1	2	3	4	5		
GKS	1,892,014	995,998	1,611,704	717,374	856,505	6,073,596	100.0%
Sidoarjo	124,573	305,154	311,199	155,809	176,323	1,073,059	17.67%
Mojokerto	291,307	166,584	165,514	58,044	112,469	793,919	13.07%
Lamongan	679,203	57,927	183,308	58,853	75,403	1,054,695	17.37%
Gresik	254,400	205,268	172,870	65,144	96,657	794,340	13.08%
Bangkalan	527,104	13,669	109,286	39,384	55,934	745,378	12.27%
Kota Mojokerto	2,780	15,490	29,143	12,494	10,310	70,218	1.16%
Kota Surabaya	12,647	231,906	640,384	327,646	329,409	1,541,993	25.39%

Sumber: Situasi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Bulan Agustus 2007, BPS

Catatan: 1: Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

2: Industri

3: Perdagangan Grosir, Perdagangan Eceran Restoran dan Hotel

4: Pelayanan Masyarakat, Sosial dan Pribadi

5: Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Mojokerto menghasilkan tenaga kerja gabungan sekitar 75% dari total lapangan kerja yang dihasilkan di GKS, sedangkan total gabungan tenaga kerja yang dihasilkan dari Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan di sektor industri hanya 7,2%. Namun, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan mempunyai bangkitan tenaga kerja sekitar 70% dari sub-sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Data menunjukkan bahwa struktur kerja dan kontribusi Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan terhadap PDRB dihasilkan dari sub-sektor pertanian.

Rasio UKM dan perusahaan besar di industri manufaktur Kabupaten Gresik dan Kota Mojokerto menunjukkan bahwa sekitar 75% dari industry yang ada adalah UKM. Dari titik ini, UKM memberikan kontribusi lebih untuk tenaga kerja di sektor industri dibandingkan dengan perusahaan besar.

## **2. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROPINSI UNTUK KAWASAN GKS**

### **2.1 Kebijakan Nasional Penataan Ruang, Arah dan Strategi**

#### **2.1.1 Umum**

Rencana tata ruang nasional diatur dalam arahan pembangunan jangka panjang 2005-2025 yang menyebutkan dalam sub bab IV.1.5 lampiran (10) bahwa "rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan tata ruang bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, dan daerah sehingga pemanfaatan ruang bisa sinergis, harmonis, dan berkelanjutan. Rencana tata ruang disusun dalam suatu hirarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan di bidang perencanaan tata ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. "

Menurut Peraturan Presiden No.05 tahun 2010 dalam lampiran Bab 2.9, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Sektor di tahun 2010 hingga 2014, dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) arahan kebijakan dan strategi utama, yaitu:

- 1) Pelaksanaan rencana tata ruang;
- 2) Koordinasi dan integrasi pembangunan daerah, baik di lingkungan perkotaan dan pedesaan, serta dalam lingkup area prioritas (kawasan strategis, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan rawan bencana), dan
- 3) Desentralisasi dan manajemen pemerintahan daerah, dan dilaksanakan di 12 sektor prioritas.

Pengendalian dan pelaksanaan tata ruang dilakukan melalui:

- Memperkuat analisa data base, informasi tata ruang, dan pemetaan seluruh wilayah nasional; dan
- Pelaksanaan rencana tata ruang yang berkelanjutan.

Koordinasi dan integrasi dalam pengembangan kawasan dilaksanakan melalui:

- Kebijakan pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, meningkatkan daya

tarik daerah pedesaan, dan membangun hubungan antara daerah perkotaan dan pedesaan;

- Percepatan pembangunan wilayah prioritas, yaitu kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, kawasan tertinggal, dan daerah perbatasan, dan
- Pengembangan kecenderungan pengurangan risiko bencana dan manajemen bencana di kedua daerah pedesaan dan perkotaan.

Pelaksanaan keseluruhan pembangunan daerah harus didukung oleh:

- Kebijakan reformasi agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan lahan;
- Koordinasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten / kota; dan
- Peningkatan kebijakan pengembangan kapasitas bagi para pejabat pemerintah daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

## 2.1.2 Arahan Pelaksanaan dan Strategi Penataan Ruang

Arah kebijakan dalam pelaksanaan tata ruang adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tata ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, dan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2010-2014, target numerik untuk rencana pembangunan nasional adalah sebagai ditunjukkan pada Tabel 2.1.1.

**Tabel 2.1.1 Tujuan Pembangunan Nasional Jangka Menengah (2010-2014)**

NO.	Aspek Pembangunan	Tujuan (2010-2014)	
		Status Awal (2008)	Target tahun 2014
<b>1.</b>	<b>Ekonomi</b>		
a)	Pertumbuhan Ekonomi		Rata-rata tahunan 6.3 – 6.8%
b)	Inflasi		Rata-rata tahunan 4 – 6%
c)	Tingkat Pengangguran		5 – 6% hingga akhir 2014
d)	Tingkat Kemiskinan		8 – 10% hingga akhir 2014
<b>2.</b>	<b>Pendidikan</b>		
		Status Awal (2008)	Target tahun 2014
a)	Peningkatan waktu rata-rata penduduk usia sekolah 15 tahun dan lebih tua (tahun)	7.50	8.25
b)	Penurunan penduduk buta aksara usia 15 tahun dan lebih tua (%)	5.97	4.18
c)	Peningkatan pendaftaran SD / Sekolah Luar Biasa (SD / SDLB / MI / Paket A) (%)	95.14	96.00
d)	Peningkatan pendaftaran Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Luar Biasa (SMP / SMPLB / MTs / Paket B) (%)	72.28	76.00
e)	Peningkatan pendaftaran Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Luar Biasa (SMA / SMALB / MA / Paket C) (%)	64.28	85.00
f)	Peningkatan lulusan / pendaftaran Perguruan Tinggi berusia	21.26	30.00

NO.	Aspek Pembangunan	Tujuan (2010-2014)	
	19-23 (tahun)		
g)	Penurunan partisipasi disparitas dan kualitas layanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial-ekonomi, dan di antara operator pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat		
<b>3.</b>	<b>Kesehatan</b>		
a)	Peningkatan harapan hidup (tahun)	70.70	72.00
b)	Penurunan angka kematian ibu / 100.000 kelahiran hidup	228.00	118.00
c)	Penurunan kematian bayi / 1.000 kelahiran hidup	34.00	24.00
d)	Penurunan prevalensi anak-anak kekurangan gizi di bawah 5 tahun (%)	18.40	< 15.00
<b>4.</b>	<b>Stok Makanan</b>		
a)	Produksi Padi	Pertumbuhan tahunan: 3.22 %	
b)	Produksi Jagung	Pertumbuhan tahunan: 10.02 %	
c)	Produksi Kedelai	Pertumbuhan tahunan: 20.05 %	
d)	Produksi Gula	Pertumbuhan tahunan: 12.55 %	
e)	Produksi Daging	Pertumbuhan tahunan: 7.30 %	
<b>5.</b>	<b>Energi</b>		
a)	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik	3,000 MW/tahun	
b)	Peningkatan rasio elektrifikasi	80 %	
c)	Peningkatan produksi minyak bumi	1.01 juta barrel/hari	
d)	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi	5,000 MW	
<b>6.</b>	<b>Infrastruktur</b>		
a)	Pembangunan Bendungan di Sumatera, DKI, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua	Hingga 19,370 km sampai 2014	
b)	Pembangunan jaringan Infrastruktur dan antar-moda dan antar-pulau terintegrasi dengan penyediaan jasa transportasi sesuai dengan Cetak Biru Sistem Transportasi Nasional dan Multi-moda Transportasi	Akan selesai	
c)	Pencapaian pembangunan jaringan Fiber Optik di Indonesia Timur	Akan selesai sebelum 2013	
d)	Peningkatan jaringan dan sistem transportasi di empat kota metropolitan (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan)	Akan selesai	

Sumber: Dokumen RPJM Nasional 2010-2014, Perpres No.05/2010-Lampiran-1.

## 2.2 Kebijakan, Arah dan Strategi Penataan Ruang Jawa-Bali

Tujuan Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali adalah untuk mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk mewujudkan kesatuan dan keseimbangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur pembangunan di kawasan terpadu mencakup ekosistem pulau Jawa-Bali. Tujuan Perencanaan Tata Ruang Jawa-Bali yang meliputi:

- 1) Mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung utama nasional;
- 2) Pengendalian pembangunan fisik kawasan perkotaan dan penyebaran perkotaan yang tak terarah;
- 3) Mengembangkan Jawa-Bali sebagai pusat pengolahan industri;
- 4) Memanfaatkan sumber daya mineral dan minyak dan gas tersedia di Jawa-Bali secara berkelanjutan dan benar;
- 5) Mewujudkan Jawa-Bali sebagai pusat pariwisata dan jasa;
- 6) Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 30% dari wilayah Jawa-Bali untuk wilayah ekosistem berbasis air;
- 7) Mempercepat pembangunan wilayah pantai selatan Pulau Jawa, dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung dan rawan bencana;
- 8) Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi antar-modal untuk memperkuat daya saing Jawa-Bali, dan
- 9) Meningkatkan hubungan sinergis antara Jawa-Bali dan pulau-pulau lainnya.

Selain itu, kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang nasional dan pola ruang di Pulau Jawa-Bali dilakukan melalui:

- Mempertahankan lahan pertanian;
- Mengontrol fungsi transfer lahan pertanian;
- Mengembangkan dan mengontrol jaringan infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan luas lahan pertanian;
- Mendorong kegiatan pemanfaatan ruang di daerah metropolitan dan perkotaan besar secara vertikal dan kompak;
- Mengontrol penyebaran perkotaan yang tak terarah dan keterkaitan antara daerah perkotaan dan pedesaan;
- Mengembangkan industri ramah lingkungan dan jasa, menghemat ruang, dan padat tenaga kerja, mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam pengembangan kawasan industri dan industri estat;
- Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan kawasan minyak dan gas;
- Mendorong pengembangan pusat pelayanan;
- Mengembangkan kawasan wisata terpadu berdasarkan keunikan alam, satwa liar, sosial, budaya, dan ekonomi;

- Menstabilkan fungsi kawasan lindung dan merevitalisasi fungsi kawasan lindung yang terdegradasi;
- Pengendalian aktivitas pemanfaatan ruang di wilayah hulu sungai dan merehabilitasi daerah hulu dan infiltrasi terdegradasi untuk mempertahankan sumber daya air untuk ketersediaan air dalam jangka panjang;
- Mempercepat pengembangan kawasan andalan di bagian selatan Pulau Jawa dan interkoneksi antara wilayah pantai selatan dengan pantai pusat dan utara Pulau Jawa;
- Mendorong pengembangan di Jaringan Jalan Lintas Selatan dan Lalu Lintas Jalan Pantai Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Lintas Utara Bali untuk meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dan terisolasi dalam daya dukung laten lingkungan;
- Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru / daerah perkotaan Pantai Selatan Jawa berdasarkan mitigasi bencana;
- Mendorong pengembangan infrastruktur antar-modal untuk daya saing ekonomi dan untuk membuka akses antar-pulau (termasuk pulau-pulau kecil);
- Mendorong koneksi nasional antar-pulau didasarkan pada pembangunan daerah khusus; dan
- Menjaga pulau-pulau kecil pinggiran sebagai titik dasar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, strategi operasional untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Jawa-Bali dilakukan melalui:

- Mengelola pembangunan yang berlebihan dari perumahan, usaha / komersial, fasilitas industri di daerah penyangga pinggiran dan / atau sepanjang arteri primer dan jalan kolektor primer;
- Mengintegrasikan dan mendorong relokasi kegiatan industri di daerah perkotaan menjadi peruntukan untuk kawasan industri;
- Mendorong pengembangan kawasan perkotaan berdasarkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Gerbangkertosusila (GKS) sebagai pusat untuk pelayanan pendidikan tinggi, keuangan dan kesehatan skala internasional;
- Mendorong pengembangan Bandung Raya dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- Mendorong pembangunan perkotaan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Denpasar sebagai pusat pariwisata;
- Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dan sinergi antara daerah perkotaan dan pedesaan; dan
- Mengurangi bencana perkotaan dan dampak negatif akibat pemanasan global.

## 2.3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Jawa Timur

Tujuan utama dari Penataan Ruang Propinsi Jawa Timur ditentukan berdasarkan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Timur 2005 - 2025.



Visi dan misi digambarkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan setiap Kota/Kabupaten serta Propinsi Jawa Timur sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.3.1 dan 2.3.2.

Rencana Tata Ruang Jawa Timur memuat sejumlah isu strategis, dengan fokus pada:

- Masalah kemampuan lahan / daya dukung dan konversi lahan
- Masalah ekonomi, infrastruktur perbedaan dan jasa, dan sumber daya manusia
- Masalah bencana alam dan kerentanan
- Masalah bencana lumpur Lapindo dan implikasi sosial-ekonomi
- Masalah konversi hutan dan lahan pertanian, terutama untuk satu irigasi.
- Masalah kurangnya integrasi sektor pertanian, dan di antara sistem produksi dan distribusi, dengan mempertimbangkan peningkatan nilai tambah produksi pertanian
- Masalah globalisasi, urbanisasi dan pertumbuhan kota mengarah ke penyebaran perkotaan yang tak terarah dan kota-kota besar, terutama di kota-kota besar di Jawa Timur
- Masalah ketahanan pangan
- Masalah potensi pengembangan infrastruktur strategis untuk transportasi, energi dan telekomunikasi, termasuk Jembatan Suramadu, pembangunan pelabuhan di Tuban, Lamongan, Gresik, hingga Situbondo, pengembangan sumber energi alternatif dan pengolahannya.

Dalam rangka memecahkan masalah-masalah pembangunan seperti yang diidentifikasi di atas, sasaran pembangunan ditujukan sebagai berikut:

- 1) Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis, terkemuka, kompetitif global dan berkelanjutan menuju kemakmuran Jawa Timur;
- 2) Kondisi ruang dan fisik terstruktur terutama dengan keseimbangan optimal pemanfaatan ruang antara hijau / ruang terbuka dan area dibangun; dan keseimbangan ruang dari penggunaan lahan dan transportasi
- 3) Pusat-pusat pertumbuhan utama yang dapat berfungsi secara regional-nasional.
- 4) Perlindungan lingkungan untuk pengelolaan air, udara, tanah, karena dampak negatif dari pengembangan dan perlindungan hutan dan pengurangan irigasi teknis;
- 5) Sumber daya manusia yang kompetitif secara global khususnya dalam rangka menanggapi persyaratan untuk globalisasi sehingga Jawa Timur harus siap untuk menjadi bagian dari sistem global;
- 6) Menstabilkan daerah pasokan makanan, mewujudkan potensi besar pangan di Jawa Timur untuk mendukung tujuan nasional dalam ketahanan pangan dan
- 7) Neraca dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur.

Mengingat faktor di atas, tujuan perencanaan tata ruang Jawa Timur dinyatakan dengan "Menciptakan kawasan tata ruang propinsi yang sangat kompetitif dan berkelanjutan melalui pengembangan agropolitan dan sistem metropolitan". Kebijakan dan strategi pembangunan

Provinsi Jawa Timur didefinisikan seperti pada Tabel 2.3.1.

**Table 2.3.1 Kebijakan dan strategi Pembangunan untuk Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur**

KEBIJAKAN	STRATEGI
<b>Pengembangan Wilayah</b>	
Memperkuat sistem PKN perkotaan sebagai perkotaan metropolitan di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan ekonomi berdasarkan strategi pemasaran kota</li> <li>• Konsolidasi fungsi perdagangan jasa skala nasional dan internasional</li> <li>• Pembangunan transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur pada skala internasional</li> <li>• Peningkatan kemudahan investasi untuk pembangunan infrastruktur metropolitan melalui skema deregulasi</li> <li>• Meningkatkan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara kota metropolitan dengan kota-kota lain;</li> <li>• Pembangunan metropolitan berbasis ekologi atau eco-metropolis; dan</li> <li>• Revitalisasi kawasan kota bersejarah dan / atau kota tua di kota-kota PKN sebagai tujuan wisata budaya bernilai ekonomi.</li> </ul>
Meningkatkan sistem penghubung antara kantong sentra produksi utama di Jawa Timur dengan pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat pusat-pusat produksi terkemuka pertanian untuk mendukung agribisnis dan agro-industri</li> <li>• Mengembangkan prasarana dan sarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran untuk membuka akses ke pasar ekspor</li> <li>• Memperkuat suprastruktur pembangunan pertanian yang terdiri dari organisasi petani dan lembaga keuangan</li> <li>• Pembangunan pertanian dan daerah pedesaan berdasarkan eco-region</li> </ul>
<b>Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang</b>	
Untuk membentuk sistem perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan hirarki pusat kegiatan dengan membentuk PKN, PKW, dan PKL yang termasuk dalam Gerbangkertosusila dan Malang Perkotaan, dan pusat kegiatan regional dan masing-masing pusat kabupaten / kota;</li> <li>• Revitalisasi dan mempercepat kawasan pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur didukung oleh pusat-pusat pertumbuhan daerah dan pusat-pusat pertumbuhan lokal, dan</li> <li>• Mengembangkan daerah perkotaan sesuai dengan fungsi dan perannya</li> </ul>
Untuk mengembangkan sistem pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat dan menstabilkan hubungan desa-kota melalui stabilisasi sistem agropolitan;</li> <li>• Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah pedesaan sebagai kawasan inti agropolitan;</li> <li>• Pengembangan kawasan agropolitan berbasis pedesaan dapat diimplementasikan oleh kabupaten. Atau menjadi kawasan strategis ekonomi provinsi jika akan dilaksanakan oleh provinsi untuk dua atau lebih kabupaten yang terlibat di dalamnya, dan</li> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur terutama infrastruktur jalan untuk mendukung sistem agropolitan.</li> </ul>
Memperkuat penyediaan infrastruktur regional (sistem infrastruktur jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air) dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan peran sektor transportasi dalam mempromosikan akselerasi dan pemerataan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan integrasi sektor transportasi dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan, kawasan strategis, kawasan andalan, kawasan tertinggal, dan kepulauan.</li> <li>• Mengembangkan sumber daya energi listrik, minyak bumi, gas alam, dan sistem suplai energi panas bumi dan sistem pengiriman energi untuk memenuhi standar pelayanan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.</li> <li>• Mengembangkan jaringan telekomunikasi, baik terrestrial dan satelit untuk meningkatkan layanan telekomunikasi.</li> </ul>

KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>dan konektivitas antar sistem dan integrasi antara jenis prasarana dengan daerah yang dilayani secara efisien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, integritas, harmoni, keadilan, dan kehandalan air untuk memenuhi air irigasi, air baku industri, dan kebutuhan air minum, dan mengembangkan fasilitas pengendali banjir yang didukung oleh kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.</li> <li>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan pengelolaan limbah dan pembuangan limbah berbahaya dan menentukan lokasi yang tepat dari pembuangan sampah serta peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar-daerah.</li> </ul>
<p><b>Kebijakan dan Strategi Pola Ruang</b></p>	
<p>Konsolidasi pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber daya alam / buatan manusia dan ekosistemnya, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana, untuk mengurangi efek pemanasan global melalui prinsip-berbasis partisipasi, menghormati kearifan lokal, dan untuk mendukung pariwisata, penelitian, dan pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan distribusi batas (delineasi) hutan lindung yang jelas dan meningkatkan pelestarian dan upaya konservasi hutan lindung untuk mempertahankan wilayahnya dan meminimalkan kerusakannya.</li> <li>Meningkatkan luasan wilayah dan menstabilkan perlindungan kawasan lindung yang melindungi daerah bawahan dan daerah tangkapan air meliputi kawasan peresapan air dan kawasan lumut gambut melalui pengaturan pola penggunaan lahan di sekitarnya, dan pengawasan ketat dalam pengelolaan wilayah, seperti pengaturan pembatasan pada konstruksi bangunan baru di daerah masing-masing.</li> <li>Pemantapan rencana pola ruang atau kawasan lindung daripada kawasan perlindungan setempat yang meliputi pantai, sungai, danau, waduk, sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan lokal disertai dengan mengamankan daerah, meningkatkan nilai ekonomi daerah yang disertai dengan upaya pembatasan kegiatan yang tidak berhubungan dengan perlindungan.</li> <li>Konsolidasi batas kawasan lindung dan menjaga fungsi perlindungan reservasi alam, konservasi dan pelestarian budaya, disertai dengan perlindungan ekosistem flora, fauna, pengembangan nilai-nilai budaya dan ilmu pengetahuan, dengan prinsip koordinasi pembangunan, kawasan konservasi dan daerah pembangunan, kerjasama antar kabupaten / kota, dan peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat di sekitar kawasan yang dilestarikan.</li> <li>Penetapan kawasan daripada kawasan rawan bencana alam dari daerah rawan longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; disertai dengan peraturan penggunaan tanah untuk kawasan dan daerah sekitarnya, pengelolaan wilayah, dan upaya mitigasi bencana.</li> <li>Stabilisasi dari kawasan lindung geologi yang terdiri dari reservasi alam geologi, kawasan rawan bencana geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah disertai dengan kawasansi stabilisasi di kawasan masing-masing dan sekitarnya serta kawasan manajemen konsolidasi partisipatif disertai peningkatan upaya mitigasi bencana.</li> <li>Pelestarian ekosistem di kawasan lindung lainnya termasuk pelestarian biosfer, Ramsar, taman berburu, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan perlindungan satwa liar, ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, koridor kawasan untuk spesies satwa liar di kawasan perlindungan laut dengan pengawasan ketat dan pengelolaan kawasan bekerja sama dengan masyarakat.</li> </ul>
<p>Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan karakter dan daya dukung yang dimiliki terutama untuk mendukung konsolidasi sistem metropolitan dan agropolitan dalam meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi adalah pengembangan hutan produksi dengan pemanfaatan berkelanjutan dan partisipatif tanpa melalui pengalihan fungsi hutan untuk kegiatan non-kehutanan, yang dicapai melalui pemantauan pemanfaatan hutan produksi.</li> <li>Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat adalah untuk membangun dan mengembangkan kegiatan partisipatifnya.</li> <li>Menetapkan wilayah Jawa Timur sebagai lumbung Pangan Nasional dengan mempertahankan luas lahan sawah irigasi dan mencegah alih fungsi lahan produktif sawah dan pertanian, serta proses optimasi dan meningkatkan nilai tambah produksi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura, melalui pengembangan agropolitan.</li> </ul>

KEBIJAKAN	STRATEGI
dan kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan komoditas perkebunan unggulan di daerah masing-masing dan optimalisasi pengolahan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan agropolitan.</li> <li>• Pengembangan komoditas peternakan unggas unggulan besar dan kecil di daerah masing-masing serta proses optimasi dan meningkatkan nilai tambah ternak melalui pengembangan agropolitan.</li> <li>• Meningkatkan kualitas perikanan dan kuantitas produk perikanan dengan mendirikan pusat-pusat pengolahan untuk mendukung optimalisasi pengolahan hasil dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui (i) pembangunan minapolitan; ii) Pembangunan pusat pemijahan di kawasan budidaya ikan, (iii) Peningkatan bimbingan, konseling, dan pelatihan untuk pengembangan aquakultur; iv) Peningkatan sarana dan prasarana untuk memancing dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, dan v) Perencanaan tata ruang wilayah Pesisir dan pulau kecil sesuai dengan daya dukungnya untuk menjamin keberlanjutan ekosistem di daerah tersebut.</li> <li>• Pengembangan wilayah pertambangan, melalui pengembangan potensi tambang strategis untuk mineral, batubara, minyak dan gas dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan arah pembangunan berkelanjutan.</li> <li>• Pembangunan industri berskala besar di pusat-pusat utama di Jawa Timur, pengembangan industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan di daerah perkotaan, bantuan teknis pengembangan industri kecil dan menengah, serta pengembangan industri terpadu dengan potensi sumber daya yang berasal dari dalam wilayah Jawa Timur .</li> <li>• Pengembangan pusat-pusat wisata termasuk pusat wisata alam, budaya, taman / rekreasi, dan tujuan wisata lainnya yang terpadu secara spasial dan pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan keunggulan dan daya saing global untuk pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• (i) Pengembangan permukiman perkotaan, terutama untuk perumahan modern dan efisien dan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan (pembangunan berorientasi transit) di wilayah metropolitan; ii) Pengembangan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan agropolitan di daerah pedesaan, dan iii) Meningkatkan penyediaan perumahan sesuai dengan tingkat permintaan di dalam masyarakat secara partisipatif, penyediaan pelayanan perumahan dan infrastruktur yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah melalui pengembangan permukiman yang efisien dan berkelanjutan.</li> <li>• Pengembangan kawasan budidaya lainnya termasuk listrik, militer, dan instalasi lain yang dianggap terpadu secara strategis ke dalam kawasan strategis.</li> </ul>
<b>Kebijakan dan Strategi Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil</b>	
Peningkatan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan, serta perlindungan untuk kawasan bawahan, kawasan konservasi lokal atau reservasi alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kelestarian ekosistem;</li> <li>• Membatasi kegiatan yang menyebabkan gangguan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</li> <li>• Melestarikan berbagai kehidupan, terutama satwa langka</li> </ul>
Mengoptimalkan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan optimalisasi dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri;</li> <li>• Melindungi ekosistem pesisir yang rentan terhadap perubahan fungsi wilayah; dan</li> <li>• Meningkatkan pariwisata dan kegiatan penelitian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>

KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatkan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan ekosistem pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mempertahankan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>• Meningkatkan nilai ekonomi dari kawasan lindung melalui penggunaan mangrove dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan dukungan keberlanjutan;</li> <li>• Membuat kawasan lindung sebagai daya tarik wisata dan penelitian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</li> <li>• Menghindari penggunaan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan yang menyebabkan kerusakan di daerah tersebut.</li> </ul>
Peningkatan operasionalisasi dan realisasi pengembangan kawasan andalan melalui produk unggulan di sektor kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan dan budidaya secara berkelanjutan melalui pengembangan pusat kegiatan perikanan yang terintegrasi dengan koleksi dan pusat distribusi (Minapolitan);</li> <li>• Mendorong peningkatan manfaat nilai tambah produk perikanan yang didukung oleh prasarana dan sarana, layanan informasi terpadu serta industri pengolahan ikan yang memiliki dukungan akses yang baik ke pasar; dan</li> <li>• Mengembangkan perdagangan dan kemitraan pemasaran dengan daerah-daerah produsen lainnya dan kerjasama perdagangan antar-bangsa.</li> </ul>
Pengembangan kota pantai di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akses ke kota-kota utama berorientasi pesisir di Jawa Timur;</li> <li>• Mengembangkan pelayanan dukungan kepada kegiatan perdagangan kecil sampai besar skala internasional;</li> <li>• Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat;</li> <li>• Mengembangkan kegiatan ekonomi melalui penggunaan sumber daya lokal secara maksimal;</li> <li>• Meningkatkan industri di kota-kota pesisir yang sesuai dengan ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan, dan</li> <li>• Meningkatkan daya saing kota-kota pesisir sesuai dengan potensi mereka, dan meminimalkan penyebab aspek keterbelakangan.</li> </ul>
<p><b>Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis Propinsi:</b> <b>Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Ekonomi</b></p>	
Kawasan Industri Ekonomi berteknologi tinggi, kawasan ekonomi khusus, kawasan agropolitan, kawasan koridor metropolitan, kerjasama regional dan kawasan tertinggal. Perbaikan dan stabilisasi fungsi dan peran kawasan kawasan industri ekonomi teknologi tinggi, kawasan ekonomi khusus, kawasan agropolitan, koridor wilayah metropolitan, dan kawasan kerjasama regional di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pembangunan daerah melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan tersebut;</li> <li>• Peningkatan komoditas unggulan, sarana dan prasarana untuk mendukung proses produksi;</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) baik sebagai ahli dan staf pendukung;</li> <li>• Mempercepat transfer teknologi yang lebih efisien dan efektif</li> <li>• Dukungan kebijakan melalui penyediaan instrumen insentif, antara lain, dalam bentuk keringanan pajak dan tax holiday; Bekerja sama dengan investor, terkait dengan pinjaman / modal ventura;</li> <li>• Menelusuri potensi kawasan atau sub-sektor strategis yang dapat dikembangkan, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus baru; dan</li> <li>• Peningkatan kerjasama antar kabupaten / kota untuk mengoptimalkan pertumbuhan daerah perbatasan baik antara kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur dan daerah perbatasan provinsi.</li> </ul>
Kawasan tertinggal Mempercepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menelusuri potensi kawasan atau sub-sektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan tertinggal;</li> </ul>

KEBIJAKAN	STRATEGI
pembangunan dan kemajuan kawasan tertinggal di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan infrastruktur strategis sebagai pendorong pertumbuhan kawasan;</li> <li>• Penyediaan infrastruktur strategis sebagai pendorong pertumbuhan daerah;</li> <li>• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik sebagai ahli dan staf pendukung; dan</li> <li>• Dukungan kebijakan melalui instrumen insentif dalam bentuk keringanan pajak dan meningkatkan program pembangunan strategis.</li> </ul>
<b>Kawasan Strategis dari sudut Pertahanan dan Keamanan</b>	
Mempertahankan fungsi dan peran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi kawasan terbangun dengan kawasan tidak terbangun di sekitar kawasan strategis dari sudut kepentingan strategis pertahanan dan keamanan untuk mendapatkan batas yang jelas untuk tujuan pengelolaan tertentu;</li> <li>• Penentuan jarak aman kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terhadap pemanfaatan lahan lainnya, terutama perumahan;</li> <li>• Pemberian hak milik kepada masyarakat atau pemerintah didasarkan pada kerjasama, harus sesuai dengan yang disetujui untuk menguntungkan kedua belah pihak; dan</li> <li>• Pengendalian ketat untuk wilayah sekitarnya.</li> </ul>
<b>Kawasan Strategis dari sudut Sosial dan Budaya</b>	
Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya; yaitu mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai asli dengan pengelolaan nilai apresiasi melalui pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui nilai ekonomi yang meningkat, seperti penelitian pemanfaatan aset wisata, dan pendidikan;</li> <li>• Mengendalikan pengembangan lahan di daerah terbangun;</li> <li>• Mempertahankan daerah sekitarnya dan memberikan besaran bantuan atau menggambarkan sejarah objek / situs;</li> <li>• Pembinaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam menjaga warisan sejarah;</li> <li>• Meningkatkan kegiatan festival pariwisata atau pertunjukan seni budaya;</li> <li>• Mempertahankan dan mempromosikan pengetahuan asli/tradisional adat setempat, dan</li> <li>• Pengendalian ketat untuk wilayah sekitarnya.</li> </ul>
<b>Kawasan Strategis dari sudut Sumber Daya Alam / atau Teknologi Tinggi</b>	
Perbaikan dan stabilisasi fungsi dan peran kawasan strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis, antara lain, pengembangan kegiatan penunjang dan / atau kegiatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya dan / atau teknologi tinggi;</li> <li>• Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan / atau kegiatan teknologi tinggi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dan / atau turunannya; dan</li> <li>• Mencegah dampak negatif dari penggunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan dan keselamatan umum.</li> </ul>
<b>Kawasan Strategis dari sudut Daya Dukung dan Fungsi Lingkungan</b>	
Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perlindungan lingkungan dan ekosistem kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang mungkin memiliki potensi untuk mengurangi fungsi kawasan lindung;</li> <li>• Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;</li> <li>• Membatasi pembangunan sarana dan prasarana di dalam dan sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;</li> <li>• Merehabilitasi penurunan fungsi kawasan lindung sebagai dampak dari pertumbuhan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;</li> <li>• Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi dari kawasan lindung melalui pemanfaatan daya tarik pariwisata,</li> </ul>

KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>pendidikan, dan lingkungan berbasis penelitian, dan / atau mangrove dan perikanan terumbu karang yang digunakan sebagai sumber daya ekonomi dengan dukungan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mempertahankan ekosistem pesisir;</li> <li>• Mengembalikan kegiatan untuk mendorong pengembangan fungsi perlindungan;</li> <li>• Meningkatkan kawasan konservasi keanekaragaman hayati; dan</li> <li>• Mengontrol secara ketat daerah sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan.</li> </ul>
<b>Kawasan Strategis dari sudut Kawasan Pengendalian Ketat</b>	
<p>Pembangunan dan pengembangan kawasan yang spesifik dan membatasi pemanfaatan kawasan, untuk mempertahankan daya dukungnya, mencegah dampak negatif, dan memastikan proses pembangunan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pengawasan kawasan perdagangan regional untuk mencegah efek negative yang berlipat ganda, termasuk mengurangi pembangunan konstruksi yang cenderung non-formal;</li> <li>• Mengembangkan pengawasan kawasan Kaki Jembatan Suramadu baik di Bangkalan dan Kota Surabaya, termasuk kawasan khusus / ruang pamer terbuka, akses jalan interchange, dan / atau rencana reklamasi untuk meminimalkan dampak negatif dari percepatan pembangunan kawasan pada aspek lingkungan dan sosial;</li> <li>• Mengembangkan Pengawasan kawasan DAS, sumber daya air, dan tepi sungai untuk melestarikan kawasan lain yang membutuhkan perlindungan dari polusi, sedimentasi, erosi, dan kegiatan budidaya;</li> <li>• Mengembangkan kawasan pemantauan yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungan termasuk daerah resapan air atau sumber air, kawasan konservasi, mangrove untuk mempertahankan fungsi lindung;</li> <li>• Mengembangkan pemantauan daerah sekitar jaringan transportasi, terkait dengan jaringan jalan, kereta api, daerah kepentingan pelabuhan, daerah sekitar bandara, daerah sekitar jalan arteri / jalan raya untuk memastikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, ketepatan, keamanan dari aliran moda transportasi / kendaraan / orang / barang dan meminimalkan dampak dari kegiatan non-transportasi;</li> <li>• Mengembangkan pemantauan daerah sekitar pembangunan infrastruktur di daerah regional seperti daerah sekitar jaringan pipa gas, jaringan tegangan tinggi, dll, dan pengelolaan persampahan terpadu untuk menjamin batas aman dari infrastruktur wilayah dari kegiatan budidaya dan permukiman serta sebagai meminimalkan gangguan pada keberlanjutan fungsi infrastruktur;</li> <li>• Mengembangkan pengawasan daerah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana; dan</li> <li>• Mengembangkan pengawasan kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional lainnya untuk menyelaraskan penggunaan kawasan budidaya dengan aspek kelestarian lingkungan.</li> </ul>

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur 2009-2029.

## 2.4 Pengembangan Visi dan Misi untuk Rencana Spasial Menurut Kabupaten di Kawasan GKS

Semua rencana penataan ruang yang disusun oleh masing-masing kabupaten di Kawasan GKS mempunyai perspektif visi jangka panjang, dengan mempertimbangkan potensi pembangunan dan sumber dayanya sendiri, seperti diringkas di dalam Tabel 2.4.1. Visi mereka tersebut diterjemahkan ke dalam misi tata ruang, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.4.2.

**Tabel 2.4.1 Visi Rencana Tata Ruang yang telah disepakati oleh Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota**

JAWA TIMUR	Kota Surabaya	Kota Mojokerto	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	Kab. Mojokerto	Kab. Lamongan
2009 - 2029	2009 - 2029	2007 - 2027	2007 - 2027	2008 - 2028	2009 - 2029	2007 - 2027	2008 - 2028
Perda /2009				Perda No.10/2009	Perda No.06/2009		
Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan	Surabaya sebagai Kota Jasa yang Nyaman, Berdaya, Berbudaya dan Berkeadilan	Mewujudkan Masyarakat Kota Mojokerto yang berkarakter makmur, damai, tenteram, dan berdaya saing di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mewujudkan Penataan Ruang yang Mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi dan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan sebagai Pintu Gerbang Madura menuju Kota Industri, Pariwisata dan Jasa	Sidoarjo Berkembang menjadi Wilayah Pertanian, Perikanan, dan Industri yang berbasis pada Agro pertanian, Agro perikanan serta Perdagangan Jasa dan Permukiman yang Layak/Harmoni dengan lingkungan yang Berkelanjutan	Terwujudnya penataan ruang Kabupaten Mojokerto yang produktif, responsif, integratif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan bertumpu pada partisipasi dan kemitraan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan sebagai Kawasan Pengembangan Industri, Pertanian dan Pariwisata

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Kawasan GKS



**Tabel 2.4.2 Misi Rencana Tata Ruang yang telah disepakati oleh Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota**

Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Mojokerto	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	Kab. Mojokerto	Kab. Lamongan
Tahun 2009 - 2029 Perda ... /2009	Tahun 2006 - 2010	Tahun 2007 - 2027	Tahun 2007 - 2027	Tahun 2008 - 2028 Perda No.10/2009	Tahun 2009 - 2029 Perda No.06/2009	Tahun 2007 - 2027	Tahun 2008 - 2028
Mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;	Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, berkompeten, efisien dan profesional	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera	Mewujudkan penataan ruang yang mengkomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata	Keseimbangan pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan	Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global	Mewujudkan sistem penataan ruang yang produktif, dengan mengembangkan sistem kegiatan ekonomi dan investasi yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah
Mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancan Asia;	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus P Perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah Greater Surabaya dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem Teknologi Informasi yang memadai	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan teknologi	Mewujudkan penataan ruang yang mengkomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi	Penataan kembali kawasan lindung dan budidaya di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan	Mengembangkan perekonomian wilayah yang tangguh dan berkeadilan sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Menciptakan kesiapan dalam penyediaan ruang untuk menjamin keberlangsungan dinamika wilayah	Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan
Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan;	Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar yang di dukung oleh iklim usaha	Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional	Mewujudkan penataan ruang yang mengkomodasi pengelolaan sumber daya buatan	Mewujudkan pola ruang yang selaras dengan kebudayaan masyarakat Bangkalan yang religius (islami) dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mewujudkan pola ruang yang berkelanjutan pada lingkungan sekitarnya	Meningkatkan penataan ruang wilayah melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian dan dinamikan perkembangan wilayah	Meningkatkan program-program dan kaji tindak pembangunan yang mampu menjamin eksistensi dan keberlanjutan fungsi lingkungan (berwawasan lingkungan), kelestarian sumberdaya dan mengurangi kerusakan lingkungan	Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif
Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui fasilitasi	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)	Mewujudkan penataan ruang yang mengkomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan	Optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan	Mengembangkan tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan penataan ruang wilayah	Mewujudkan upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mendayagunakan	Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas

Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Mojokerto	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	Kab. Mojokerto	Kab. Lamongan
<p>jumlah tinggi;</p> <p>Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional</p>	<p>kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha informal lainnya</p> <p>Mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman</p>	<p>Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari</p>	<p>hidup</p>	<p>dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi dengan menyertakan peran masyarakat didalamnya.</p> <p>Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif</p>	<p>kemampuan sumberdaya wilayah yang berdaya-saing tinggi dengan menciptakan peluang usaha-usaha ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan</p> <p>Membangun dan memberikan ruang partisipasi dan kemitraan selalu-luaskan kepada semua stakeholder, yaitu masyarakat, swasta, dan lembaga-lembaga lain dalam penataan ruang</p>	<p>SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi</p>	
<p>Mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan</p>	<p>Meningkatkan kualitas pendidikan berawasan kebangsaan dan berkualitas global yang terjangkau bagi warga kota serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman</p>	<p>Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>		<p>Merumuskan ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disentif serta arahan sanksi</p>			
<p>Mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan (antar wilayah) dan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat</p>						
	<p>Menggalai dan meningkatkan khasanah budaya lokal, kegiatan keagamaan, mengembangkan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan berakhlakul karimah</p>						

*Studi JICA untuk Merumuskan Rencana Tata Ruang Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (GKS)  
Laporan Final (Main Text)*

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Kawasan GKS

## 3. PENGEMBANGAN VISI DAN STRATEGI KAWASAN GKS

### 3.1 Visi dan Misi

#### 3.1.1 Visi

Sebagai sebuah kawasan strategis nasional, visi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan GKS telah ditentukan sebagai berikut:

*"Mewujudkan Kawasan GKS sebagai Pusat Pertumbuhan Global dan Berkelanjutan melalui penciptaan Logistik dan Jendela Ekonomi Dunia, serta Metropolitan yang Cerdas dan Hijau"*

Visi ini dapat dinyatakan secara singkat sebagai: Global, Green, Growing GKS (4G)

#### 3.1.2 Misi/Tujuan

Konsep-konsep kunci yang menggarisbawahi visi tersebut di atas diinterpretasikan ke dalam misi yang sesuai seperti di bawah ini.

**Tabel 3.1.1 Misi / Tujuan Pembangunan Kawasan GKS di Masa Depan**

Konsep Kunci Visi	Misi/Tujuan
Global / Jendela Dunia	Menciptakan GKS yang dikenali dunia untuk menarik perhatian dan investasi
Berkelanjutan	Mempertahankan sumber daya berdasarkan daya dukung dan sumber daya terbarukan Masyarakat yang berkelanjutan dengan melindungi mereka melalui tata kelola pemerintah dan warga negara yang baik dan manajemen bencana
Pusat Pertumbuhan	Mengembangkan GKS sebagai pusat pertumbuhan nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lingkungan binaan berstandar tinggi dengan menyediakan infrastruktur, perumahan dan pelayanan sosial yang tepat
Logistik	Meningkatkan sistem jaringan transportasi yang efisien
Ekonomi	Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan mementingkan kegiatan ekonomi lokal secara seimbang
Cerdas	Menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan mengembangkan sumber daya manusia
Hijau	Membangun dan memelihara basis pertanian berkelanjutan Menciptakan kawasan yang hijau dan ramah lingkungan

Sumber: JICA Study Team

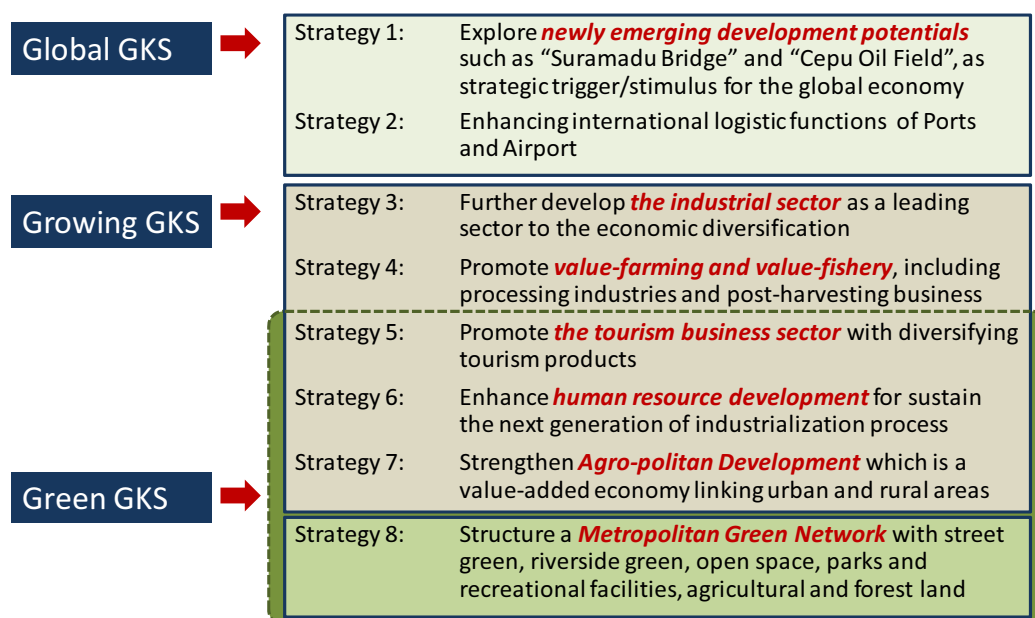
#### 3.1.3 Strategi Pembangunan Utama GKS

Dalam rangka mencapai visi yang dicanangkan, seperti 4G, untuk pengembangan GKS pada

perspektif jangka panjang diidentifikasi 8 (delapan) strategi, yaitu:

- Strategi 1: Meneliti potensi pembangunan yang baru muncul seperti "Jembatan Suramadu" dan "Lapangan Minyak Cepu", sebagai pemicu strategis / stimulus bagi perekonomian global
- Strategi 2: Meningkatkan fungsi logistik internasional Pelabuhan dan Bandara
- Strategi 3: Mengembangkan lebih lanjut sektor industri sebagai sektor utama menuju penganekaragaman ekonomi
- Strategi 4: Mempromosikan pertanian dan perikanan yang bernilai, termasuk industri pengolahan dan bisnis pasca-panen
- Strategi 5: Mempromosikan usaha sektor pariwisata dengan penganekaragaman produk wisata
- Strategi 6: Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk mempertahankan proses industrialisasi generasi berikutnya
- Strategi 7: Memperkuat Pembangunan Agropolitan yang merupakan nilai tambah ekonomi yang menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan
- Strategi 8: Menstrukturkan Jaringan Metropolitan Hijau dengan jalan yang hijau, bantaran sungai hijau, ruang terbuka, taman dan fasilitas rekreasi, lahan pertanian dan hutan

Gambar 3.1.1 menunjukkan antar-hubungan antara masing-masing visi dan strategi untuk mencapai visi tersebut. Strategi 1 dan 2 adalah suatu keharusan untuk mencapai visi "Global GKS" dan Strategi 3 sampai 7 relevan untuk mencapai visi "Growing GKS". Dalam hal yang sama, visi dari "Green GKS" perlu menggali Strategi 5 sampai 8, termasuk pariwisata dan strategi yang berhubungan dengan pertanian.



**Gambar 3.1.1 Visi dan Kunci Strategi untuk Pengembangan Perspektif GKS Jangka Panjang**

GKS adalah kawasan terkemuka untuk kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Di sektor ekonomi, masalah utama adalah untuk mengangkat perekonomian pedesaan yang stagnan

yang menyebabkan terjadinya migran ke daerah-daerah perkotaan karena pekerjaan yang kurang dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Akibatnya, daerah perkotaan yang penuh sesak menderita masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, pengangguran besar-besaran, dan sebagainya.

Saat ini, Indonesia bergabung sekelompok dengan Vietnam, Afrika Selatan, Turki dan Argentina secara kolektif yang disebut sebagai "VISTA", sebagai negara-negara berkembang tercepat di dunia mengikuti BRICs (Brazil Rusia India, Cina). Seiring dengan iklim investasi yang telah ditingkatkan, diharapkan bahwa investor asing juga akan tertarik ke Indonesia. Dengan persaingan dari kawasan JABODETABEK yang dipelopori oleh Jakarta, Kawasan GKS dengan Surabaya sebagai pemimpin ekonomi, harus menawarkan paket yang lebih kompetitif untuk menarik investasi sebanyak mungkin.

Surabaya, sebagai pusat perkotaan bagi Kawasan GKS dan Provinsi Jawa Timur, tentu saja diharapkan untuk memimpin ekonomi GKS dan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, kawasan GKS harus dikembangkan sebagai satu zona yang koheren yang dipimpin oleh Surabaya. Perkembangan ekonomi GKS akan direalisasikan dengan memperkuat daya saing ekonomi. Dan tujuan pembangunan ekonomi GKS adalah, seperti yang dijelaskan dalam visi dan misi dalam RPJM, RPJP, dan RTRW yang sedang direvisi, adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan:** Mengangkat status ekonomi GKS secara global dan nasional dengan peningkatan daya saing keseluruhan kawasan GKS secara berkelanjutan; dan
- **Pemerataan Pertumbuhan ekonomi:** Mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam kawasan GKS.

Tabel 3.1.2 di bawah ini merangkum "Peluang", "Kendala" dan "Tindakan / Strategi melawan Kendala" berkenaan dengan setiap strategi yang dibicarakan di atas.

**Tabel 3.1.2 Peluang dan Kendala untuk Strategi Pembangunan Ekonomi**

Strategi	Peluang	Kendala	Tindakan / Strategi terhadap Kendala
Strategi 1: (Dampak Ekonomi Baru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak ekonomi oleh Jembatan Suramadu</li> <li>• Penambangan gas/minyak dari ladang minyak cepu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya hubungan antar-industri;</li> <li>• Batas kapasitas Pelabuhan Tanjung. Perak dan Bandara Internasional Juanda mencapai jenuh</li> <li>• Kurangnya infrastruktur, batas kritis ketersediaan air dan energy listrik yang stabil;</li> <li>• Lemahnya kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM);</li> <li>• Kurangnya kompetitif upah tenaga kerja, dibandingkan dengan negara yang baru berkembang di Asia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan strategis untuk UKM dalam hal teknologi dan keuangan</li> <li>• Pembangunan Kawasan Industri Strategis dengan prasarana, operasional berorientasi ramah lingkungan, Insentif Pajak, dan seterusnya.</li> <li>• Kebijakan promosi investasi untuk sub-sektor strategis</li> <li>• Subsidi untuk promosi Penelitian dan Pengembangan (R&amp;D) oleh perusahaan lokal</li> </ul>
Strategi 2: (Pusat logistik internasional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi strategis sebagai aglomerasi ekonomi terbesar kedua di Indonesia</li> </ul>		
Strategi 3: (Pusat Industri terkemuka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pelabuhan yang cukup besar: Tanjung. Perak dan bandara internasional ke / dari pasar dunia</li> <li>• Potensi investasi langsung asing (FDI) di sektor-sektor manufaktur, pertambangan dan jasa;</li> </ul>		

Strategi	Peluang	Kendala	Tindakan / Strategi terhadap Kendala
Strategi 4: (Perikanan & Peternakan yang bernilai tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah pertanian yang luas dan subur</li> <li>• Ketersediaan teknologi peternakan tradisional yang sesuai</li> <li>• Petani dan tenaga kerja industri di sektor pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidak stabilan ketersediaan air dan kurangnya koordinasi lintas sektoral dan antar-kabupaten dalam hal pengelolaan air</li> <li>• Kurangnya pengalaman pertanian berorientasi pasar</li> <li>• Kurangnya sistem pemasaran untuk produk-produk agro</li> <li>• Kurangnya insentif bagi industri pengolahan hasil pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas pertanian</li> <li>• Promosi bisnis non-pertanian berkaitan dengan distribusi dan pemasaran</li> <li>• Diversifikasi produk berorientasi pasar</li> <li>• Upaya kolektif promosi untuk kegiatan pasca panen</li> <li>• Praktek pertanian yang ramah lingkungan</li> <li>• Memperkuat keterkaitan dengan pelayanan kota &amp; produk pengolahan hasil pertanian:</li> </ul>
Strategi 5: (Pariwisata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sumber daya laut untuk pariwisata di Pulau Bawean</li> <li>• Potensi pariwisata kota dengan aset budaya dan sejarah di Surabaya</li> <li>• Kemungkinan atraksi wisata baru untuk Jembatan Suramadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya hubungan aset antar- wisata</li> <li>• Lemah promosi untuk daya tarik pariwisata Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan rute pariwisata di GKS</li> <li>• Pengenalan Pariwisata Berorientasi Lingkungan dan Pariwisata Desa</li> <li>• Dorongan Humas untuk pasar Asia</li> <li>• Pengembangan atraksi kota baru seperti Kota Suramadu.</li> </ul>
Strategi 6: (Pembangunan SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan angkatan kerja berpendidikan yang relatif besar</li> <li>• Adanya sejumlah lembaga pendidikan dan kejuruan yang lebih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya organisasi fasilitas pelatihan keterampilan dan kejuruan</li> <li>• Kurangnya pendidikan untuk sosial dan orang dewasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sistem pendidikan kejuruan</li> <li>• Pengembangan pendidikan sosial melalui komunitas-perguruan tinggi, dengan menggunakan fasilitas sekolah dasar</li> </ul>
Strategi 7: (Agropolitan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya keberpihakan kegiatan kaya pertanian / pedesaan dan ekonomi perkotaan</li> <li>• Konsumen pasar yang cukup besar dengan lebih dari 10 juta penduduk di GKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemah keterkaitan antar-sektor</li> <li>• Lemahnya infrastruktur informasi</li> <li>• Kurangnya akses peternakan-ke- jaringan jalan pasar</li> <li>• Kurang pengusaha muda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan sistem informasi pasar di daerah pedesaan</li> <li>• Pelaksanaan program agropolitan yang dapat menghubungkan produk- agro dengan pasar metropolitan</li> <li>• Promosi inkubator bisnis baru</li> </ul>
Strategi 8: (Ekologi & Hijau)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan sumber daya lingkungan yang hijau dan makmur</li> <li>• Lahan pertanian yang terawat baik</li> <li>• Upaya Pemerintah untuk peningkatan ruang hijau perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya kesadaran terhadap lingkungan higienis dan pengelolaan persampahan</li> <li>• Terjadinya bencana banjir dan tanah longsor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi kesadaran masyarakat terhadap "Kota berwawasan lingkungan yang Bersih"</li> <li>• Membangun jaringan sumber daya hijau dan ekologi yang tersedia</li> <li>• Pembangunan taman dan fasilitas rekreasi</li> </ul>

Sumber: JICA Study Team

### 3.2 Analisa SWOT GKS

Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan) dilakukan dengan melihat rona keseluruhan kegiatan sosial dan ekonomi di GKS, dan ringkasannya dijelaskan pada Tabel 3.2.1. Perlu sedikit disampaikan, faktor-faktor lemah yang dialami oleh kawasan GKS harus dikurangi, dan yang kuat perlu lebih difasilitasi. Berdasarkan kedua sisi yang berlawanan tersebut, GKS harus memanfaatkan semua peluang yang telah diidentifikasi, sehingga dapat meminimalkan tantangan di masa depan. Semua pertimbangan-pertimbangan telah terintegrasi dalam visi pembangunan sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya.

**Tabel 3.2.1 Analisis SWOT Kawasan GKS berdasarkan Evaluasi Keseluruhan**

Strength	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Second largest economic agglomeration in Indonesia as another potential growth center</li> <li>• Rich agricultural and fishery potentials with vast irrigated agricultural land</li> <li>• Functional port and airport linked with the world market</li> <li>• Strengthened gateway function to Madura Island with the Suramadu Bridge</li> <li>• Availability of well-educated persons and skilled labor force in a variety of cottage industries</li> <li>• Expectation of national government’s special polices for infrastructure provisions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Susceptible water resource</li> <li>• Chronic water shortage problems in dry season</li> <li>• Heavy traffic congestions in Surabaya and its vicinities, thereby leading to a massive daily economic loss</li> <li>• Overall water-related environment being degraded due to lack of sewerage systems</li> <li>• Many areas suffering from disasters such as floods and land sliding</li> <li>• Port logistic function, which is the lifeline of Surabaya Economy, reaching to the max capacity level, and unstable supply of electric power</li> <li>• Weak governance for legal enforcement and investment administration</li> </ul>
Opportunity	Treat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Be a world-recognized commercial, industrial and logistic center where attracts both domestic and international investors</li> <li>• Be a leading area for advanced food supply activities, agribusiness, and agro-processing industries</li> <li>• Be a human resource center to support value-added types of economies through trading, financing and tourism services</li> <li>• Be one of the Asian port, given a well functioning deep-sea port for sufficient container terminals.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disorderly and/or illegally land conversion from forest and agricultural land to housing and urban land use</li> <li>• Critical damage on water resource capacity and water supply crisis on agricultural , industrial and urban activities</li> <li>• Rapid urbanization, resulting in uneven distribution of people, proliferation of slums, and shortage of public service facilities</li> <li>• Increasing diseconomies of “agglomeration”, due to congestions and environmental degradation, thereby loosing the growth opportunity</li> </ul>

Sumber: JICA Study Team

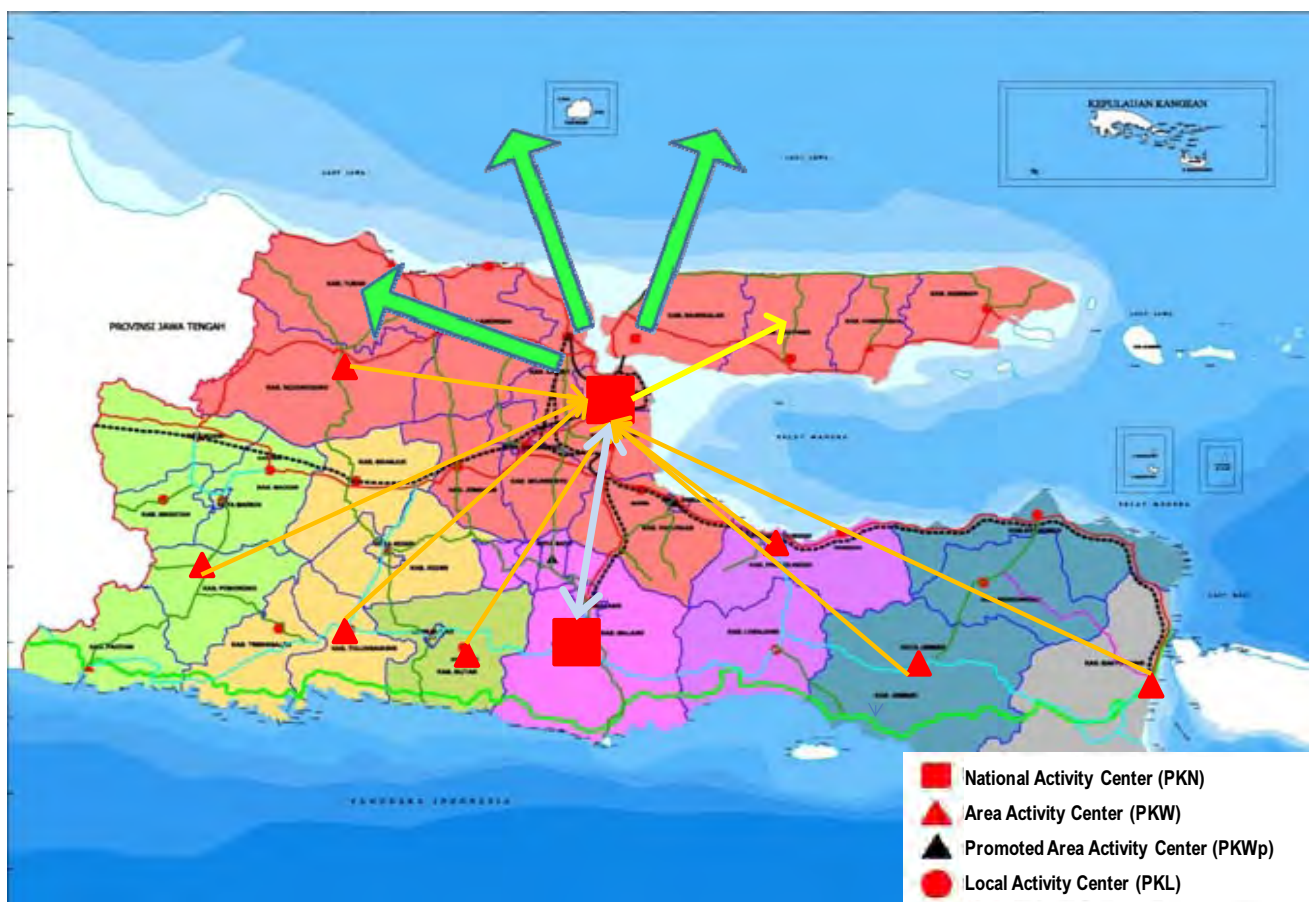


### 3.3 Fungsi dan Peran GKS

Berdasarkan analisis SWOT, fungsi dan peran yang diharapkan dari GKS adalah untuk menjadi Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas sebagai berikut:

- 1) Menjadi pusat terkemuka pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
- 2) Pusat logistik regional sebagai distribusi barang dan pintu gerbang ekspor-impor, yang mewakili Propinsi Jawa Timur
- 3) Pusat ekonomi ternama untuk pertanian, industri dan pariwisata

Di tingkat provinsi, GKS akan berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan Jawa Timur untuk mendorong daerah-daerah tetangga untuk mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi secara keseluruhan, sementara di tingkat lokal, GKS harus membuat permintaan lokal baru untuk pertanian, industri, komersial, pariwisata dan kegiatan konsumtif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.



Gambar 3.3.1 Posisi Fungsional Kawasan GKS di Provinsi Jawa Timur

### 3.4 Isu Pembangunan, Kebijakan dan Strategi untuk Penataan Ruang GKS

Melalui analisis SWOT serta serangkaian penelitian dasar dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan, prasarana dan utilitas sanitasi dan transportasi, dilakukan identifikasi pengembangan isu yang akan ditangani. Berdasarkan isu-isu yang dikenal tersebut, kebijakan dan strategi rencana penataan ruang GKS telah ditetapkan sebagai berikut. Kebijakan dan strategi ini sangat berkaitan untuk mewujudkan visi dan misi yang disebutkan sebelumnya.

#### 3.4.1 Pembangunan Ekonomi dan Sosial Regional

##### 1) Isu-isu Pembangunan

- Meningkatnya kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan
- Tingkat pengangguran tinggi, khususnya pada tingkat pendidikan
- Meningkatnya jumlah urbanisasi
- Kemiskinan di daerah pedesaan, dan keterbatasan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan untuk meningkatkan produk pertanian dan mendorong industri pengolahan
- Pembangunan industri di pusat perkotaan dikenakan biaya ekonomi tinggi akibat kemacetan lalu lintas dan degradasi lingkungan

##### 2) Kebijakan dan Strategi

GKS harus memiliki ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sebagai pusat pertumbuhan nasional lainnya dengan kebijakan kunci sebagai berikut:

Kebijakan 1: Penguatan kegiatan ekonomi dan fungsi perkotaan Surabaya sebagai pusat metropolitan

Strategi untuk Kebijakan 1:

- Peningkatan lingkungan bisnis yang baik untuk perdagangan dan jasa, industri, fungsi MICE, logistik dan kemudahan perkotaan lainnya;
- Pengembangan ekonomi perkotaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang terbaik untuk menarik investasi dan minat individu;
- Pengembangan jaringan infrastruktur di tingkat internasional, nasional dan regional;
- Promosi daerah berorientasi lingkungan dan hijau; dan
- Mengenalkan industri berteknologi tinggi dan sumberdaya manusia terkait teknologi tinggi dan pengembangan sumber daya manusia.

Kebijakan 2: Peningkatan pemerataan pembangunan diantara wilayah didalam kawasan GKS melalui pengembangan agropolitan dan ekonomi pedesaan berbasis pertanian

Strategi untuk Kebijakan 2:

- Pengembangan pertanian, industri berbasis agro dan pusat-pusat aktivitas nya;

- Memperkuat keterkaitan ekonomi daripada ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan melalui agropolitan;
- Pengembangan infrastruktur fisik dan fasilitas untuk pertanian dan agrobisnis dari produksi, pemasaran, pembiayaan, perdagangan, dan transportasi, dll;
- Pengembangan prasarana dan sarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran untuk membuka akses ke pasar ekspor; dan
- Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan pertanian, termasuk koperasi petani, organisasinya dan pendanaannya.

### 3.4.2 Pengembangan Struktur Ruang

#### 1) Isu-isu Pembangunan

Struktur ruang GKS perlu dibentuk secara cukup fungsional untuk menampung kegiatan ekonomi dan sosial sebagai antisipasi dalam jangka panjang. Untuk tujuan ini, berikut ini adalah isu-isu yang akan ditangani dalam penataan ruang:

- Konsentrasi sumber daya ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang berlebihan ke Kota Surabaya, sehingga membutuhkan sebuah sistem hirarki pusat pemukiman manusia untuk secara efisien mendistribusikan sumber daya ekonomi dan manfaat pembangunan ke masyarakat lokal di dalam wilayah GKS
- Meningkatnya kesenjangan kondisi ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga meningkatnya kebutuhan untuk merumuskan mekanisme untuk keberpihakan kepada "keberadaan dan kemakmuran" dari masyarakat perkotaan dan pedesaan
- Meluasnya urbanisasi yang tak terarah dan konversi lahan dari lahan pertanian sawah irigasi untuk penggunaan pelayanan perumahan dan perkotaan, yang membutuhkan pemanduan urbanisasi dengan meminimalkan konversi lahan yang tak terarah.

#### 2) Kebijakan dan Strategi

Struktur Spasial harus mencerminkan kebijakan pembangunan daerah dan strategi di atas dan kebijakan dasar untuk tata ruang yaitu (1) Pembentukan sistem perkotaan yang menarik dan efisien, (2) Peningkatan hubungan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan (3) Menciptakan lingkungan yang berorientasi struktur ruang.

Kebijakan 1: Pembentukan sistem perkotaan yang menarik dan efisien
--

Strategi untuk Kebijakan 1:

- Membentuk pusat-pusat berdasarkan hirarki kegiatan di pusat regional, pusat kabupaten, pusat kecamatan tidak hanya di kawasan GKS, tetapi Provinsi Jawa Timur termasuk Malang, dan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat regional di setiap kabupaten / kota;
- Revitalisasi dan mempercepat pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur didukung oleh pusat-pusat pertumbuhan regional dan pusat-pusat pertumbuhan local; dan
- Mengembangkan pusat-pusat perkotaan dan daerah sesuai dengan fungsi dan

perannya.

**Kebijakan 2: Pengembangan Sistem keterkaitan pedesaan - perkotaan**

Strategi untuk Kebijakan 2:

- Memperkuat hubungan pedesaan-perkotaan melalui fasilitasi sistem agropolitan;
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah pedesaan sebagai daerah inti; dan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan untuk mendukung sistem agropolitan.

**Kebijakan 3: Menciptakan wilayah yang kompak dan berorientasi lingkungan**

Strategi untuk Kebijakan 3:

- Mengontrol penyebaran perkotaan yang tak terarah dan menegakkan pengarahannya urbanisasi dalam sistem zoning penggunaan lahan;
- Fasilitasi integrasi pengembangan perkotaan dan jaringan transportasi umum;
- Manajemen penggunaan dan pengendalian pembangunan perkotaan di pinggiran kota dan pembangunan kembali kota di kawasan terbangun yang lebih kompak; dan
- Penciptaan ruang hijau dan ruang yang ramah penggunaan air di kawasan terbangun.

### 3.4.3 Pengembangan Sistem Transportasi

#### 1) Isu-isu Pembangunan

Pembentukan jaringan transportasi yang komprehensif dan efisien adalah kunci untuk kerangka ruang kawasan GKS. Untuk tujuan ini, isu pembangunan yang terjadi bervariasi, termasuk:

- Meningkatkan kepemilikan kendaraan, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas yang lebih serius di jalan-jalan dari hari ke hari
- Kurangnya jaringan jalan metropolitan yang mampu mengakomodasiantisipasi kebutuhan lalu lintas
- Kurangnya sistem jaringan transportasi umum yang komprehensif untuk meningkatkan mobilitas masyarakat
- Jenuhnya kapasitas pelabuhan di Tanjung Perak, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- Terbatasnya kapasitas fasilitas pelabuhan udara (landasan pacu dan terminal)
- Kurang fungsionalnya sistem transportasi barang

#### 2) Kebijakan dan Strategi

**Kebijakan 1: Mengurangi Kemacetan lalu lintas jalan dengan struktur jaringan jalan yang fungsional**

Strategi untuk Kebijakan 1:

- Mengidentifikasi 'bottle-necks' penyebab kemacetan lalu lintas jalan dan menguranginya dengan penyediaan fasilitas teknik, penegakan hukum lalu lintas dan manajemen permintaan;
- Meningkatkan jaringan jalan metropolitan untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas masa depan;
- Membentuk struktur jaringan jalan regional sistem 'trunk';
- Membentuk struktur sistem tol intra-perkotaan di Surabaya Metropolitan Area;
- Memperluas sistem tol antar kota (jalan tol) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Kebijakan 2: Meningkatkan "Mobilitas Masyarakat" dengan sistem transportasi umum yang berfungsi dengan baik

Strategi untuk Kebijakan 2:

- Meningkatkan dan memperkuat "Sistem Komuter Kereta" lebih lanjut, dengan meningkatkan kereta api yang ada di Surabaya Metropolitan Area;
- Meningkatkan sistem antar-moda, mengintegrasikan angkutan umum bus dan kereta api; dan
- Mendorong "Pembangunan berorientasi Transit" dalam hubungannya dengan Sistem Kereta Api Komuter.

Kebijakan 3: Struktur sistem transportasi barang fungsional

Strategi untuk Kebijakan 3:

- Menetapkan koridor pengangkutan barang yang terkait dengan pengembangan jaringan jalan utama regional;
- Memperkuat kapasitas fasilitas bangkutan angkutan barang utama yang berkaitan dengan pelabuhan dan kereta api; dan
- Relokasi pusat-pusat / fasilitas distribusi barang bersama dengan peningkatan jaringan jalan tol Metropolitan.

Kebijakan 4: Memperkuat "Fungsi Pelabuhan" internasional dan domestik untuk mendukung ekonomi global agar tumbuh di Kawasan GKS

Strategi untuk Kebijakan 4:

- Studi solusi alternatif yang layak untuk memperkuat kapasitas pelabuhan kontainer untuk memenuhi kebutuhan masa depan dalam jangka panjang dan mengidentifikasi solusi terbaik;
- Menerapkan pengembangan pelabuhan baru berdasarkan solusi diidentifikasi terbaik

Kebijakan 5: Memperkuat "Fungsi Bandara" internasional dan domestik untuk mendukung ekonomi global dapat tumbuh di Kawasan GKS

Strategi untuk Kebijakan 5:

- Studi solusi yang layak untuk memperluas kapasitas bandara untuk memenuhi kebutuhan masa depan dalam jangka panjang dan mengidentifikasi solusi terbaik bagi kedua landasan pacu dan terminal di sekitar Bandara Juanda;
- Menerapkan proyek perluasan bandara berdasarkan pada identifikasi solusi yang terbaik; dan
- Studi lebih lanjut alternatif kedua bandara internasional di kawasan GKS (Lamongan) untuk memenuhi permintaan jangka panjang.

### 3.4.4 Pembangunan Infrastruktur untuk Pengelolaan dan Pelayanan Utilitas Sumber Daya Air

#### 1) Isu-isu Pembangunan

Prasarana untuk pengelolaan air secara keseluruhan dan pelayanan utilitas / sanitasi sangat penting untuk mendukung semua jenis aktivitas manusia. Sebuah batas "daya dukung" menentukan batas pertumbuhan ekonomi. Di antara berbagai masalah-masalah pembangunan, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan dengan seksama:

#### Air

- Lemahnya pengelolaan sumber daya air
- Sistem penyediaan air yang miskin manajemen dengan kehilangan air yang luar biasa akibat kebocoran yang terjadi
- Kekurangan air bersih terutama di daerah perkotaan pada musim kemarau

#### Air Limbah dan Drainase Perkotaan

- Polusi air di sungai-sungai yang disebabkan oleh limbah domestik dan industri
- Tidak adanya sistem pemantauan kualitas air sungai secara permanen
- Banjir selama musim hujan di beberapa daerah pedesaan dan di sepanjang Sungai Bengawan Solo

#### Pengelolaan Persampahan

- Tidak adanya strategi jangka panjang yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat untuk pengolahan persampahan
- Kesulitan dalam ketersediaan lahan untuk tempat pembuangan akhir
- Lemahnya kesadaran masyarakat pada masalah serius pada Pengelolaan Persampahan, sehingga menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam "Gerakan 3R" (Reduction, Reuse dan Recycle)

### **Energi dan Listrik**

- Penting kebutuhan pasokan daya dan kualitas listrik yang stabil
- Harapan peningkatan kapasitas pasokan jaringan listrik dalam provinsi dalam jangka panjang

### **Telekomunikasi**

- Ekspektasi pasar yang adil dan pengoperasian yang baik oleh swasta sebagai penyedia pelayanan

## **2) Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan dan strategi untuk tujuan peningkatan tingkat pelayanan dan jaringan infrastruktur secara keseluruhan untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan penyediaan secara ramah lingkungan, yang meliputi pengelolaan-pengelolaan transportasi, suplai air, air limbah dan drainase, listrik dan energi, telekomunikasi, dan persampahan.

### **Penyediaan Air Bersih**

Kebijakan: Penyediaan air untuk penggunaan irigasi dan non-irigasi, memperbaiki situasi defisit air.
--

Strategi:

- Perluasan fasilitas air bersih;
- Peningkatan cakupan pelayanan dan aksesibilitas air untuk ditargetkan menjadi 76% pada 2030 dari 47% pada tahun 2006;
- Memastikan pengelolaan sumber daya air yang tepat untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penyediaan dengan membentuk perusahaan publik pengelola sungai, retribusi untuk penggunaan air sungai, dan pengenalan pembiayaan proyek-proyek air melalui swasta, dll;
- Mengelola air tanah termasuk sumur dan mata air;
- Mengurangi kehilangan air di sektor air bersih, yang lebih dari 30% melalui langkah-langkah berikut:
  - Penghematan air dengan menggunakan daur ulang dan efisien air;
  - Mempromosikan pengelolaan sisi permintaan untuk melestarikan sumber daya air;
  - Memperkenalkan pengalihan sumber daya air antar provinsi atau antar-kabupaten dari Sungai Bengawan Solo dan Umbulan;
  - Meningkatkan Pengelolaan Air melalui reformasi administrasi, seperti pembentukan Badan Regulasi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur antar-kabupaten, dan Pengenalan Sistem Indikator Kinerja (Performance Indicator System) untuk PDAM dan industri air lainnya.

### **Air Limbah dan Drainase Perkotaan**

Kebijakan: Mempromosikan lingkungan yang lebih sehat untuk kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan

Strategi:

- Pengelolaan sanitasi dan air limbah yang tepat, yang sekarang berada di bawah situasi tidak ada pelayanan pembuangan air limbah publik, hanya ada dengan pelayanan pembuangan lumpur septic;
- Peningkatan Kapasitas Pemantauan Pengendalian Pencemaran, khususnya air limbah industri, dan kualitas air sungai;
- Perbaiki Sistem Drainase Perkotaan melalui peningkatan kapasitas saluran drainase, pemeliharaan saluran, dan peningkatan kapasitas tanggap darurat; dan
- Peningkatan cakupan pelayanan di daerah perkotaan dan pedesaan.

### **Pengelolaan Persampahan**

Kebijakan: Menciptakan masyarakat pendaur materi/barang yang berkelanjutan dan ekonomis untuk mengurangi timbulan sampah dan membangun sistem pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik

Strategi:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan persampahan yang lebih baik, termasuk administrasi, pembiayaan, pengelolaan informasi, dll;
- Peningkatan aspek fisik dan teknis pengelolaan persampahan, termasuk kontainer, penyimpanan, peralatan transportasi sampah, kapasitas TPA dan sistem manajemen, dan waktu transportasinya;
- Paradigma peralihan dari End-of-Pipe ke pendekatan 3R (reduction, reuse, recycling);
- Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pengelolaan Persampahan, termasuk sistem daur ulang dan teknologi canggih;
- Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pengelolaan Persampahan, termasuk rehabilitasi infrastruktur, peningkatan regulasi dan kapasitas kelembagaan, dan manajemen kurikulum Pendidikan;
- Peningkatan Sistem Pengelolaan Data untuk pengelolaan sampah yang efisien dan efektif; dan
- Pengenalan Teknologi Baru pengurangan sampah dengan memperhitungkan keterbatasan TPA yang tersedia, termasuk insinerasi.

### **Listrik dan Energi**

Kebijakan: Menciptakan Masyarakat Hemat Energi dengan pembesaran kapasitas dengan menggunakan energi dalam cara yang konservatif



Strategi:

- Mempromosikan konservasi dan penghematan energy;
- Peningkatan dan penguatan jaringan untuk pasokan daya yang stabil, termasuk sistem jaringan transmisi dan distribusi;
- Fasilitasi "Manajemen Sisi Permintaan"; dan
- Memperketat kontrol untuk faktor kehilangan non-teknis (koneksi tidak teratur / ilegal, pembenahan meter kWh, dll).

### **Telekomunikasi**

Kebijakan: Dukungan pelayanan telekomunikasi oleh operator swasta

Strategi:

- Fasilitasi penyedia layanan telekomunikasi swasta
- Pelaksanaan Program Pelayanan Universal Telekomunikasi Daerah (WPUT)

## **3.4.5 Manajemen Lingkungan**

### **1) Isu-isu Pembangunan**

Tujuan akhir dari rencana tata ruang harus untuk mencapai keselarasan yang baik antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Terdapat potensi lingkungan yang tak ternilai di kawasan GKS, namun manajemen yang sesuai untuk sumber daya lingkungan sangat diperlukan, dengan mempertimbangkan sumber daya air, hutan, lahan pertanian dan sumber daya pesisir secara khusus.

- Lemahnya pengelolaan sumber daya air
- Lemahnya penegakan hukum untuk melindungi sumber daya lingkungan, ekosistem dan kawasan lindung seperti hutan, mangrove dan sumber daya ekologis penting lainnya
- Lemahnya manajemen bencana untuk waktu kejadian banjir dan tanah longsor
- Masalah ekonomi, pemukiman dan lingkungan yang disebabkan aliran lumpur Porong
- Risiko pada area lahan yang luas akan terendam akibat pemanasan global dalam jangka panjang.

### **2) Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan: Identifikasi Lingkungan Daerah Sensitif (ESA) dan memberikan penanggulangan kontrol khusus terhadap pembangunan perkotaan dan industri yang tidak terarah

Strategi:

- Review konsep-konsep dan hasil analisis dari "Lingkungan Daerah Sensitif (ESA)" digambarkan dalam studi ini (lihat Bagian 5.3 dalam laporan ini);
- Perumusan "Pedoman Manajemen Lingkungan Daerah Sensitif" dalam hal

penggunaan tanah dan sumber daya yang terletak di dalam Lingkungan Daerah Sensitif dan pemberian izin penerbitan;

- Penyusunan dasar hukum tentang Lingkungan Daerah Sensitif terkait dengan Undang-undang Penataan Ruang serta hukum lingkungan dan hutan-terkait; dan
- Fasilitasi pengembangan kapasitas bagi para pejabat pemerintah daerah dalam hal etika penegakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran hukum lingkungan dan peraturan terkait.

## 4. KERANGKA SOSIAL EKONOMI

### 4.1. Skenario Alternatif

**Skenario A: *Pertumbuhan Moderat***, dengan berkembangnya di daerah sub-urban, menjaga pertumbuhan penduduk konservatif di Surabaya (Berdasarkan estimasi oleh Bappeda Jawa Timur), terkait dengan Skenario Perekonomian A bahwa GKS akan menjaga posisi ekonomi yang sama bersama dengan pertumbuhan nasional pada tingkat yang moderat;

**Skenario B: *Pertumbuhan yang Didorong***, mengelola proses urbanisasi yang intensif di daerah pertumbuhan strategis di wilayah Metropolitan Surabaya (SMA), menarik pendatang sosial dari daerah lain (berdasarkan analisis oleh Tim Studi JICA), terkait dengan Skenario Perekonomian B, yang akan mendorong GKS sebagai pemimpin ekonomi pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Skenario ini digambarkan berdasarkan konsep nasional bahwa perekonomian regional diperkuat lebih lanjut dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jakarta dan provinsi lainnya.

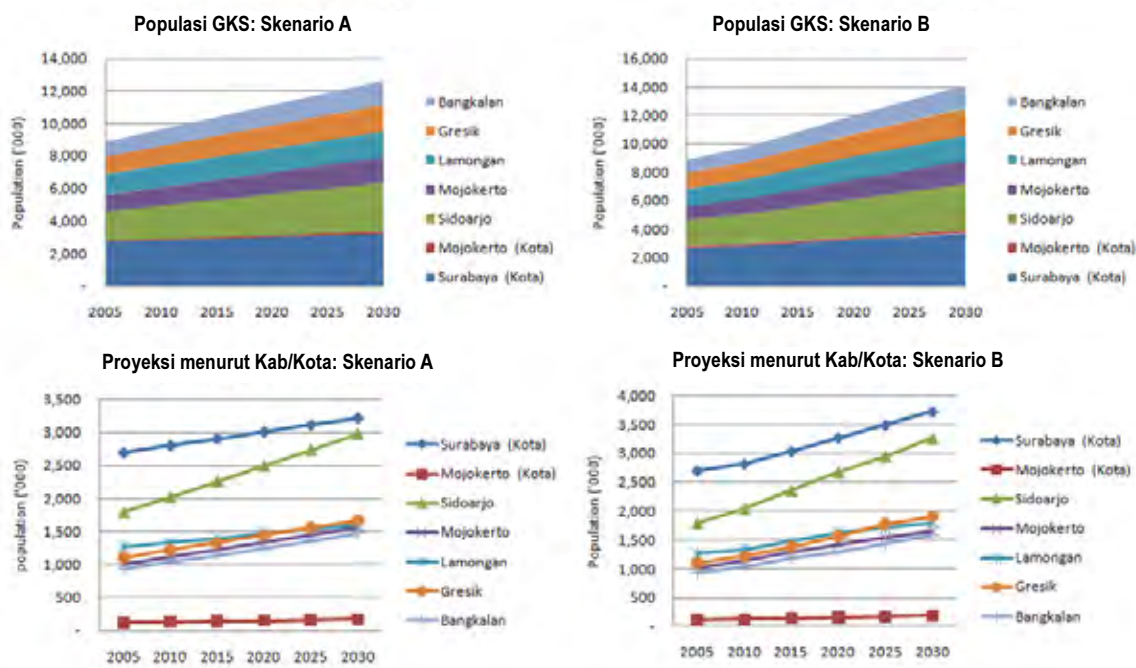
### 4.2. Kerangka Populasi Penduduk

**Skenario A (*Pertumbuhan Moderat*)** menunjukkan bahwa penduduk GKS pada tahun 2030 akan menjadi 12.645.000, dimana jumlah populasi untuk Surabaya mencapai 3.212.900, diikuti oleh Sidoarjo 2.977.400. Peningkatan penduduk di GKS 2008-2030 akan menjadi sekitar 3,3 juta. Dalam skenario ini, pertumbuhan penduduk Surabaya akan meningkat pada tingkat minimal, 0,6 -0,7% per tahun, lebih rendah dari rata-rata nasional, yang berarti bahwa penurunan sosial (atau migrasi keluar) akan berlangsung.

While, **Scenario B (*Pushed Growth*)** indicates that the GKS population will be 14,117,500 in 2030, out of which that of Surabaya will be 3,723,700, followed by Sidoarjo 3,257,400. These two will be predominant urban agglomerations in the Metropolitan. The increased population in GKS from 2008 to 2030 will be about 4.8 million. In this scenario, Surabaya's population will increase at 1.3-1.5% p.a. in the future, in such way that a social decrease will be minimized and rather attracting people along with an encouraged economy.

Sementara, **Skenario B (*Pertumbuhan yang Didorong*)** menunjukkan bahwa populasi GKS akan menjadi 14.117.500 pada tahun 2030, yang mana Surabaya akan menjadi 3.723.700, diikuti oleh Sidoarjo 3.257.400. Kedua kota tersebut akan mendominasi aglomerasi perkotaan di Kawasan Metropolitan GKS. Peningkatan populasi di GKS 2008-2030 akan menjadi sekitar 4,8 juta orang. Dalam skenario ini, penduduk Surabaya akan meningkat sebesar 1,3-1,5% per tahun di masa depan, sedemikian rupa bahwa penurunan sosial akan diminimalkan dan lebih menarik orang-orang bersamaan dengan perekonomian yang didorong tumbuh.

Kerangka pertumbuhan penduduk yang dibahas di atas ditunjukkan pada Gambar 4.2.1 dan Tabel 4.2.1.



Sumber: JICA Study Team

**Gambar 4.2.1 Proyeksi Penduduk menurut Skenario Pertumbuhan GKS**

**Tabel 4.2.1 Proyeksi Penduduk menurut Skenario Pertumbuhan GKS**

Skenario A: Pertumbuhan Moderat

NO	Kob/Kota	Number of Population (Actual)				Population Projection (Projection)					Increase 2030-2008
		2005	2006	2007	2008	2010	2015	2020	2025	2030	
1	Surabaya (Kota)	2,698,972	2,716,971	2,752,508	2,764,245	2,805,000	2,907,000	3,009,000	3,110,900	3,212,900	448,700
2	Mojokerto (Kota)	116,383	118,464	122,342	123,566	128,000	139,100	150,200	161,300	172,400	48,800
3	Sidoarjo	1,787,771	1,838,666	1,869,350	1,920,312	2,021,900	2,260,800	2,499,700	2,738,500	2,977,400	1,057,100
4	Mojokerto	1,008,740	1,027,871	1,066,854	1,074,879	1,122,200	1,230,800	1,339,400	1,448,000	1,556,600	481,700
5	Lamongan	1,261,972	1,274,194	1,297,427	1,302,605	1,331,800	1,398,800	1,465,800	1,532,800	1,599,900	297,300
6	Gresik	1,101,000	1,120,541	1,161,044	1,169,347	1,218,500	1,331,000	1,443,600	1,556,100	1,668,700	499,400
7	Bangkalan	926,560	945,863	983,150	990,711	1,036,500	1,141,600	1,246,800	1,352,000	1,457,100	466,400
	<b>GKS</b>	<b>8,901,398</b>	<b>9,042,570</b>	<b>9,252,675</b>	<b>9,345,664</b>	<b>9,663,900</b>	<b>10,409,100</b>	<b>11,154,500</b>	<b>11,899,600</b>	<b>12,645,000</b>	<b>3,299,300</b>
8	Pasuruan (Kota)	182,072	184,591	189,660	190,927	197,000	211,300	225,600	239,900	254,200	63,300
9	Pasuruan	1,464,297	1,485,342	1,529,363	1,540,234	1,592,200	1,714,900	1,837,700	1,960,400	2,083,100	542,900
10	Bojonegoro	1,238,811	1,251,051	1,274,986	1,281,129	1,310,100	1,378,600	1,447,100	1,515,600	1,584,100	303,000
11	Tuban	1,095,795	1,104,538	1,122,425	1,127,023	1,148,600	1,199,300	1,250,000	1,300,700	1,351,500	224,500
12	Jombang	1,199,958	1,212,876	1,238,576	1,245,086	1,276,100	1,349,200	1,422,200	1,495,300	1,568,400	323,300
	<b>Plus Area</b>	<b>5,180,933</b>	<b>5,238,398</b>	<b>5,355,010</b>	<b>5,384,400</b>	<b>5,524,000</b>	<b>5,853,300</b>	<b>6,182,600</b>	<b>6,511,900</b>	<b>6,841,300</b>	<b>1,456,900</b>
	<b>GKS Plus</b>	<b>14,082,331</b>	<b>14,280,968</b>	<b>14,607,685</b>	<b>14,730,064</b>	<b>15,187,800</b>	<b>16,262,400</b>	<b>17,337,000</b>	<b>18,411,500</b>	<b>19,486,100</b>	<b>4,756,000</b>
	East Java	37,070,731	37,478,737	38,286,258		39,540,400	41,753,500	44,133,000	46,695,000	48,916,800	48,916,800

Sumber: Fakta & Analisa RTRW Prov Jatim, 2009

**Skenario B: Pertumbuhan yang Didorong**

NO	Kob/Kota	Number of Population (Actual)				Population Projection (Projection)					Increase 2030-2008
		2005	2006	2007	2008	2010	2015	2020	2025	2030	
1	Surabaya (Kota)	2,698,972	2,716,971	2,752,508	2,764,245	2,819,800	3,037,700	3,272,500	3,490,800	3,723,700	959,500
2	Mojokerto (Kota)	116,383	118,464	122,342	123,566	128,600	142,000	156,800	173,100	191,100	67,500
3	Sidoarjo	1,787,771	1,838,666	1,869,350	1,920,312	2,037,300	2,361,800	2,672,200	2,950,300	3,257,400	1,337,100
4	Mojokerto	1,008,740	1,027,871	1,066,854	1,074,879	1,140,300	1,290,100	1,424,400	1,534,500	1,653,100	578,200
5	Lamongan	1,261,972	1,274,194	1,297,427	1,302,605	1,333,100	1,471,900	1,625,100	1,708,000	1,795,100	492,500
6	Gresik	1,101,000	1,120,541	1,161,044	1,169,347	1,224,500	1,385,400	1,567,500	1,773,500	1,910,600	741,300
7	Bangkalan	926,560	945,863	983,150	990,711	1,041,800	1,178,700	1,301,400	1,436,900	1,586,500	595,800
	<b>GKS</b>	<b>8,901,398</b>	<b>9,042,570</b>	<b>9,252,675</b>	<b>9,345,664</b>	<b>9,725,400</b>	<b>10,867,600</b>	<b>12,019,900</b>	<b>13,067,100</b>	<b>14,117,500</b>	<b>4,771,800</b>
8	Pasuruan (Kota)	182,072	184,591	189,660	190,927	197,500	211,300	226,100	241,900	258,800	67,900
9	Pasuruan	1,464,297	1,485,342	1,529,363	1,540,234	1,597,800	1,718,800	1,849,000	1,989,000	2,139,600	599,400
10	Bojonegoro	1,238,811	1,251,051	1,274,986	1,281,129	1,311,700	1,375,300	1,442,000	1,511,900	1,585,200	304,100
11	Tuban	1,095,795	1,104,538	1,122,425	1,127,023	1,149,800	1,196,900	1,245,900	1,297,000	1,350,100	223,100
12	Jombang	1,199,958	1,212,876	1,238,576	1,245,086	1,278,100	1,346,900	1,419,400	1,495,800	1,576,300	331,200
	<b>Plus Area</b>	<b>5,180,933</b>	<b>5,238,398</b>	<b>5,355,010</b>	<b>5,384,400</b>	<b>5,534,900</b>	<b>5,849,200</b>	<b>6,182,400</b>	<b>6,535,600</b>	<b>6,910,000</b>	<b>1,525,600</b>
	<b>GKS Plus</b>	<b>14,082,331</b>	<b>14,280,968</b>	<b>14,607,685</b>	<b>14,730,064</b>	<b>15,260,300</b>	<b>16,716,800</b>	<b>18,202,300</b>	<b>19,602,700</b>	<b>21,027,500</b>	<b>6,297,400</b>
	<b>East Java</b>	<b>37,070,731</b>	<b>37,478,737</b>	<b>38,286,258</b>		<b>39,540,400</b>	<b>41,753,500</b>	<b>44,133,000</b>	<b>46,695,000</b>	<b>48,916,800</b>	<b>48,916,800</b>

Sumber: Proyeksi oleh JICA Study Team, 2009

## 4.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

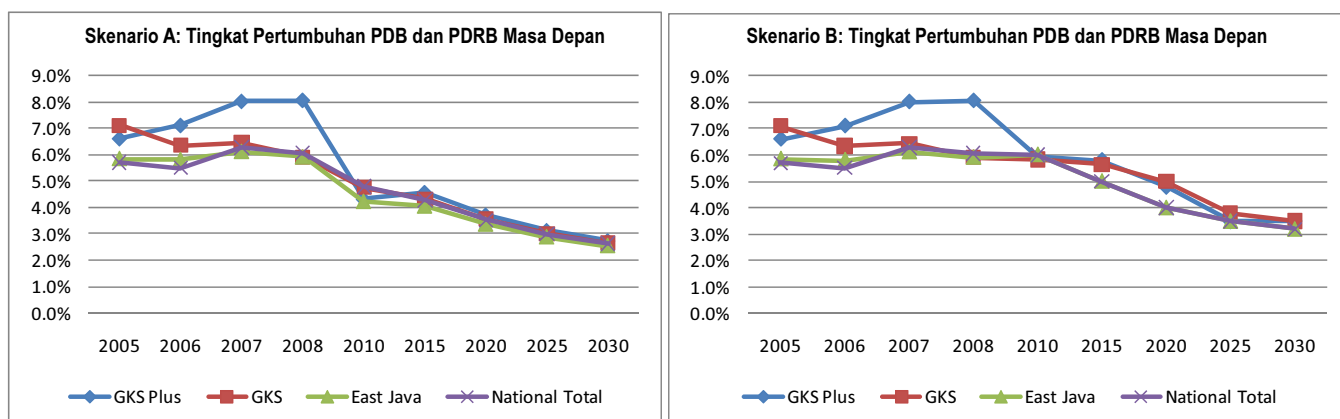
### 4.3.1 Kerangka Nasional dan Regional

Perspektif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dalam dua skenario. Perkiraan tingkat pertumbuhan dari GKS, GKS Plus, Jawa Timur dan Total Nasional ditunjukkan dalam Gambar 4.3.1 dan Tabel 4.3.1. Perekonomian Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang cukup tinggi pada beberapa tahun terakhir, meskipun perekonomian dunia mengalami kesulitan keuangan. Namun, melihat pola jangka panjang, tingkat pertumbuhan tidak akan terjaga dalam tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan mencapai tahapan jenuh pada tingkat tertentu, sekitar 2,0 - 3,0 % per tahun.

Posisi ekonomi GKS terhadap perekonomian nasional akan berbeda menurut masing-masing skenario. Posisi komparatif ekonomi GKS diwakili oleh sumbangan PDRB dari PDB nasional seperti yang disajikan pada Tabel 4.3.2

**Skenario A (Skenario Pertumbuhan Moderat):** Pertumbuhan GKS tidak akan berubah secara signifikan bahkan di masa depan, dan tetap konstan dari waktu ke waktu pada posisi saat ini yang menggambarkan sumbangan dari PDB GKS terhadap PDRB nasional sebesar 6,5%.

**Skenario B (Skenario Pertumbuhan yang Didorong):** posisi komparatif Kawasan GKS terhadap perekonomian nasional akan meningkat menjadi 7,0% dari sumbangan yang ada saat ini sebesar 6,5%, meskipun skenario ini mengasumsikan tingkat pertumbuhan sedikit lebih tinggi dalam perekonomian nasional daripada Skenario A. Ini berarti bahwa ekonomi GKS akan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan strategis negara di melalui Skenario B.



Sumber: JICA Study Team

**Gambar 4.3.1 Proyeksi Laju Pertumbuhan Perekonomian GKS, Jawa Timur dan Nasional**

**Tabel 4.3.1 Proyeksi Laju Pertumbuhan Perekonomian GKS, Jawa Timur dan Nasional**  
Skenario A: Pertumbuhan Moderat (berjalan bersamaan dengan Pertumbuhan Nasional)

	2005	2006	2007	2008	2010	2015	2020	2025	2030
GKS	7.1%	6.3%	6.4%	5.9%	4.7%	4.3%	3.5%	3.0%	2.7%
GKS Plus	6.6%	7.1%	8.0%	8.0%	4.3%	4.6%	3.7%	3.1%	2.7%
East Java	5.8%	5.8%	6.1%	5.9%	4.2%	4.0%	3.4%	2.9%	2.5%
Rest of Java	5.8%	5.8%	6.1%	5.9%	3.7%	3.7%	3.1%	2.7%	2.4%
Nasional Total	5.7%	5.5%	6.3%	6.1%	4.8%	4.3%	3.5%	3.0%	2.6%

Skenario B: Pertumbuhan yang Didorong (Melebihi Pertumbuhan Ekonomi Nasional)

	2005	2006	2007	2008	2010	2015	2020	2025	2030
GKS	7.1%	6.3%	6.4%	5.9%	5.8%	5.6%	5.0%	3.8%	3.5%
GKS Plus	6.6%	7.1%	8.0%	8.0%	5.9%	5.8%	4.8%	3.5%	3.5%
East Java	5.8%	5.8%	6.1%	5.9%	6.0%	5.0%	4.0%	3.5%	3.2%
Rest of Java	4.6%	5.1%	5.5%	5.5%	6.2%	5.4%	4.2%	3.6%	3.5%
Nasional Total	5.7%	5.5%	6.3%	6.1%	6.0%	5.0%	4.0%	3.5%	3.2%

Sumber: JICA Study Team

**Tabel 4.3.2 Sumbangan Perekonomian terhadap Total Nasional (%)**  
Skenario A: Pertumbuhan Moderat      Skenario B: Pertumbuhan yang Didorong

	2008	2010	2020	2030		2008	2010	2020	2030
GKS	6.5%	6.5%	6.5%	6.5%	GKS	6.5%	6.5%	6.8%	7.0%
GKS Plus	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	GKS Plus	1.3%	1.3%	1.4%	1.5%
Rest of East Java	6.8%	6.7%	6.3%	6.2%	Rest of East Java	6.8%	6.9%	6.9%	6.9%
East Java	14.6%	14.5%	14.2%	14.0%	East Java	14.6%	14.7%	15.1%	15.4%
Nasional Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Nasional Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: JICA Study Team

### 4.3.2 Kerangka Ekonomi GKS: Tingkat Pertumbuhan & PDRB pada Harga Konstan 2000

Pertumbuhan ekonomi terkait dengan kegiatan industri dan akumulasi pelayanan perkotaan. Dengan demikian, tingkat industrialisasi adalah salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan dan potensi ekonomi.

Tingkat Proyeksi, dalam kasus Skenario A, dikutip dari "Analisa Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Jawa Timur, 2008" yang mewakili pertumbuhan moderat. Sementara itu untuk Skenario B, tingkat pertumbuhan dari masing-masing Kabupaten / Kota telah diuji oleh Tim Studi JICA, dengan memperhitungkan potensi pengolahan hasil pertanian dan promosi nilai-pertanian serta potensi industrialisasi lebih lanjut. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa tiga potensi ekonomi dari Surabaya, Gresik dan Sidoarjo akan terus menikmati pertumbuhan yang relatif tinggi, diikuti dengan Mojokerto dimana kegiatan 'agro-processing' yang proaktif diharapkan terjadi di masa depan.

Gambar 4.3.2 menunjukkan proyeksi jangka panjang dari PDRB atas dasar harga konstan 2000 di GKS berdasarkan dua skenario.

**Tabel 4.3.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harga GKS**

#### Skenario A: Pertumbuhan Moderat

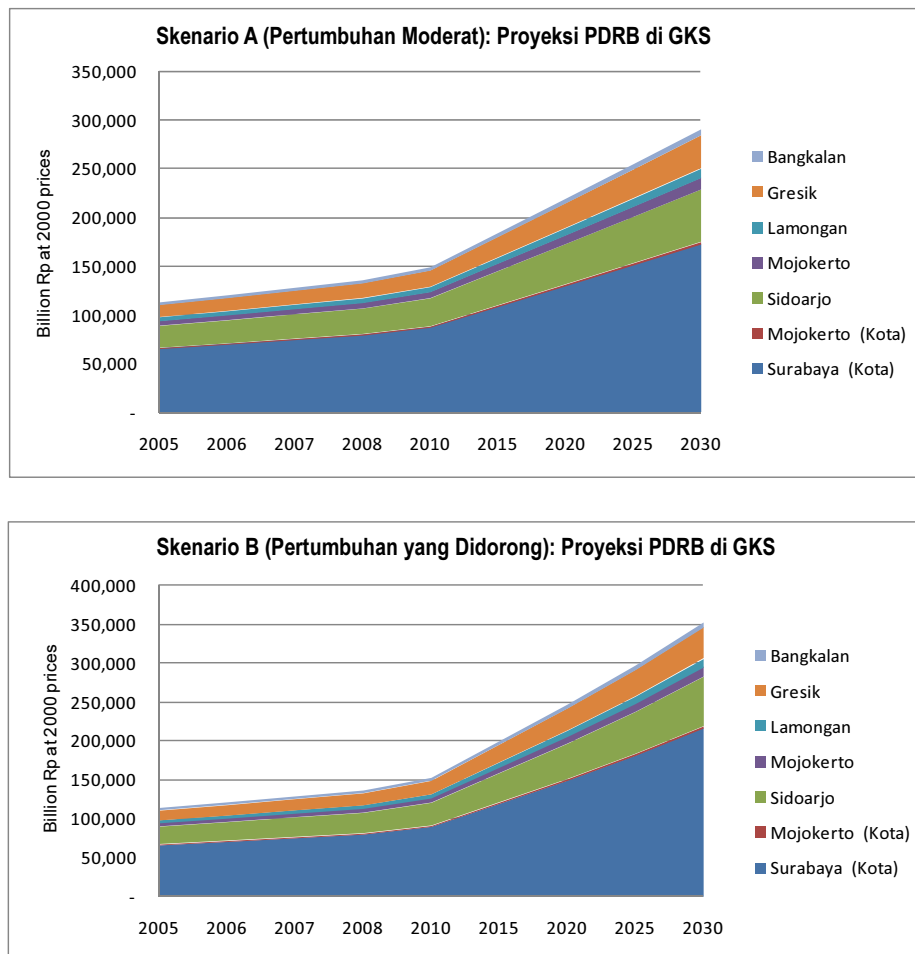
	2008	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Surabaya (Kota)</b>	6.3%	4.9%	4.4%	3.6%	3.1%	2.7%
<b>Mojokerto (Kota)</b>	5.2%	4.6%	4.1%	3.4%	2.9%	2.6%
<b>Sidoarjo</b>	4.5%	4.7%	4.0%	3.4%	2.9%	2.5%
<b>Mojokerto</b>	5.5%	4.4%	4.0%	3.3%	2.8%	2.5%
<b>Lamongan</b>	5.9%	3.9%	3.9%	3.2%	2.8%	2.5%
<b>Gresik</b>	6.8%	4.9%	4.5%	3.7%	3.1%	2.7%
<b>Bangkalan</b>	4.5%	3.7%	3.5%	3.0%	2.6%	2.3%
<b>GKS</b>	5.9%	4.7%	4.3%	3.5%	3.0%	2.7%

Sumber: Analisa Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Jawa Timur, 2008

#### Skenario B: Pertumbuhan yang Didorong

	2008	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Surabaya (Kota)</b>	6.3%	6.0%	5.9%	4.5%	4.0%	3.6%
<b>Mojokerto (Kota)</b>	5.2%	5.5%	5.0%	3.7%	3.2%	3.0%
<b>Sidoarjo</b>	4.5%	5.7%	5.0%	4.0%	3.5%	3.5%
<b>Mojokerto</b>	5.5%	4.8%	4.4%	3.7%	3.1%	2.8%
<b>Lamongan</b>	5.9%	5.4%	5.0%	3.6%	3.1%	3.0%
<b>Gresik</b>	6.8%	6.3%	5.6%	4.4%	3.7%	3.4%
<b>Bangkalan</b>	4.5%	4.8%	4.2%	3.5%	3.1%	3.0%
<b>GKS</b>	5.9%	5.8%	5.6%	4.3%	3.8%	3.5%

Sumber: JICA Study Team



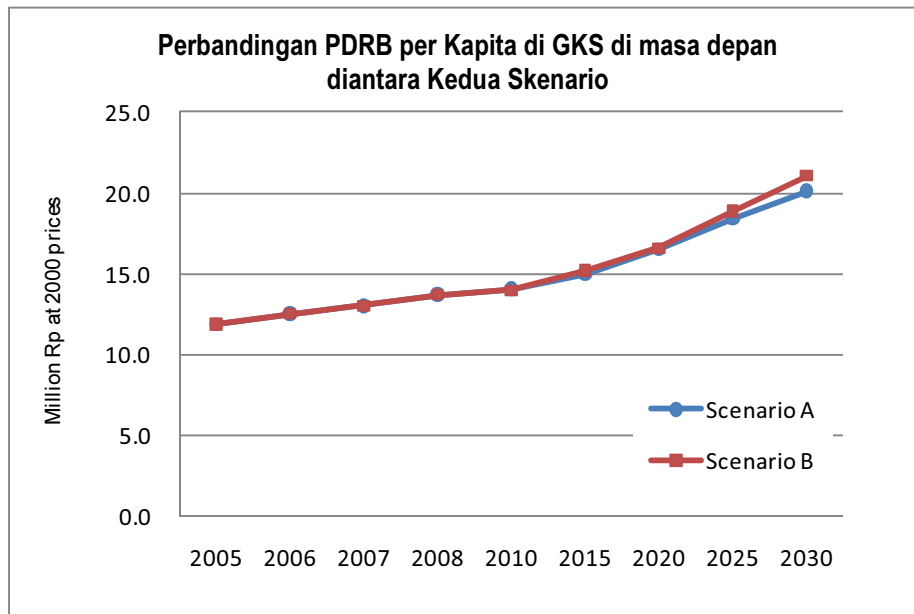
Sumber: JICA Study Team

**Gambar 4.3.2 Proyeksi Pertumbuhan PDRB di GKS**

### 4.3.3 Pertumbuhan PDRB Per Kapita GKS

Perubahan " PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000", sebagai indeks kemakmuran rakyat, yang diperiksa pada kurun waktu hingga 2030. Arus PDRB per kapita di GKS sebesar Rp.13.7 juta pada tahun 2008, dan akan meningkat menjadi Rp.20.1 juta untuk Skenario A, dan Rp.21.0 juta dalam Skenario B pada tahun 2030. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua skenario yang dapat ditemukan, karena peningkatan populasi berlangsung seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi dalam Skenario B, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.3. Tingkat kemakmuran Rakyat pada tahun 2030 akan meningkat 1,53 kali lebih tinggi daripada tahun 2008.





Sumber: JICA Study Team

**Gambar 4.3.3 Perubahan PDRB Per Kapita di GKS**

#### 4.3.4 Koherensi untuk Kerangka Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan berdasarkan skenario pertumbuhan sosial ekonomi yang telah dibahas di atas. Tuntutan untuk jaringan transportasi, penggunaan lahan, infrastruktur, utilitas dan pelayanan publik untuk semua diuji dalam dua skenario alternatif: pertumbuhan moderat atau pertumbuhan yang didorong.

Skenario pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menguntungkan bagi kehidupan orang-orang kaya dan stabilitas pekerjaan. Namun, pada saat yang sama, itu akan membawa beban kepada lingkungan, pemborosan ekonomi oleh kemacetan lalu lintas dan biaya sosial bagi penyediaan layanan publik kepada masyarakat, kecuali jika langkah yang tepat dilaksanakan. Struktur ruang alternatif harus dievaluasi dalam hal dampak ekonomi dan lingkungan seperti yang akan terjadi pada masyarakat.

Sebagai hasil analisis yang diringkas pada Tabel 4.3.4, **Skenario B** atau **Skenario Pertumbuhan yang Didorong** diterapkan dalam kerangka kerja sosial ekonomi dalam perencanaan tata ruang, karena Kawasan GKS harus menjadi pelopor ekonomi terkemuka di Indonesia, yang koheren dengan isu kebijakan penting untuk mencapai pertumbuhan nasional yang adil. GKS merupakan kawasan ekonomi terbesar kedua dengan potensi yang besar untuk pembangunan sosial dan ekonomi, sebagai pusat regional tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga untuk wilayah timur Indonesia. Potensi terpendam ini harus dirangsang untuk mencapai tujuan nasional jangka panjang untuk mewujudkan struktur pembangunan yang seimbang dan adil. Demi tujuan ini, Skenario B dinilai paling cocok untuk kerangka perencanaan tata ruang.

**Tabel 4.3.4 Perbandingan dan Evaluasi Skenario Alternatif**

	<b>Skenario A (Pertumbuhan Moderat)</b>	<b>Skenario B (Pertumbuhan yang Didorong)</b>
Posisi Ekonomi Kawasan GHKS terhadap Nasional pada Tahun 2030	Perbandingannya sama dengan posisi saat ini	Menjadi pemimpin ekonomi nasional dengan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada rerata nasional
Proses Urbanisasi	Proses urbanisasi tetap berlanjut dengan kecepatan yang sama dengan keadaan sebelumnya (sub-urbanization)	Urbanisasi yang dikendalikan melalui intensifikasi kawasan terbangun dan meminimalkan persebaran luasan perkotaan (konsep <i>compact city</i> )
Pertumbuhan Ekonomi	Moderat	Sedikit lebih maju
Beban Lingkungan	Meningkat bersamaan dengan tekanan pembangunan dan proses urbanisasi	Perlu untuk menetapkan suatu sistem manajemen yang lebih praktis untuk mengurangi dampak negatif lingkungan

Sumber: JICA Study Team

## 5. RENCANA STRUKTUR RUANG

### 5.1 Rencana Sistem Perkotaan: Sistem Permukiman

#### 5.1.1 Pola Struktur dan Ruang

##### 1) Struktur Permukiman Perkotaan dan Megapolitan

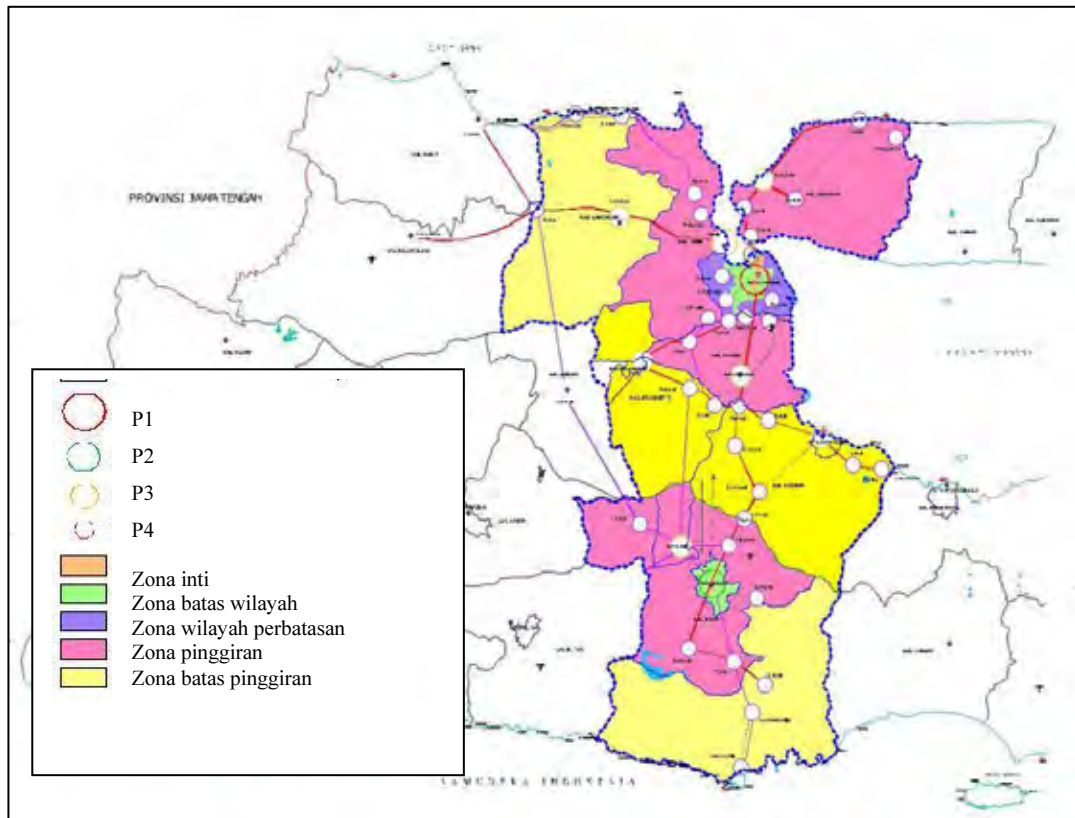
Selain struktur sembilan-pusat perkotaan tersebut di atas, seperti yang dijelaskan dalam strategi di atas, ada ide sistem hirarki perkotaan dengan konurbasi lebih besar atau megapolitan, termasuk Malang Raya Metropolitan Area.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, daerah perkotaan Tingkat P1 disebut "MEGASUMA" yang merupakan daerah megapolitan yang terdiri dari gabungan Kawasan GKS Plus dan Malang Raya Metropolitan Area. "PASGERBANGKERTOSUSILA (GKS & Pasuruan) dan Malang Raya Metropolitan", masing-masing diklasifikasikan sebagai daerah perkotaan Tingkat P2, yang merupakan daerah metropolitan. Daerah perkotaan Tingkat P3 merupakan daerah perkotaan besar SMA dan Wilayah Kota Malang, Tingkat P4 adalah wilayah Kota Surabaya dan Kota Malang.

Sistem kawasan perkotaan klasifikasi megapolitan Tingkat P1 - MEGASUMA dan kawasan perkotaan Tingkat P2 tampak jelas tidak konsisten dengan sembilan struktur perkotaan WP yang memiliki Kawasan GERBANKERTOSUSILA PLUS (GKS-Plus) sebagai salah satu kawasan perkotaan.

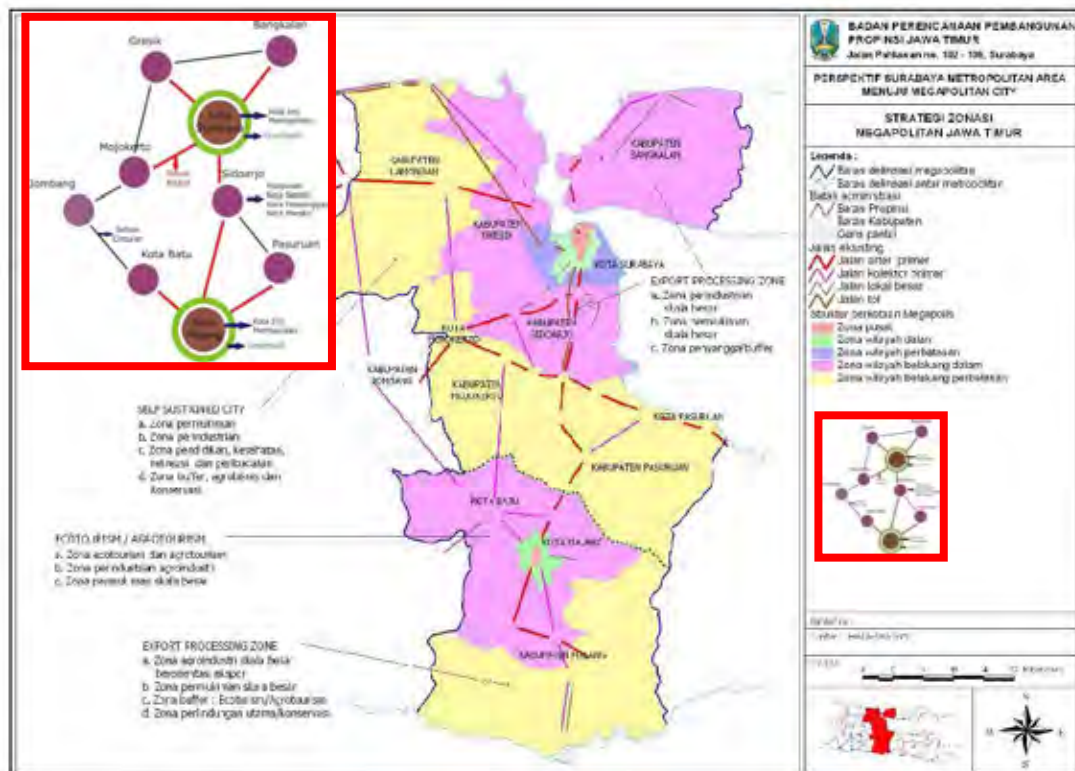
##### 2) Struktur Megapolitan (MEGASUMA)

Sebagai kawasan megapolitan, MEGASUMA digambarkan di dalam RTRW Provinsi Jawa Timur. Wilayah MEGASUMA terletak di arah utara-selatan dengan Surabaya dan Malang berada di bagian tengah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (2009 – 2029)

**Gambar 5.1.1 Struktur Ruang MEGASUMA**



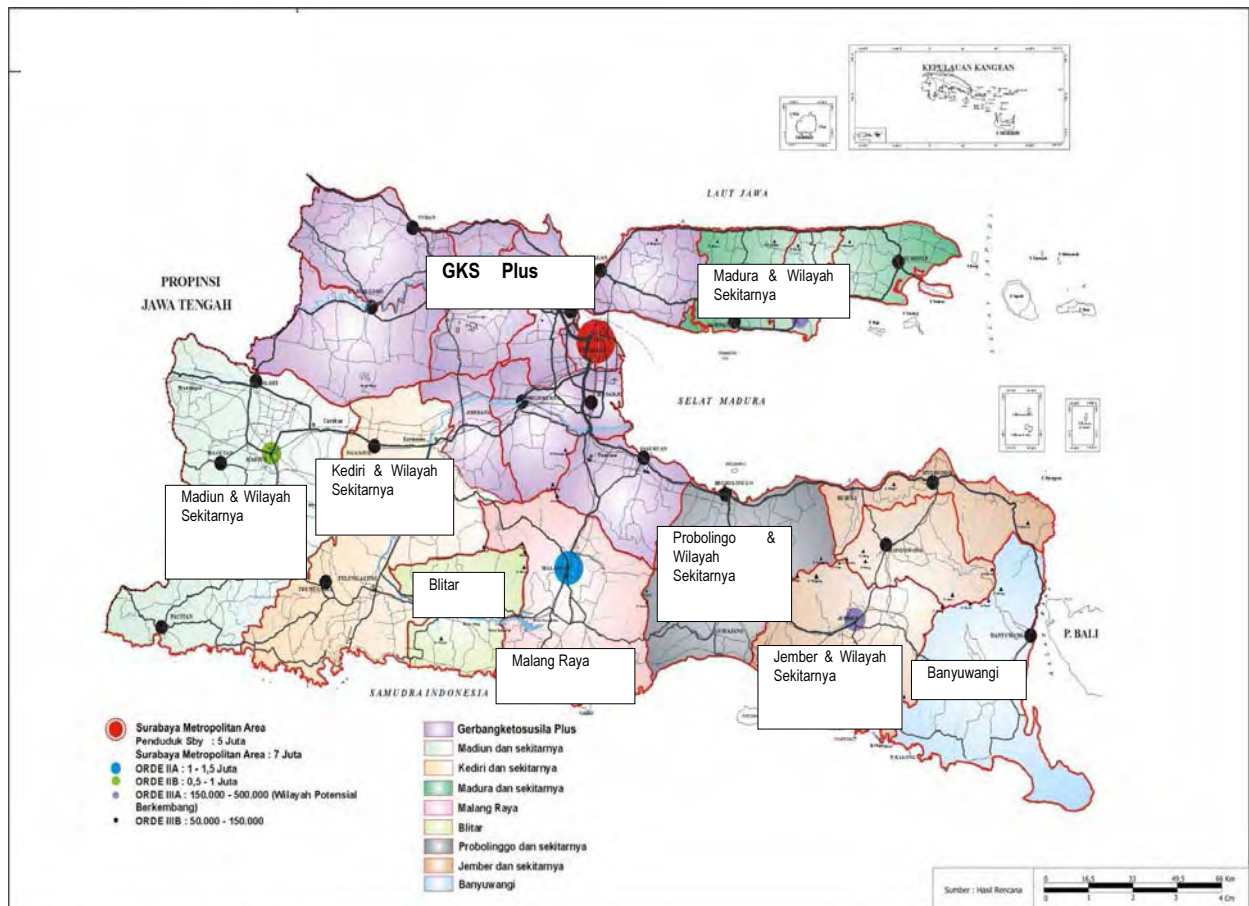
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (2009 – 2029)

**Gambar 5.1.2 Fungsi Perkotaan di MEGASUMA**

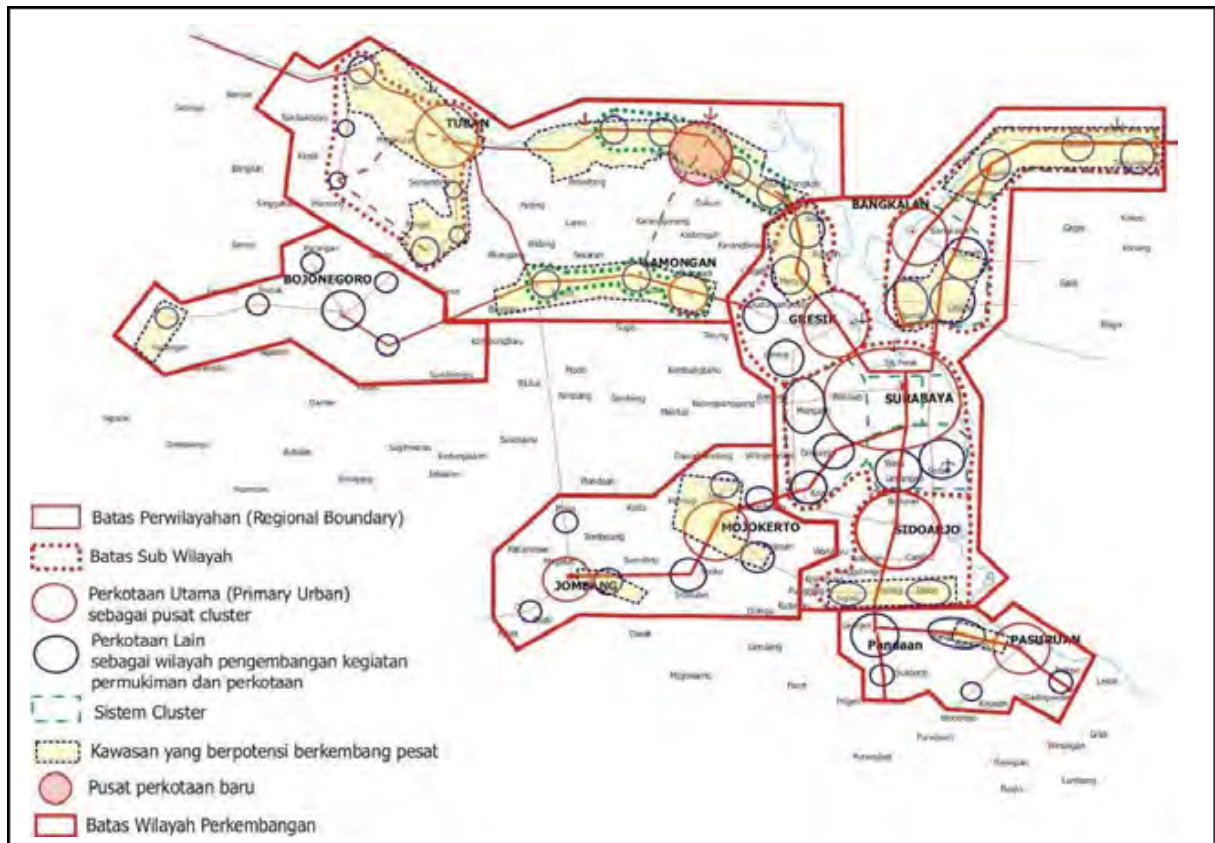
### 3) Regional Development Zones

Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 9 zona wilayah pengembangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1.3. Wilayah pengembangan GKS Plus distrukturkan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 5.1.4. di bawah.

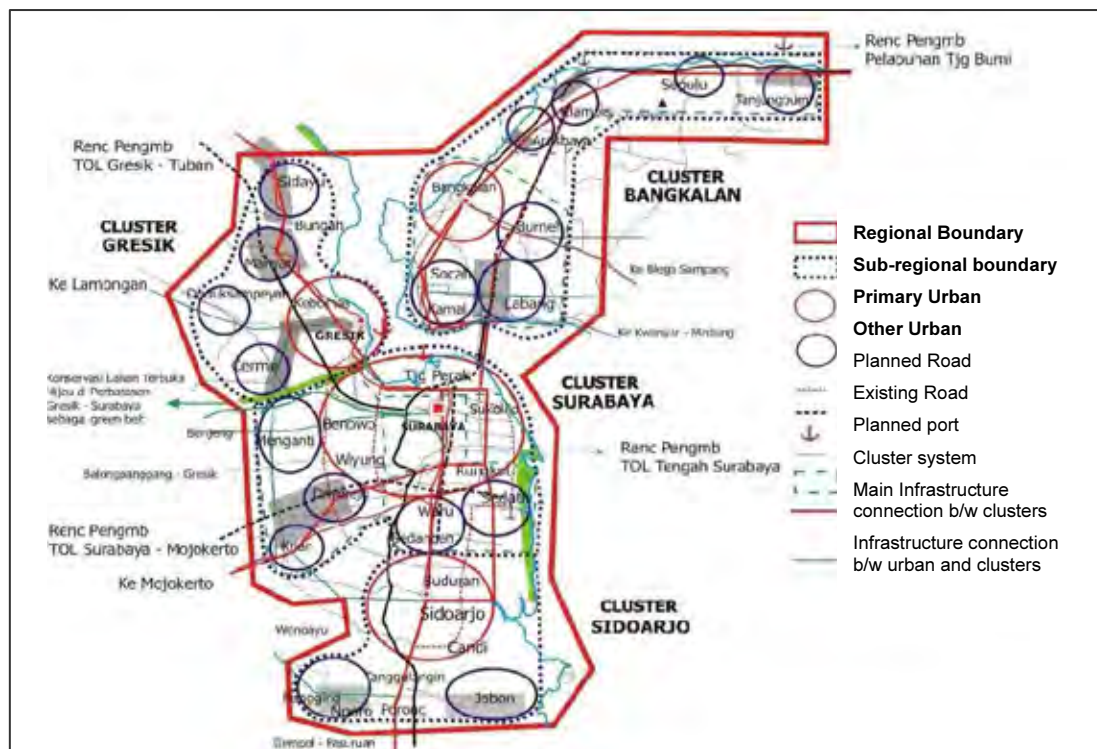
Gambar 5.1.5 sampai dengan Gambar 5.1.7 menunjukkan Struktur Ruang yang berkaitan dengan Kawasan GKS. Surabaya Metropolitan Area (SMA) masih menjadi pusat untuk seluruh wilayah di Jawa Timur, dan didukung oleh Wilayah Pengembangan Lamongan-Tuban, Wilayah Pengembangan Mojokerto-Jombang dan Wilayah Pengembangan Pasuruan. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa wilayah Pasuruan memiliki koneksi ekonomi yang tinggi dan transportasi yang intensif untuk Kawasan SMA. Situasi ini akan mempengaruhi struktur ruang untuk GKS Plus dan perubahan untuk Kawasan PASGERBANGKERTOSUSILA yang diusulkan. Sementara itu, di Wilayah Pengembangan Lamongan-Tuban, akan ada pusat perkotaan baru yang berada di Kecamatan Paciran.



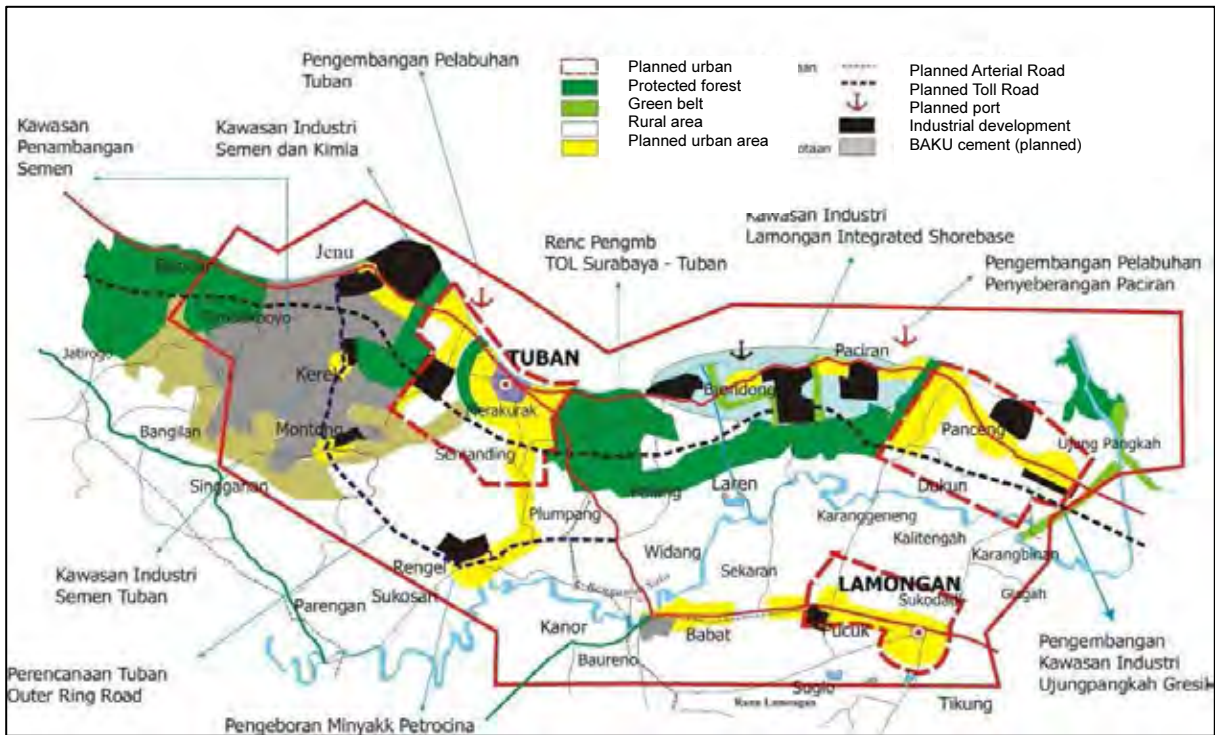
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (2005 – 2020) dan RTRW Provinsi Jawa Timur (2009 – 2029)  
**Gambar 5.1.3 Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Timur**



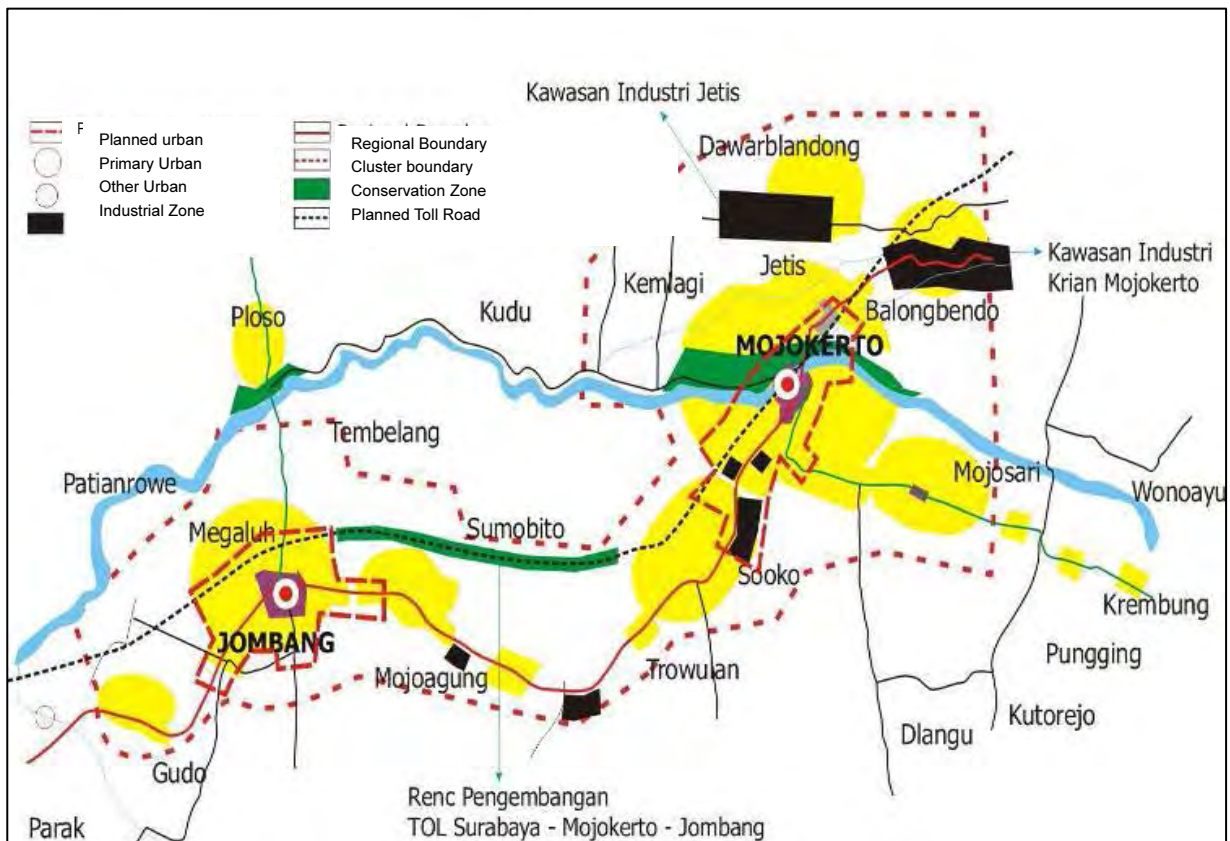
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (2005 – 2020) dan RTRW Provinsi Jawa Timur (2009 – 2029)  
**Gambar 5.1.4 Rencana Struktur Ruang Kawasan GKS Plus**



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (2005 – 2020) dan RTRW Provinsi Jawa Timur (2009 – 2029)  
**Gambar 5.1.5 Rencana Struktur Ruang Surabaya Metropolitan Area**



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (2005 – 2020) dan RTRW Provinsi Jawa Timur (2009 – 2029)  
**Gambar 5.1.6 Sistem Pusat Permukiman Kawasan Lamongan – Tuban**



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (2005 – 2020) dan RTRW Provinsi Jawa Timur (2009 – 2029)  
**Gambar 5.1.7 Sistem Pusat Permukiman Kawasan Mojokerto – Jombang**